# WARNA LOKAL BALI DALAM NOVEL SUKRENI GADIS BALI

72

PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

alg

# WARNA LOKAL BALI DALAM NOVEL *SUKRENI GADIS BALI* KARYA ANAK AGUNG PANDJI TISNA

Made Pasek Parwatha
Ida Bagus Darmasuta
I Ketut Mandala Putra
Ni Putu Asmarini

00003528

PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

**PUSAT BAHASA**
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**
**JAKARTA**
**2002**

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA
Klasifikasi
PB
899.213 072
WAR
w
No. Induk : 109
10/2003
Tgl. : 3
Ttd. :

**Penyunting**
Tri Iryani Hastuti

**Pusat Bahasa**
**Departemen Pendidikan Nasional**
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta 13220

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog dalam Terbitan (KDT)

899.213 8
PAR
w

PARWATHA, I Made Pasek *[ et al.]*
Warna Lokal Bali dalam Novel Sukreni Gadis Bali Karya Anak Agung Pandji Tisna.-- Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.

ISBN 979 685 263 2

FIKSI INDONESIA-RETORIKA

# KATA PENGANTAR
# KEPALA PUSAT BAHASA

Masalah kesastraan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, globalisasi, maupun sebagai dampak perkembangan teknologi informasi yang amat pesat. Kondisi itu telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Gerakan reformasi yang bergulir sejak 1998 telah mengubah paradigma tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tatanan kehidupan yang serba sentralistik telah berubah ke desentralistik, masyarakat bawah yang menjadi sasaran (objek) kini didorong menjadi pelaku (subjek) dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mengubah orientasi kiprahnya. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi tersebut, Pusat Bahasa berupaya mewujudkan pusat informasi dan pelayanan kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan itu, telah dan sedang dilakukan (1) penelitian, (2) penyusunan, (3) penerjemahan karya sastra daerah dan karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia, (4) pemasyarakatan sastra melalui berbagai media, antara lain melalui televisi, radio, surat kabar, dan majalah, (5) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang sastra melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian penghargaan.

Untuk itu, Pusat Bahasa telah melakukan penelitian sastra Indonesia melalui kerja sama dengan tenaga peneliti di perguruan tinggi di wilayah pelaksanaan penelitian. Setelah melalui proses penilaian dan penyuntingan, hasil penelitian itu diterbitkan dengan dana Bagian Proyek Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan. Penerbitan ini diharapkan dapat memperkaya bacaan tentang penelitian di Indonesia agar kehidupan sastra

lebih semarak. Penerbitan buku *Warna Lokal Bali dalam Novel Sukreni Gadis Bali karya Anak AgungPandji Tisna* ini merupakan salah satu upaya ke arah itu. Kehadiran buku ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, terutama Bagian Proyek Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan. Untuk itu, kepada para peneliti saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada penyunting nas-kah laporan penelitian ini. Demikian juga kepada Drs. Sutiman, M.Hum., Pemimpin Bagian Proyek Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan beserta staf yang mempersiapkan penerbitan ini saya sampaikan ucapan terima kasih.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat bagi peminat sastra serta masyarakat pada umumnya.

Jakarta, November 2002 **Dr. Dendy Sugono**

# UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penelitian *Warna Lokal Bali dalam Novel Sukreni Gadis Bali Karya Anak Agung Pandji Tisna* ini dibiayai oleh Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Bali tahun anggaran 1999/2000.

Penelitian *Warna Lokal Bali dalam Novel Sukreni Gadis Bali Karya Anak Agung Pandji Tisna* ini dilaksanakan oleh sebuah tim peneliti yang terdiri atas: (1) Drs. Made Pasek Parwatha sebagai ketua, (2) Drs. Ida Bagus Darmasuta, (3) Drs. I Ketut Mandala Putra, (4) Dra. Ni Putu Asmarini, masing-masing sebagai anggota, (5) Dr. Nyoman Ketha Ratna sebagai konsultan, dan (6) Drs. Made Suandhi sebagai pembantu peneliti.

Dalam penelitian ini, banyak hambatan yang kami dapatkan. Walaupun demikian, berkat kerja sama dari berbagai pihak kesulitan itu dapat kami atasi. Untuk itu, kami sampaikan terima kasih kepada:

1) Plh. Kepala Balai Bahasa Denpasar, Drs. Ida Bagus Darmasuta atas pengarahan yang diberikan kepada kami.
2) Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sasta Indonesia dan Daerah Bali, Drs. I Nengah Sukayana, M.Hum. yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan penelitian ini.
3) Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Upaya maksimal telah kami lakukan demi kesempurnaan penelitian ini. Namun, penelitian ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Berkenaan dengan hal tersebut, segala kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini.

Denpasar, 1999 Tim Peneliti

# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar** . . . . . iii
**Ucapan Terima Kasih** . . . . . v
**Daftar Isi** . . . . . vi

**Bab I Pendahuluan** . . . . . 1
1.1 Latar Belakang . . . . . 1
1.2 Masalah . . . . . 3
1.3 Tujuan/Hasil yang Diharapkan . . . . . 3
1.3.1 Tujuan Penelitian . . . . . 3
1.3.2 Hasil yang Diharapkan . . . . . 4
1.4 Kerangka Teori . . . . . 4
1.5 Metode dan Teknik Penelitian . . . . . 11
1.6 Sumber Data . . . . . 11

**Bab II Latar Belakang Penciptaan Novel *Sukreni Gadis Bali*** . . 12

**Bab III Struktur Novel *Sukreni Gadis Bali*** . . . . . 16
3.1 Sinopsis . . . . . 16
3.2 Plot (Alur) . . . . . 18
3.3 Penokohan atau Perwatakan . . . . . 28
3.4 Latar . . . . . 46
3.4.1 Latar Tempat . . . . . 46
3.4.2 Latar Waktu . . . . . 47
3.4.3 Latar Sosial . . . . . 49

**Bab IV Gaya Bahasa dalam Novel *Sukreni Gadis Bali*** . . . . . 55

**Bab V Warna Lokal Bali dalam Novel *Sukreni Gadis Bali*** . . . 60
5.1 Kondisi Keagamaan . . . . . 60
5.2 Kondisi Politik . . . . . 70
5.3 Kondisi Perekonomian . . . . . 76
5.4 Lembaga Masyarakat Bali . . . . . 83
5.5 Sistem Pelapisan Masyarakat Bali (Struktur Kelompok Sosial) 94

**Bab VI Simpulan** . . . . . 105
**Daftar Pustaka** . . . . . 109

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

A.A. Pandji Tisna (Anak Agung Pandji Tisna) adalah salah seorang pengarang Bali yang cukup dikenal di tingkat nasional. Ia telah banyak menciptakan karya berupa novel (roman), di antaranya yaitu *Ni Rawit Ceti Penjual Orang* (1935), *Sukreni Gadis Bali* (1936), *I Swasta Setahun di Bedahulu* (1937), *Dewi Karuna* (1939), dan *I Made Widiadi Kembali kepada Tuhan* (1955). Novel *Sukreni Gadis Bali* (seterusnya disingkat SGB) yang digunakan sebagai objek penelitian ini banyak mengandung unsur-unsur budaya daerah (Bali) yang tercermin di dalamnya. Unsur-unsur budaya lokal itu diangkat ke permukaan agar dapat dipahami oleh masyarakat. Pengertian warna lokal Bali dalam penelitian novel *SGB* itu ialah ciri-ciri kultural yang digunakan oleh pengarang pada novel tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam novel *SGB* tercermin ide luhur pengarang terutama yang mengacu pada adat-istiadat budaya Bali seperti upacara *ngaben* (upacara pembakaran mayat), hukum tentang waris, kepercayaan terhadap takdir Tuhan, cinta kasih sejati antara dua pasang remaja, kepercayaan tentang adanya *karmaphala*, toleransi terhadap antarsesama agama, dan klasifikasi masyarakat Bali (*catur-wangsa*). Masing-masing budaya lokal itu akan dibicarakan pada penelitian ini. Unsur-unsur budaya lokal yang terkandung dalam novel *SGB* merupakan salah satu daya tarik untuk disimak. Itulah sebabnya penelitian ini menekankan unsur lokal yang terdapat pada novel *SGB*.

Warna lokal Bali seperti disebutkan di atas dominan muncul dalam novel *SGB*. Hal itu disebabkan latar kisah cerita *SGB* sepenuhnya

mengambil lokasi di daerah Bali (Karangasem, Singaraja (Buleleng), dan sekitarnya). Salah satu unsur budaya lokal yang mengacu kepada cinta kasih sejati antardua pasang remaja merupakan tema cerita *SGB*. Tema cerita itu dikembangkan melalui tokoh seorang remaja putri bernama Sukreni dan seorang pemuda bernama Ida Gde Swamba. Melalui keteladanan dua tokoh remaja itulah tercermin amanat pengarang dalam novel *SGB*. Demikian pula halnya dengan nama-nama tokoh yang terlibat dalam cerita mewakili klasifikasi masyarakat Bali yang disebut dengan *catur wangsa* (catur warna) yang terdiri dari: brahmana, ksatria, wesia, dan sudra. Terlihatnya unsur *catur wangsa* dalam masyarakat Bali pada cerita *SGB* merupakan salah satu daya pikat untuk diteliti.

Apabila dibandingkan dengan novel Pandji Tisna yang lain, novel *Sukreni Gadis Bali* memiliki ciri yang khas dalam aspek tokoh utama. Kekhasan itu menurut Weda Kusuma (1990:2) adalah Pandji Tisna cenderung menggunakan tokoh utama dari karyanya sebagai judul cerita, seperti: Tokoh Ni Rawit dalam novel *Ni Rawit Ceti Penjual Orang,* tokoh I Swasta dalam novel *I Swasta Setahun di Bedahulu,* tokoh I Made Widiati dalam novel *I Made Widiadi Kembali kepada Tuhan.* Akan tetapi, dalam novel *SGB* bukan tokoh Sukreni yang menjadi tokoh utama melainkan tokoh Men Negara. Tokoh Sukreni baru muncul pada pertengahan cerita sehingga penampilannya tidak dominan seperti tokoh Men Negara.

Novel *SGB* sangat digemari oleh masyarakat karena novel itu pernah difilmkan pada tahun 1955 atas biaya Pandji Tisna sendiri. Hal itu disebabkan novel *SGB* memiliki pesan moral yang tinggi. Ide luhur pengarang itu dikembangkan melalui peristiwa yang dialami oleh tokoh Sukreni dan Ida Gde Swamba yang dipertentangkan secara tajam dengan tokoh Men Negara. Pertentangan antartokoh itulah pesan ide pokok pengarang dijabarkan melalui teknik dialog (dramatik dan analitik).

Di pihak lain, A. Teeuw (1957:168) mengatakan bahwa novel *SGB* hampir serupa dengan novel *Ni Rawit Ceti Penjual Orang* dalam isi maupun susunannya. Dikatakan lebih lanjut bahwa dalam novel *SGB* tercermin suasana Bali yang menarik terutama tentang adanya kepercayaan bahwa tidak seorang pun manusia dapat menghindarkan diri dari *karmanya*. Demikian pula, Ajip Rosidi (1969:57) menyoroti bahwa

dalam novel SGB tercermin kehidupan masyarakat Bali tentang unsur kekerasan dan kekejaman. Hal itu ditunjukkan dengan adanya seorang ibu yang hanya mengutamakan kepentingan materi kemudian secara tidak sadar menjual anak gadisnya sendiri. Pandji Tisna memang memiliki cita-cita mengkritik dengan mengadakan perubahan terhadap kehidupan masyarakat Bali pada zaman itu yang masih terbelakang. Selanjutnya, Jakob Sumardjo (1980:7) menyoroti tentang warna daerah dalam novel *SGB* yang menyatu dengan permasalahan yang digarapnya. *Setting* Bali digunakan secara integral dengan tema sehingga secara sosiologis amat menarik karena memberikan gambaran kehidupan masyarakat Bali pada tahun tiga puluhan.

Memperhatikan pembicaraan para kritikus di atas, ternyata penelitian yang khusus membicarakan aspek warna lokal Bali dalam novel *SGB* belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mengungkap unsur-unsur budaya lokal Bali seperti telah disebutkan di atas. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi sastra daerah (Bali), dan sekaligus dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan sastra nasional.

## 1.2 Masalah

Penelitian terhadap novel *SGB* ini dilakukan terutama untuk mengetahui unsur-unsur budaya lokal Bali melalui analisis intrinsiknya. Adapun permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut.

a) Bagaimana struktur *SGB?*
b) Unsur-unsur warna (budaya) lokal Bali apa saja yang tercermin dalam *SGB?*
c) Bagaimana fungsi budaya lokal Bali itu dalam kehidupan masyarakat Bali sehari-hari?

## 1.3 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara khusus, tujuan pokok penelitian ini adalah mengungkap (memahami) dengan rinci unsur budaya lokal Bali yang tercermin dalam novel *SGB* melalui pendekatan struktur intrinsiknya. Usaha itu dilakukan dengan maksud agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami makna

karya sastra novel *SGB* dari segi ilmu sastra.

Secara umum, penelitian ini bertujuan (1) untuk melestarikan, membina, dan mengembangkan kebudayaan daerah (Bali), (2) untuk memahami latar belakang kehidupan masyarakat Bali pada masa novel *SGB* itu diterbitkan, (3) memperkenalkan novel *SGB* sebagai karya sastra Bali di tingkat nasional, dan (4) ikut memperkaya khazanah penelitian sastra daerah yang saat ini telah mulai berkembang.

### 1.3.2 Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini berusaha mengungkap budaya lokal Bali yang tercermin dalam novel *SGB*. Unsur budaya Bali itu diungkap melalui kajian struktur karya sastra. Hal itu disebabkan aspek budaya Bali seperti: aspek agama, aspek politik, aspek ekonomi, lembaga masyarakat, dan kelompok sosial masyarakat, tercermin dalam novel *SGB*.

## 1.4 Kerangka Teori

Dalam ilmu sastra dikenal dua macam pendekatan yakni pendekatan intrinsik dan ekstrinsik (Wellek dan Waren dalam Damono, 1993:6). Pendekatan intrinsik dilakukan dengan cara memisahkan karya sastra itu dari lingkungannya seperti penerbit, pembaca, dan penulis. Dengan demikian, pendekatan intrinsik menganggap bahwa karya sastra memiliki otonomi. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan struktural (teori mikro sastra). Sebaliknya, pendekatan ekstrinsik ditujukan untuk mengungkap hubungan antara karya sastra dan lingkungannya yakni antara lain; pengarang, pembaca, dan penerbit. Pendekatan ekstrinsik menganggap bahwa karya sastra tidak dapat dipahami secara lengkap jika dilepaskan begitu saja dari lingkungannya. Pendekatan ini sering disebut dengan teori makro sastra (Tanaka dalam Damono, 1993:6).

Seperti dikatakan di atas, pendekatan intrinsik menganggap karya sastra memiliki otonomi. Hal itu disebabkan karya sastra itu sendiri merupakan sebuah struktur yang otonom. Sebagai struktur yang otonom, karya sastra dapat dipahami secara utuh dan bulat dengan unsur-unsur pembangunanya yang saling berjalin (Pradopo *et al.*, 1985:6). Dengan demikian, untuk memahami karya sastra yang bersifat otonom, struktur karya sastra harus dikaji lepas dari niat pengarang, dan lepas dari efek

pembaca (Beardsly dalam Teeuw, 1983:60).

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep otonomi sastra dianggap lemah karena cenderung meniadakan unsur penting lainnya, seperti (a) analisis struktur sastra belum tepat dan lengkap, (b) meniadakan unsur latar belakang sejarah, (c) mengabaikan peranan pembaca, dan (d) menghilangkan relevansi sosialnya (Teeuw, 1984:139–140). Untuk mengatasi kelemahan itu, di pihak lain Teeuw (1984:190) mengatakan (menyarankan) hendaknya menggunakan teori struktural model semiotik ala Mukarovsky yang disebut dengan struktural dinamis (*dynamic struckturalism*). Struktural semiotik (dinamis) yang dikembangkan oleh Mukasrovsky itu mencakup empat faktor, yaitu pencipta, karya, pembaca, dan kenyataan.

Berkaitan dengan realitas dalam karya sastra tersebut, Mukarovsky mempertimbangkan adanya konteks sosial, konvensi budaya, dan kerangka kesejarahan, yang mendasari karya sastra itu (Teuw, 1984:90). Pernyataan Mukarovsky itu dipertegas oleh Sukada (1987:58) yang menyatakan bahwa analisis model semiotik dirumuskan, antara lain (1) menjelaskan kaitan antara pengarang, realitas, karya sastra, dan pembaca; (2) menjelaskan karya sastra sebagai sebuah struktur berdasarkan unsur-unsur atau elemen yang membentuknya. Dengan demikian, analisis struktural semiotik yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dikatakan memberikan makna terhadap struktur karya sastra novel *SGB*, seperti alur (plot), penokohan (perwatakan), latar, dan konvensi budaya Bali yang tercermin di dalamnya.

Pemberian makna pada masing-masing unsur (struktur) pada karya sastra tersebut pada hakikatnya memerlukan interpretasi. Hal itu disebabkan, menurut Zaimar (1991:9), interpretasi dalam sebuah karya sastra termasuk lingkup makna wacana yang menjadi bagian tugas bidang semiotik. Demikian pula, Culler (dalam Sukada, 1987:53) berpendapat bahwa semiologi (semiotik) dalam pendekatannya terhadap karya sastra memiliki ragam pemaknaan dan komunikasi. Dengan adanya ragam penafsiran makna dan komunikasi itu Culler berkesimpulan bahwa strukturalisme tidak berbeda dengan semiologi. Bahkan, keduanya tidak bisa dipisahkan karena merupakan dua hal yang identik.

Memperhatikan hal tersebut di atas, jelas tidak dapat dipungkiri kehadiran (kebutuhan) interpretasi di dalam memahami karya sastra. Hal itu disebabkan karya sastra merupakan suatu simbol atau tanda. Untuk memahami simbol atau tanda itu diperlukan kajian semiotik. Sesuai dengan pengertian dan sasaran kajian semiotik itu Zaimar (1991:20) berpendapat bahwa kajian semiotik itu adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda: bahasa, kode, sistem sinyal, dan lain-lain. Dengan demikian, Zaimar lebih tegas mengatakan bahwa strukturalisme memiliki hubungan yang erat dengan semiotik, bahkan kaum strukturalis pada umumnya ahli semiotik.

Sesuai dengan kajian semiotik yang menekankan pada simbol (tanda), kode, bahasa dalam teks sastra, Jakobson (dalam Effendi, 1996: 8) berpendapat bahwa bahasa dalam karya sastra mempunyai kedudukan yang khas. Kekhasannya itu karena memiliki fungsi puitik, berbeda dengan bahasa dalam komunikasi sehari-hari yang berfungsi praktis atau pragmatis. Sehubungan dengan tanda bahasa dalam teks sastra yang memiliki fungsi puitik itulah dalam rangka pemahamannya diperlukan ilmu tanda (semiotik). Oleh karena itu, kajian semiotik dalam penelitian ini adalah memahami (memberi makna) pada bagian (unsur) struktur novel *SGB*. Masing-masing unsur itu adalah: alur, tokoh (perwatakan), latar, dan unsur-unsur budaya lokal Bali tercermin dalam novel *SGB*. Pengertian masing-masing unsur tersebut diuraikan di bawah ini.

Plot (alur) dapat diartikan sebagai urutan atau kesinambungan peristiwa atau insiden berdasarkan sebab-akibat yang logis (Forster, 1979:72). Peristiwa-peristiwa dalam cerita menurut Culler (1977:20) disebut dengan "motif'. Selanjutnya, susunan motif-motif itu disebut dengan "plot". Motif yang lebih dahulu muncul merupakan sebab munculnya motif kemudian. Terkait dengan kesinambungan peristiwa itu, Tarigan (1984:126) mengatakan bahwa cerita hendaknya dapat bergerak dari suatu permulaan *(begining)* melalui suatu pertengahan *(middle)* menuju akhir *(ending)*. Proses itu di dalam dunia drama lebih dikenal dengan nama eksposisi, komplikasi, dan resolusi *(denoument)*.

Perkembangan struktur alur tersebut di atas sejalan dengan pendapat Gustave Freytag (Panuti Sudjiman, 1991:41) yang mengatakan bahwa pertumbuhan alur hendaknya harus ada unsur: (a) pengantar

*(introduction)*, (b) rangsangan *(inciting moment)*, (c) gawatan *(rising action)*, (d) klimaks *(climax)*, (e) leraian *(falling action)*, dan (f) selesaian *(catastrophe)*. Pendapat Freytag itu tidak jauh berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh S. Tasrif (dalam M. Lubis, 1960:16) bahwa bagian plot terdiri dari:

1) *Situation* (pengarang mulai melukiskan/memaparkan suatu keadaan);
2) *Generating Circumstances* (peristiwa yang bersangkutan mulai bergerak);
3) *Rising Action* (peristiwa-peristiwa mulai memuncak);
4) *Climax* (peristiwa-peristiwa mencapai klimaks); dan
5) *Denoument* (pengarang memberikan pemecahan soal dan peristiwa).

Pendapat Freytag dan Tasrif di atas dapat divisualisasikan seperti gambar berikut.

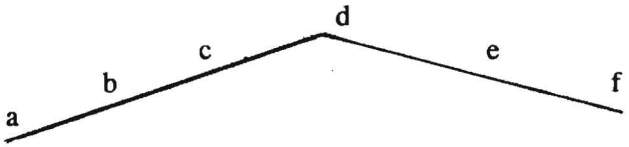


Keterangan:
a. pengantar *(introduction)*
b. rangsangan (*inciting moment*)
c. gawatan (*rising action*)
d. klimaks *(climax)*
e. leraian *(falling action)*
f. selesaian (catastrophe).

Dalam cerita, ada perwatakan yang dilukiskan sebagai tokoh utama, tokoh kedua (sekunder), dan tokoh pelengkap (komplementer). Berdasarkan fungsinya, tokoh dalam cerita dapat dibedakan yaitu tokoh

sentral dan tokoh bawahan. Tokoh yang memegang peranan penting disebut dengan tokoh utama. Menurut Sudjiman (1992:19) yang menjadi penentang utama dari protagonis disebut antagonis atau tokoh lawan. Kriteria penentuan tokoh utama (*ibid.* hlm. 18) bergantung pada intensitas keterlibatan tokoh di dalam peristiwa-peristiwa yang membangun cerita.

Pada umumnya, Forster (1970:85) dan Abrams (1981:20) berpendapat bahwa jenis perwatakan ada dua macam: (1) perwatakan "datar" yaitu watak tokoh dilukiskan hanya satu sudut, selamanya buruk-buruk saja dan (2) perwatakan "bulat" pelukisan tokoh secara kompleks dari berbagai dimensi. Pelukisan watak itu terkait erat dengan penokohan cerita. Penokohan itu dimaksudkan adalah usaha pengarang menampilkan (mengembangkan) tokoh atau pelaku melalui pemberian nama, ciri fisik, sifat watak, dan keadaan lingkungan (sosial) tokoh. Tokoh itu ditampilkan oleh pengarang melalui cara (metode) analitik dan dramatik (Parwatha, 1995:65).

Watak dalam penokohan perlu digambarkan ciri-ciri lahir sikap atau sifat batinnya agar wataknya itu dikenal oleh pembaca. Cara menggambarkan perwatakan seorang tokoh menurut Wellek dan Warren (1962:219) ialah dengan memberikan sebuah nama. Setiap penamaan pada umumnya adalah untuk menghidupkan, menjiwai, dan mengindividualisasikan.

Penjelasan karakter seorang tokoh yang agak terperinci diberikan oleh M. Saleh Saad. Pokok-pokok pikirannya itu adalah seperti di bawah ini.

1. Cara analitik: pengarang dengan kisahnya dapat menjelaskan karakterisasi seorang tokoh;
2. Cara dramatik: menggambarkan apa dan siapa tokoh itu tidak secara langsung tetapi melalui hal-hal lain;
3. (a) menggambarkan tempat atau lingkungan sang tokoh,
   (b) cakapan (percakapan) antara tokoh dengan tokoh lain, atau percakapan tokoh-tokoh lain tentang dia,
   (c) pikiran sang tokoh atau pendapat tokoh-tokoh lain tentang dia,
   (d) perbuatan sang tokoh.
4. Cara analitik yang panjang ditutup dengan dua tiga kalimat cara

dramatik, dan cara dramatik yang panjang ditutup dengan dua tiga cara analitik (Lukman Ali, ed. 1967:123).

Latar *(setting)* adalah lukisan situasi atau tempat di sekitar peristiwa. Latar dapat berfungsi untuk memberikan warna atau corak tempat terjadinya peristiwa, juga dapat memberi corak watak tokoh-tokoh dalam cerita. Terkait dengan pengertian tersebut, Robert Stanton (1965:18–19) menjelaskan bahwa latar itu antara lain: (a) tempat terjadinya peristiwa, (b) waktu terjadinya peristiwa, (c) benda dan alat-alat yang berhubungan dengan tempat terjadinya peristiwa, dan (d) sistem kehidupan dan sistem pekerjaan yang berhubungan dengan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.

Pengertian tentang latar secara lebih rinci diberikan oleh Djoko Pradopo (Imran T. Abdullah *et al.*, 1980:57) sebagai berikut.

a) Tempat, baik tempat di luar atau di dalam rumah yang melindungi pelaku;
b) Lingkungan kehidupan;
c) Sistem kehidupan;
d) Alat-alat atau benda yang berhubungan dengan kehidupan atau lingkungan hidup; dan
e) Waktu terjadinya peristiwa, dapat berupa bagian hari, tahun, atau juga periode sejarah.

Menurut Hudson (1960:158) latar merupakan keseluruhan lingkungan cerita, termasuk adat-istiadat, kebiasaan, pandangan hidup tokoh, sedangkan Abrams (1979:157) mengatakan bahwa latar adalah tempat terjadinya suatu peristiwa dan waktu berlangsungnya suatu tindakan. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa latar itu adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra (Sudjiman, 1992:44).

Pendapat tentang latar yang dikemukakan di atas akan dapat memberikan informasi tentang situasi (ruang dan tempat) di mana peristiwa itu terjadi. Demikian pula, latar dapat berfungsi sebagai proyeksi keadaan batin para tokoh (Sudjiman, 1992:46). Latar tidak pernah berdiri sendiri

karena merupakan bagian atau unsur dari suatu keutuhan yang harus dipahami di dalam hubungannya dengan unsur lain. Misalnya, latar akan dapat mendukung penokohan untuk menghendaki latar tertentu pula.

Analisis struktur novel *SGB* yang meliputi unsur alur (plot), penokohan (perwatakan), dan unsur latar, dimaksudkan sebagai jalan untuk mengetahui latar belakang unsur budaya lokal Bali yang tercermin di dalamnya. Unsur budaya Bali itu terutama yang berhubungan dengan unsur-unsur: lembaga masyarakat Bali, sistem pelapisan masyarakat, kondisi keagamaan, kondisi politik, maupun kondisi perekonomian (pertanian). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa analisis struktur pada *SGB* merupakan suatu jalan untuk mengeksplisitkan latar belakang warna lokal Bali yang dijadikan sebagai tekanan analisis.

Warna lokal Bali dalam novel *SGB* terkait erat dengan latar budaya masyarakat Bali yang tercermin pada novel bersangkutan. Hal tersebut terkait erat dengan pendapat Koentjaraningrat (1982:11--12) dan 32--33) yang mengatakan bahwa konsep budaya merupakan totalitas pikiran, karsa, dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya. Dengan demikian, konsep budaya hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Berdasarkan kenyataan itu, konsep budaya diuraikan ke dalam unsur-unsurnya yakni meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, teknologi, dan peralatan. Pengertian tersebut identik dengan pendapat Abrams (1981:98) yang mengatakan bahwa warna lokal adalah lukisan mengenai latar, adat-istiadat, cara berpakaian, dan cara berpikir yang khas dari suatu daerah tertentu.

Pendapat Koentjaraningrat dan Abrams tersebut di atas digunakan untuk mendekati warna lokal Bali dalam novel *SGB* melalui analisis strukturnya. Prinsip struktural itu akan memperoleh makna akhir cerita sastra yang dianalisis. Hal itu disebabkan makna akhir sebuah struktur, baru berarti sepenuhnya jika anasir (unsur) yang satu sudah berintegrasi dengan unsur lainnya (Hawkes, 1978:18).

### 1.5 Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian ini berusaha memahami unsur (warna) budaya lokal Bali yang tercermin dalam novel *SGB*. Unsur budaya lokal Bali itu perlu diuraikan



PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

melalui metode analisis. Metode analisis yang diterapkan dalam novel *SGB* yakni menganalisis unsur budaya lokal yang melatarbelakangi terciptanya novel itu melalui unsur intrinsiknya (alur, penokohan, latar). Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik metode itu didukung oleh cara penalaran metode induktif dan deduktif. Cara penalaran induktif adalah cara pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta khusus ke hal yang bersifat umum. Demikian pula sebaliknya, penalaran secara deduktif berangkat dari pernyataan atau fakta yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus (Sudjiman, 1992:7).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka dari hasil-hasil penelitian yang telah ada. Pencatatan pustaka dilakukan dengan sistem kartu. Bagian buku-buku acuan yang dicatat meliputi: judul buku, isi buku, nama pengarang, halaman, dan penerbit. Setelah data terkumpul, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan masalahnya yang muncul. Selanjutnya, diolah berdasarkan teori yang digunakan.

### 1.6 Sumber Data

Sumber data utama penelitian ini adalah novel *Sukreni Gadis Bali (SGB)* terbitan Balai Pustaka tahun 1965. Sebagai data utama, *SGB* yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini didekati dengan berbagai sumber studi pustaka. Dengan kata lain, pendekatan terhadap novel tersebut diperlukan informasi tambahan dari berbagai sumber pustaka baik dari sudut pembaca, maupun dari para kritikus sastra. Semua informasi tentang pembicaraan pendekatan novel itu sangat diperlukan dalam rangka menunjang pembuktian analisis. Oleh karena penelitian ini menggunakan teks sebagai objek kajian, teks itu akan dicuplik sebagai contoh dalam penyajian analisis. Cuplikan teks *SGB* disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.

# BAB II
# LATAR BELAKANG PENCIPTAAN NOVEL *SUKRENI GADIS BALI*

Latar belakang penciptaan sebuah karya sastra tidak dapat dilepaskan begitu saja dari riwayat hidup (biografi) pengarangnya karena karya sastra merupakan ekspresi atau pantulan peristiwa-peristiwa dalam batin seorang pengarang yang merespon kehidupan masyarakat. Memang dalam masalah ini sering terjadi polemik tentang keberadaan pengarang di belakang karyanya. Banyak peneliti berpendapat bahwa tidak akan ada sastra tanpa pengarang. Hal itu menunjukkan bahwa segi realitas pengarang mempunyai peranan untuk mencari konteks dalam karya sastra sebagai salah satu cara meningkatkan pemahaman terhadap karya sastra tersebut dalam menganalisisnya. Lepas dari yang tidak setuju mengenai peranan pengarang dalam menganalisis karya sastra maka dalam penelitian ini dipandang perlu diutarakan latar belakang penciptaan novel *Sukreni Gadis Bali* yang berkaitan erat dengan pengalaman-pengalaman Pandji Tisna.

Dalam skripsi Sarjana Made Sukada di Fakultas Sastra Universitas Udayana telah diungkapkan secara rinci riwayat hidup (biografi) Pandji Tisna tentang asal-usul, keluarga, kehidupan dan penghidupannya, pendidikan, serta proses perpindahan agamanya. Namun demikian, dalam penelitian ini hanya sedikit diungkapkan biografinya yang berkaitan dengan latar belakang penciptaan novel *Sukreni Gadis Bali* tersebut.

Banyak buku kesusastraan Indonesia melukiskan riwayat hidup (biografi) pengarang Pandji Tisna dengan isi yang hampir sama. Di mulai dari tempat dan tanggal lahirnya, pendidikannya, jabatan orang tuanya, dan judul-judul karya sastranya. Semua itu mungkin bersumber dari buku *Pokok dan Tokoh Kesusastraan Indonesia Baru I Karya A. Teeuw*. Nama

lengkap Panji Tisna adalah Anak Agung Nyoman Pandji Tisna, dilahirkan di Singaraja tanggal 11 Februari 1908. Semula ia beragama Hindu, tetapi sejak tahun 1946 memeluk agama Kristen Protestan. Pendidikan HIS *(Holanders Inlandsche School)* pada tahun 1922 di Singaraja, dan MULO *(Merr Uitgebreid Lager Onderwijs)* pada tahun 1926 di Jakarta. Minat untuk terjun dalam dunia karang-mengarang sudah dirasakan sejak kecil pada waktu masih duduk di sekolah rendah. Ketika di MULO, barulah dicobanya menulis puisi sesuai dengan pertumbuhan jiwa romantisnya. Tidak ada satu pun yang dirasa baik untuk dimuat dalam suatu media massa. Bakat yang dimiliki Pandji Tisna merupakan warisan biologis dari orang tuanya yang sangat menyukai dan mencintai kesenian, khususnya kakawin dan *mebasan*. Orang tuanya mewariskan kepadanya perpustakaan lontar yang sangat banyak, baik mengenai jumlah maupun nilainya bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Orang tuanya juga menjadi wakil ketua yayasan lontar *Kirtya Leifrincik van der Tuuk* yang didirikan pada tahun 1928. Jabatan itu digantikan Pandji Tisna setelah orang tuanya meninggal. Selain faktor biologis, tentu masih ada faktor-faktor lain yang tidak mungkin dilepaskan dari kehidupannya sebagai manusia, seperti keadaan alam sekitarnya, warisan sosial, dan kelompok manusia. Keempat faktor itulah yang menumbuhkan bakat alam Pandji Tisna sebagai pengarang. Pada usia yang ke-24 dorongan untuk menulis itu semakin kuat. Dia ingin mengatakan sesuatu tentang masyarakat dan zamannya. Dibacanya karya-karya sastra Rabindranath Tagore dan Chales Dicken untuk menenangkan pikiran dan perasaannya. Namun, semua itu tidak mengurangi kebencian melihat keadaan masyarakat yang menderita akibat penjajahan. Setelah berada di alam yang tenang di Serayanadai (Karangasem) mulailah ia menulis. Sebenarnya Pandji Tisna tidak demikian yakin akan novel atau sejenisnya kalau tidak realistis tendensius, semuanya tidak akan berguna bagi masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa waktu menulis novel pertama *Ni Rawit Ceti Penjual Orang,* dia diilhami oleh sejarah Bali sebelum masuknya Belanda. Pada saat itu suasana Bali sangat aman. Orang-orang Bali yang belum mengetahui keadaan luar Bali merasa puas akan lingkungan seperti itu. Dengan demikian, tidak terasa politik Belanda mencengkeram serta menduduki Bali tanpa susah payah.

Melihat kemampuannya menyatakan pikiran dan perasaan dalam bidang karang-mengarang, temannya R. Goris mendekatinya untuk meminta pertolongan membuat laporan mengenai pertengkaran antara orang-orang Bali yang baru masuk atau memeluk agama Kristen dengan yang beragama Hindu mengenai soal kuburan dan waris. Laporan itu tidak dibuatnya karena Pandji Tisna tidak menginginkan kejadian tersebut menjadi bahan bagi pihak Belanda untuk memecah belah suku bangsa Bali. Dari sinilah ia mendapat ilham untuk menulis novel *Sukreni Gadis Bali (SGB),* yang berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat Bali yang beragama Hindu mengenai hukum *karmaphala*. Karangan ini objektif karena ternyata kedua agama itu mengutamakan perdamaian. Lebih jauh Jakob Sumardjo (1987:7) mengatakan bahwa dasar penggerak cerita *Sukreni Gadis Bali* adalah hukum karma, meskipun dalam novel itu kata tersebut tidak pernah disebut pengarang. Itulah tema yang mendasari kejadian-kejadian dalam novel itu, dan itulah "warna daerah" yang menjiwai novel itu.

Hukum *karmaphala* diyakini mutlak berlaku pada setiap makhluk dipandang dari ajaran agama Hindu. Dasar kepercayaan itu berakar dalam hati masyarakat Bali yang menganut agama Hindu, yang dapat dilihat dalam seluruh aktivitas kehidupan masyarakatnya. Misalnya, kepercayaan kepada zat tertinggi (Sang Hyang Widhi/Tuhan) yang menentukan nasib manusia, kewajiban timbal-balik antara anak dengan orang tua dalam pengertian yang luas, serta kejahatan atau kelalaian pasti akan runtuh di dunia ini. Hukum itu bukanlah sekadar teori yang tercantum dalam ajaran agama Hindu, tetapi menjadi bagian dari sikap mental masyarakat Bali (I Gusti Ngurah Bagus, 1972:7). Oleh karena itulah, dalam berbagai bentuk kesenian Bali seperti wayang, topeng, *arja* dan *drama gong,* hukum itu mendapat tempat yang sangat baik sebagai media pendidikan masyarakat. Demikian juga, dalam kesusastraan yang menggunakan bahasa Indonesia, khususnya karya Pandji Tisna, hukum *karmaphala* itu jelas menjadi sentral manifestasi sikap mental tokoh-tokoh dalam novel *Sukreni Gadis Bali.*

Dengan demikian, tanpa memahami latar belakang penciptaan novel *Sukreni Gadis Bali* tersebut, mungkin timbul pandangan yang sempit mengenai hasil karya sastra Indonesia yang ditulis pengarang asal Bali

ini. Kenyataan itulah yang mendukung pendapat A. Teeuw yang menyarankan agar dalam penelitian sastra Indonesia hendaknya dikaitkan dengan latar belakang sosial budaya yang melahirkannya.

# BAB III
# STRUKTUR NOVEL *SUKRENI GADIS BALI*

Dalam bab ini akan diketengahkan struktur teks *Sukreni Gadis Bali,* terutama unsur-unsur yang berhubungan dengan konteks sosial budaya. Unsur-unsur yang dimaksud adalah plot, penokohan, perwatakan, latar, dan gaya bahasa. Sebelum unsur-unsur tersebut dibicarakan, terlebih dahulu akan diuraikan sinopsisnya.

## 3.1 Sinopsis

Di kota Singaraja, tepatnya di kota Binginbanjah tinggal seorang wanita yang bernama Men Negara. Men Negara berasal dari Karangasem. Men Negara datang ke Binginbanjah hanya dengan pakaian seadanya. Men Negara pergi ke Binginbanjah meninggalkan suaminya yang bernama Nyoman Raka. Perkawinan dengan I Nyoman Raka membuahkan seorang anak perempuan yang bernama Ni Widi. Karena itulah ia dijuluki Men Widi oleh orang di kampung itu. Men Negara pergi ke Singaraja ketika Ni Widi baru berumur delapan bulan.

Di Binginbanjah Men Negara kawin untuk kedua kalinya dengan seorang lelaki yang bernama I Kompiang. I Kompiang masih sepupu dengan suaminya yang pertama (Nyoman Raka). Ia sangat ulet dan rajin bekerja. Cita-cita Men Negara sangat besar. Perkawinan Men Negara yang kedua kalinya dengan I Kompiang membuahkan dua orang anak. Anak yang pertama bernama I Negara, sedangkan yang kedua bernama Ni Negari. Sesudah Ni Negari dewasa, timbul ide licik Men Negara, yaitu menggunakan Ni Negari sebagai penarik lelaki di warungnya. Pemikiran itulah yang tidak disetujui oleh I Negara, anak laki-laki Men Negara. Kecantikan Ni Negari membuat orang semakin banyak tertarik kepadanya, termasuk manteri polisi yang bernama I Gusti Made Tusan.

Warung Men Negara setiap hari semakin bertambah ramai berkat daya tarik dari kecantikan Ni Negari. Sebetulnya I Gusti Made Tusan sudah mempunyai anak dan istri. Kesempatan itulah yang digunakan oleh Men Negara untuk memeras semua gaji I Gusti Made Tusan. Warung itulah yang dijadikan tempat pertemuan bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Ni Negari.

Pada suatu hari warung Men Negara didatangi oleh seorang gadis yang bernama Luh Sukreni. Kedatangan Luh Sukreni beserta ayahnya I Nyoman Raka ke Binginbanjah (Buleleng) untuk mencari Ida Gde Suamba untuk membicarakan masalah warisan. Dua bulan kemudian Luh Sukreni dan I Sidiana datang ke Binginbanjah untuk memberitahu Ida Gde Suamba agar datang ke Manggis (Karangasem) karena ada upacara pembakaran mayat kakeknya. Namun, Ida Gde Suamba tidak berada di Buleleng, karena ia pergi ke Banyuwangi. Kesempatan itulah yang digunakan Men Negara untuk membujuk dan merayu Luh Sukreni untuk dijerumuskan karena Men Negara merasa iri hati melihat kecantikannya yang jauh lebih cantik dari Ni Negari. Men Negara sangat takut kalau nanti kecantikan Ni Negari dapat dikalahkan oleh kecantikan Luh Sukreni. Luh Sukreni dan I Sudiana berhasil dibujuk oleh Men Negara agar mau menginap di rumahnya. Kesempatan itulah yang sangat ditunggu-tunggu oleh Men Negara. Karena sebelum itu ia telah disuap oleh manteri polisi yang bernama I Gusti Made Tusan untuk membencanai Luh Sukreni. Akal busuk kedua orang itu akhirnya dapat menjerumuskan Luh Sukreni. Perbuatan manteri polisi itu diketahui oleh mata-matanya. Malam itu juga Luh Sukreni hilang dari rumah Men Negara. Luh Sukreni sangat malu karena dirinya telah ternoda. Ketika menjelang pagi I Sudiana mencari Men Negara dan menceritakan keadaan yang sebenarnya, bahwa Sukreni itu tiada lain adalah Ni Widi. Mendengar hal itu, Men Negara sangat menyesal karena yang dikhianati itu adalah anak kandungnya sendiri. I Made Aseman menuduh I Negara bersama ibunya menjerumuskan Sukreni. Akhirnya terjadilah pertengkaran, I Negara dipukulnya sampai pingsan, sehingga ia dihukum enam bulan di penjara.

Dari Banyuangi Ida Suamba langsung ke Surabaya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Chattee Jee dari India, yang akan

menghadiri upacara pembakaran mayat Anak Agung di Karangasem. Mereka tinggal sementara di hotel Singaraja. Di situlah Ida Gde Suamba bertemu dengan I Made Aseman yang sedang menjalankan hukuman. Aseman bercerita kepada Ida Gde Suamba tentang kejadian yang menimpa Luh Sukreni di desa Binginbanjah. Dengan perasaan bingung, Ida Gde Suamba mencari Luh Sukreni ke mana-mana, tetapi tidak dijumpainya. Akhirnya, Luh Sukreni ditemukan oleh Ida Gde Suamba di Banjar Bali, dan sudah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Gustam oleh Pan Gumirang. Tujuan pemberian nama itu supaya mudah diingat bahwa I Gustam itu adalah anak I Gusti Made Tusan di luar nikah.

Setelah berumur tujuh tahun I Gustam disekolahkan di Singaraja. Akan tetapi, baru beberapa bulan anak itu keluar dari sekolah karena tidak senang bersekolah. Ia lebih senang pergi ke Kampung Anyar untuk bermain-main dengan kawan-kawannya yang sebaya, seperti belajar menyabung ayam. Di tempat itu ia belajar berjudi. Nasib Luh Sukreni sangat buruk sekali karena tidak berhasil mendidik anak. Setelah I Gustam berumur sembilan belas tahun ia sudah berani memukul ibunya sampai pingsan. Ia sangat bejat malah sebagai pencuri yang sangat kasar. Ia dihukum penjara karena mencuri di sebuah toko milik orang Cina. Di penjara ia bertemu dengan I Sintung, seorang perampok yang biasa keluar masuk penjara. Kelakuannya semakin hari semakin rusak, kesenangannya berjudi semakin menjadi. Hancurlah hati Luh Sukreni, dan akhirnya ia meninggal karena menanggung sedih yang tiada berkeputusan. Setelah keluar dari penjara, I Gustam menjadi pemimpin perampok di daerah Buleleng. I Gustam datang ke warung Men Negara karena warung itu akan menjadi sasaran perampokan oleh teman-temannya. Mendengar kejadian itu I Gusti Made Tusan akhirnya turun tangan mengamankan warung Men Negara yang menjadi sasaran pencuri. Pertempuran tidak bisa dielakkan. I Gustam bersama I Gusti Made Tusan akhirnya saling bunuh. Men Negara menjadi gila karena semua kekayaannya habis terbakar.

### 3.2 Plot (Alur)

Pada awal cerita dilukiskan tentang keadaan Men Negara di Karangasem. Ia kawin dengan I Nyoman Raka. Setelah ia mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ni Widi (Ni Sukreni), ia meninggalkan suaminya, I Nyoman Raka, untuk mencari lelaki lain. Pada saat itu Ni Widi baru berusia delapan bulan. Hal itu tidak dijadikan masalah oleh Men Widi, karena suaminya (I Kompiang) adalah sepupu I Nyoman Raka. Hal itu dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.

> Men Negara berasal dari Karangasem, anak seorang kaya di negerinya. Ia datang ke Buleleng hanya dengan pakaian yang lekat pada badannya saja. Kata orang, ia lari dari rumah orang tuanya, meninggalkan lelakinya, karena menuruti laki-laki lain. Oleh karena laki-laki yang diturutinya itu berkeluarga juga dengan lakinya, tidaklah hal itu dijadikan perkara, tetapi dibiarkan atau didiamkan saja. Konon kabarnya Men Negara tujuh belas tahun dahulu bergelar Men Widi, karena ketika itu ia telah melahirkan anak perempuan yang bernama Ni Widi. Ketika ia melarikan diri dengan I Kompiang, anaknya itu baru berumur delapan bulan *(SGB.* hlm. 12).

Tahap berikutnya dimulai dengan pemaparan situasi warung Men Negara di desa Binginbanjah. Warung itu merupakan tempat bertemu dan berakhirnya tokoh-tokoh cerita seperti: I Gusti Made Tusan, Ida Gde Suamba, I Negara, Ni Negari, I Sudiana dan Ni Luh Sukreni. Situasi warung Men Negara yang sangat sederhana itu dilukiskan seperti kutipan berikut.

> Di pinggir jalan kecil yang berkelok-kelok, di antara kebun-kebun kelapa menuju ke Binginbanjah, desa yang belum dapat disebut desa benar, hanya sekumpulan rumah-rumah orang tani saja, ada sebuah kedai. Orang yang mula-mula datang ke situ tidaklah akan menyangka, bahwa rumah itu sebuah kedai, apalagi letaknya tidak di pinggir jalan benar, melainkan dalam pekarangan yang berpagar. *(SGB,*hlm. 9).

Keahlian Men Negara memanfaatkan kecantikan anaknya, Ni Negari, menyebabkan banyak anak muda dari luar desa datang ke warung. Demikian pula tukang panjat kelapa (buruh) milik Ida Gde Suamba yang jumlahnya kira-kira dua puluh lima orang, selalu berbelanja di warung itu. Situasi seperti itu digunakan oleh Men Negara untuk menjual minuman keras seperti *arak* (alkohol) dan *tuak* (nira). Ia pun menyembelih babi tanpa izin untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ketika Ida Gde Suamba menunggui pemetikan kelapa di kebunnya, kebetulan ia bertemu dengan I Gusti Made Tuan, manteri politi yang bertugas di wilayah itu. Saat itulah Men Negara tertangkap basah ketika menyembelih babi tanpa izin oleh I Made Aseman, sebagai mata-mata polisi itu. Waktu itu berat hukumannya apabila ada orang yang memotong babi tanpa izin. Hal itu dianggap melanggar aturan pemerintah. Namun, tidaklah demikian halnya dengan Men Negara dengan cerdik ia menyuruh anaknya, Ni Negari, untuk meredakan amarah manteri polisi itu. Oleh karena itu, hukum yang seharusnya menimpa dirinya tidak pernah kunjung tiba. Pernyataan itu dapat terungkap dalam kutipan berikut.

> "Tidak pernah aku melihat engkau di sini", kata I Gusti Made Tusan. Suaranya yang bengis tadi telah berubah bagai bara api menjadi abu, dapat dipakai jadi pupuk tanaman, "gerundung," kata Men Negara kepada orang yang duduk di bawah lumbung dengan bingungnya, "walaupun bagaimana juga ia harus melakukan kewajiban serta memperlihatkan kejujuran juga. Ia tidak terbuat daripada besi dan baja. Ia cuma manusia biasa juga sebagai kita".
>
> I Gerundung diam tidak menjawab dalam hatinya berharap kata-kata Men Negara itu mengandung kebenaran, dan supaya tak terjadi apa-apa karena kesalahan memotong babi tidak bersurat tadi itu. *(SGB,* hlm. 28--29).

Dari kutipan di atas, bukan saja latar tempat dan suasana yang dimunculkan, tetapi karakter Men Negara, I Gusti Made Tusan, dan Ni Negari pun ikut terangkat. Memang dalam tahap ini belum semua karakter tokoh-tokoh terungkap dengan tuntas karena pemunculan tokoh-

tokoh itu baru pada tahap pemaparan awal. Namun demikian, pemaparan dalam tahap awal tentang latar tempat, suasana, dan karakter tokoh-tokoh merupakan dasar yang sangat penting untuk menuju tahap *generating circumstances* yaitu peristiwa mulai bergerak.

Kejadian itu menyebabkan I Made Aseman mulai benci pada keluarga Men Negara. Namun sebaliknya, I Gusti Made Tusan kerap kali datang ke warung Men Negara di Binginbanjah untuk melepas lelah. Sudah beberapa kali I Made Aseman mempersilakan agar singgah di warung Pan Gara (iparnya sendiri), tetapi tidak pernah dihiraukan oleh manteri polisi itu. Atas perubahan itu, orang-orang seisi desa bersenang hati karena keamanan dan ketertiban lingkungan desa itu menjadi aman dan terjamin. Pada suatu hari I Made Aseman mengingatkan I Gusti Made Tusan tentang hukuman pemotongan babi yang dilakukan oleh Men Negara, tetapi selalu dibantah tidak pernah dihiraukan.

Tidak terhitung lagi berapa jumlah uang I Gusti Made Tusan terkuras habis di warung Men Negara karena kecerdikan dan kelihaian Ni Negari melayani. Ia salah sangka dikiranya Ni Negari tertarik padanya. Hal itu dilakukan oleh Ni Negari dengan pura-pura saja. Sebenarnya ia sudah bertunangan dengan I Ketut Rai, pemuda yang bekerja menjadi juru tulis di Jembrana. Ni Negari sangat tertarik pada Ida Gde Suamba, pemilik kebun kelapa di daerah itu, sehingga I Gusti Mada Tusan sering cemburu dengan gelagatnya Ni Negari. Hal itu terungkap dalam kutipan di bawah ini.

> I Gusti Made Tusan terlalu amat cemburuan, walaupun Ni Negari belum jadi istrinya, belum kepunyaannya, tetapi ia telah berlaku seolah-olah gadis itu sudah lebih dari istrinya atau gundiknya. Sebulan lebih I Gusti Made Tusan memikat hati gadis itu, terasa olehnya telah dapat dipengaruhinya. I Gusti Made Tusan yang cerdik itu dalam hal ini kalah bercatur dengan gadis itu. *(SGB*. hlm. 38).

> Ni Negari terlalu birahi akan Ida Gde, tetapi Ida Gde tidak tampak membalas cintanya. Ia tahu betapa kelakuan gadis itu, lagi pula barangkali Ida Gde belum hendak beristri. *(SGB,* hlm. 43).

Suatu hari datanglah Luh Sukreni ke warung Men Negara mencari Ida Gde Suamba. Semua orang terpaku dan heran melihat kecantikan gadis itu. Ia datang bersama ayahnya, I Nyoman Raka, tetapi tidak langsung datang ke warung Men Negara. Tujuannya datang ke sana hanya untuk menemui Ida Gde Suamba untuk menanyakan masalah warisan keluarga antara I Nyoman Raka (ayah Ni Sukreni) dengan adiknya, Petrus Sudana. Petrus Sudana menyatakan banding atas putusan Balai Kertha (pengadilan) yang memutuskan bahwa ia tidak berhak menerima warisan orang tuanya karena sudah beralih agama yaitu agama Kristen. Hal itu terlihat dalam kutipan berikut ini.

> "Benar, dari itu maka hamba datang kemari minta pertolongan," jawab Pan Luh atau I Nyoman Raka, dan dengan putusan baru-baru ini dia dikalahkan, tidak boleh menerima waris orang tua, bapak hamba, tetapi sekarang sudah dimasukkannya surat supaya putusan itu dibatalkan, sebab kekalahannya itu tidak benar, katanya," *(SGB.* hlm. 45).

Dua bulan kemudian, Luh Sukreni dan temannya datang ke warung Men Negara untuk memberitahu Ida Gde Suamba agar datang menghadiri upacara pengabenan kakeknya di Manggis (Karangasem). Ketika Ni Luh Sukreni datang, di suatu bilik, I Gusti Made Tusan dan Men Negara sedang menyelesaikan perhitungan mengenai Ni Negari, tetapi melihat kedatangan Luh Sukreni ke warung Men Negara mendadak niatnya berubah. Akhirnya, ia menyuruh Men Negara merayu Ni Luh Sukreni agar suka kepadanya. Kesempatan itu digunakan dengan baik oleh Men Negara untuk membujuk Ni Luh Sukreni agar bermalam di warung Men Negara sambil menunggu kedatangan Ida Gde Suamba, yang sedang pergi menengok keluarganya di Banyuangi.

Peristiwa selanjutnya mulai memuncak, *(rising action).* Untuk menutupi aib yang menimpa dirinya, Luh Sukreni mengganti namanya menjadi Ni Made Sari supaya sulit bagi orang-orang mengenalinya. Ia tidak akan pulang membawa malu ke kampungnya sendiri. Ia mencari nafkah di negeri orang agar tidak terlihat lagi oleh ayahnya dan teman-temannya. Ia mencari nafkah dengan menjadi pembantu di rumah seorang guru kepala sekolah sehingga merasakan betapa susahnya sebagai

pembantu rumah tangga. Kemelaratan yang dihadapinya semakin terasa.

Ida Gde Suamba sangat iba hatinya mendengar musibah yang dialami oleh kekasihnya (Ni Luh Sukreni). Ia sangat terpukul karena Ni Luh Sukreni akan dipersunting setelah selesai upacara pengabenan kakeknya. Hal itu diketahui oleh I Made Aseman ketika akan mengantarkan opas (suruhan) mantri polisi itu. Ia heran karena setiba di warung Men Negara ternyata warung tersebut sudah tutup walau hari belum begitu malam. Dibiarkan opas itu menunggu di tengah jalan. I Made Aseman masuk ke pekarangan rumah hendak menanyakan tuannya. Akan tetapi, setelah dekat ternyata terdengar suara yang keluar dari mulut yang tersumbat. Dengan menyelinap, ia dapat mendengar betapa ganas dan kejinya I Gusti Made Tusan memperkosa Luh Sukreni. Peristiwa itu dipakainya sebagai dalih untuk mengejek I Negara. I Negara marah dan terjadi perkelahian. I Made Aseman memukul I Negara hingga pingsan. Akibatnya, I Made Aseman dihukum penjara selama enam bulan. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini.

> ... "Sekalian hal itu dibangkit-bangkitkan oleh I Made Aseman di hadapan I Negara dengan ejekan, tentu saja I Negara marah, lalu terjadi perkelahian". I Made Aseman terhukum; dipenjarakan enam bulan lamanya karena salah memukul I Negara sampai pingsan. (*SGB*. hlm. 70).

Akibat perbuatan I Gusti Made Tusan, Luh Sukreni melahirkan seorang anak laki-laki di rumah Pan Gumirang, teman ayahnya di Banjar Bali, Singaraja.

Agaknya Ida Gde Suamba lama tinggal di Banyuwangi karena ia terus pergi ke Surabaya. Dalam perjalanan pulang (ke Bali), ia bertemu dengan Chatter Jee dari India yang akan pergi ke Karangasem untuk melihat upacara pembakaran mayat Anak Agung yang sangat ramai dan meriah. Chatter Jee adalah seorang ahli sejarah bangsa-bangsa yang dikirim ke Bali oleh media massa *Perkumpulan Seni Calcuta*. Mereka menginap di sebuah hotel di Singaraja. Di situlah terjadi pertemuan antara Ida Gde Suamba dengan I Made Aseman yang sedang menjalankan hukuman. I Made Aseman memberitahukan kepada Ida Gde Suamba tentang kejadian yang menimpa Luh Sukreni di desa Binginbanjah, serta

menunjukkan tempatnya di Banjar Bali Singaraja. Saat itu Luh Sukreni baru saja habis bersalin, seperti terungkap dalam kutipan di bawah ini.

> "Silakan duduk, ratu. Sebentar lagi hamba datang kembali, hamba sedang menyelesaikan surat-surat tanah hamba," kata Pan Gumirang. Ia pun masuk ke dalam rumah, sesudah Ida Gde duduk menghadapi tipuan. Beberapa lama, bukannya Pan Gumirang yang datang ke luar, melainkan Ni Luh Sukreni. I masih memakai *santeng* dan *bulan,* karena baru tiga hari terlepas daripada melahirkan anak. Ia bersimpuh dihadapan Ida Gde, sambil menangis dengan sedihnya. Tangis tak sepatah kata jua keluar dari mulutnya, tetapi Ida Gde maklum sudah bagaimana perasaan perempuan muda itu. Maka dipegangnya kepalanya seraya katanya, "Sudahlah Sukreni, jangan engkau menyesali diri. Aku tidak membedakan engkau sekarang dengan dahulu, karena hal itu bukan kemauanmu. *(SGB,* hlm. 83).

Sukreni bertambah hancur hatinya karena Ida Gde Suamba tidak marah dan jijik melihat keadaannya. Bahkan, tidak menyebut dan menanyakan orang yang telah menjerumuskannya. Dalam suasana seperti itu, Luh Sukreni akan senang hatinya apabila ia dimarahi dan dikutuk oleh Ida Gde Suamba yang dicintainya itu daripada dihiburnya. Ida Gde Suamba berjanji akan memberinya uang belanja setiap bulan agar Luh Sukreni dapat memelihara anaknya dengan sederhana.

Mendengar kabar dari Ida Gde Suamba secara pasti, baru orang tua Luh Sukreni sadar atas dugaannya yang keliru tentang kejadian yang menimpa anaknya. Akhirnya Luh Sukreni dipeliharanya dengan baik.

Anak Luh Sukreni diberi nama I Gustam oleh Pan Gumirang, dimaksudkan agar bagian nama Gusti itu selalu dapat diingat bahwa ia merupakan anak I Gusti Made Tusan di luar perkawinan. Gustam tidak betah bersekolah, tetapi berjudi kegemarannya. Pada waktu berumur dua belas tahun, ia sering menyabung ayam di Kampung Anyar Singaraja. Kemudian, setelah berumur sembilan belas tahun ia dihukum karena mencuri. Dalam penjara ia bergaul dengan orang-orang hukuman dan mendapat pelajaran tentang segala cara menjalankan kejahatan dari I Situng yang ahli dalam merampok. Menghadapi kenyataan seperti itu Luh

Sukreni pulang ke Manggis dan akhirnya meninggal, seperti terungkap dalam pernyataan di bawah ini

> Sementara I Gustam dalam penjara itu Ni Luh Sukreni pulang ke Manggis. Beberapa lamanya ia tinggal dengan bapaknya, ia pun meninggalkan dunia yang fana ini karena penyakit, disebabkan makan hati berulam jantung dengan tiada berkeputusan. *(SGB,* hlm.87).

Keluar dari penjara I Gustam menjadi kepala perampok. Ia dijuluki I Teguh atau Si Kebal karena kekuatan dan keberaniannya dalam melakukan tindakan kejahatan. Mereka merampok dan membunuh jika ada orang yang berani menentangnya. Seluruh penduduk di wilayah Buleleng, bahkan sampai ke Kembang Sari bagian Bali Selatan menjadi siaga siang dan malam menjaga harta bendanya. Jalan raya antara Temukus dan Singaraja tidak aman sedikit pun. Kenyataan itulah yang menyebabkan I Gusti Made Tusan, manteri polisi yang telah pindah ke Mayong, ditugaskan lagi ke daerah Binginbanjah. Warung Men Negara sudah diselidiki oleh anak buah I Gustam, yang direncanakan akan dirampok, seperti terungkap dalam pernyataan di bawah ini.

> "Besok kita mulai dengan kedai Men Negara itu, ya Suma, sebab aku dengar orang tua itu ada menaruh uang di bawah tempat tidurnya," kata I Gustam.
> "Dari siapa engkau dengar?" tanya kawannya sambil mendekati dia.
> "Benar aku dengar dari I Gerana. Ia kusuruh memata-matai hal itu ke sana," jawab I Gustam. *(SGB,* hlm. 89).

Malam harinya I Gustam bersama sepuluh orang kawannya merampok warung Men Negara. Saat itu I Gusti Made Tusan dan anak buahnya sedang meronda daerah itu. Selanjutnya terjadilah klimaks, ketika pertempuran tidak dapat dielakkan. Warung beserta rumah Men Negara dibakar oleh perampok itu dan peristiwa saling bunuh terjadi antara perampok dengan polisi. Pernyataan itu terungkap dalam kutipan di bawah:

Halaman rumah yang gelap tadi itu terang-benderang, karena api yang besar itu. Ketiga rumah itu sudah menyala-nyala, menerangi kebun kelapa sampai ke daun-daunnya. Dalam pada itu suara orang berteriak-teriak dan tong-tong yang dipalu orang amat gegapgempita bunyinya. Di sebelah timur rumah itu orang berkelahi dengan hebat, tinju-meninju, dorong-mendorong serta kadang-kadang bunyi bedilpun terdengar. "Mati engkau," seru I Gusti Made Tusan, serta mendorong seorang penjahat yang mendekati dia. Orang itu pun ditembaknya dengan pistolnya, kena kepalanya, lalu rebah ke tanah. Sebentar kemudian terdengar sorak I Teguh memalu seorang polisi yang hendak menyerang dia dengan kelewang, polisi itu terpelanting lalu jatuh. Seorang lagi mendekati dia lalu menyerang dengan keras, tetapi I Teguh menjatuhkan diri, sambil memalu kaki polisi. Polisi itu pun rebah, hendak ditikamnya. Tiba-tiba ia ditembak oleh menteri polisi, kena kupingnya yang sebelah kanan; darah bercucuran ke mulutnya yang bengis itu. Demi dirasainya darahnya sendiri. I Gustam itu pun melompat kepada menteri polisi itu. Tetapi I Gusti Made Tusan sudah jauh mengejar seorang penjahat yang masuk ke dalam semak. Orang itu tidak luput bidikannya, lalu jatuh dengan tidak bernyawa lagi di bawah pohon pinang. *(SGB,* hlm. 93--95).

I Made Aseman yang sudah lama berhenti jadi mata-mata, datang ke tempat itu. Tampak olehnya beberapa orang membawa Men Negara yang luka parah. I Negara tidak ingat akan dirinya. Ni Negari berdiri kebingungan, anaknya menangis berteriak-teriak di bawah pohon jeruk. Begitu melihat I Gustam, I Made Aseman pucat mukanya seraya mundur mencari jalan memberitahukan hal itu kepada I Gusti Made Tusan, tetapi ia selalu terhalang. Ia tidak kehilangan akal memberitahukan manteri polisi itu, ia berteriak bahwa I Gusti Made Tusan berhadapan dengan anaknya sendiri. "Ratu menteri, jangan bunuh dia, I Gustam anak ratu, ..." (hlm. 96). Akan tetapi terlambat, kodrat Tuhan Yang Maha Esa telah berlaku, tidak dapat ditahan oleh manusia. Terlambat sudah, karena *kelewang* manteri polisi itu telah menebas leher anaknya. Kepala I Gustam jatuh terpelanting ke tanah. Kejadian lebih lanjut terungkap dalam kutipan di bawah ini.

I Gusti Made Tusan tercengang, lalu menunduk memandangi anaknya yang terbaring di bawah kakinya.
Ketika itu baru terasa olehnya, bahwa ia pun luka parah...
Rupanya kepalanya kena diparang I Gustam sebelum lehernya putus. Pemandangan I Gusti Made Tusan kabur, dialiri oleh darah, dan hatinya pun terharu mendengar seru I Made Aseman itu. Ayahnya,--ia pun berusaha jua hendak mendekati muka anak itu, tetapi ia telah pening, terhuyung-huyung, lalu rebah di sisi mayat I Gustam. Komandan tentara datang ke dekatnya, lalu diangkatnya kedua mayat itu ke pinggir jalan *(SGB,* hlm. 97).

Dalam tahap pemecahan masalah atau peleraian *(denoument)* terungkap ketika I Gusti Made Tusan mati bersama anaknya dan seluruh rumah, warung beserta isinya milik Men Negara musnah terbakar. Menerima kenyataan itu Men Negara menjadi gila, seperti terungkap dalam pernyataan di bawah ini:

Di bawah pohon kelapa kelihatan Men Negara dan Ni Negari serta keluarganya yang lain-lain duduk merenungi api yang telah hampir padam. Ketika itu terasa oleh mereka itu, bahwa mereka telah kena hukuman Widhi, Tuhannya. Terbayang di muka Men Negara rupa Ni Luh Sukreni, anaknya, yang telah dicelakkannya. Asap yang mengepul naik dari unggunan bara rumahnya dan harta bendanya itu, nampak olehnya sebagai orang melambai-lambai dia sambil tertawa gelak dan menyeringai dengan dahsyatnya. Men Negara memekik, berlari, lalu jatuh terguling,--tak ingat lagi akan dirinya. *(SGB,* hlm. 97).

Kasihan, gilakah orang itu?
Benar, orang itu adalah Men Negara yang sudah jadi gila. Setahun sudah ia dalam keadaan demikian. Badannya sudah kurus kering, rambutnya terurai kusut, dan matanya tak tentu arah pandangnya. Kain bajunya robek-robek serta kotor, karena ia selalu tidur di tanah dengan berselimutkan embun. Ia ada di situ; sangkanya, ia masih dalam keadaan seperti dahulu, sebelum terjadi malang celaka itu. Pikirannya, ia sedang menyelenggarakan rumahnya, kedainya serta lumbungnya yang penuh dengan padi .... *(SGB,* hlm. 99).

Demikian uraian alur seperti tersebut di atas. Dari uraian itu tersurat salah satu aspek tentang kepercayaan orang Bali yang beragama Hindu, yakni hukum *Karmaphala*, yaitu bahwa setiap manusia pasti menerima hasil atas perbuatannya. Hal itu mengingatkan akan adanya peribahasa bahasa Bali yaitu *ala ayu ginawe ala ayu katemu,* maksudnya berbuat yang baik pasti menemukan hasil yang baik, sebaliknya berbuat yang tidak baik (jelek) pasti menemukan hasil yang tidak baik (jelek).

### 3.3 Penokohan atau Perwatakan

Dalam menganalisis tokoh-tokoh *SGB* sepenuhnya berpegang pada teori yang telah diuraikan sebagai landasan. Akan tetapi, sebelum dianalisis, penokohan akan dipilah-pilah berdasarkan fungsinya. Dalam cerita fiksi dikenal adanya tokoh utama (protagonis) dan tokoh sampingan (tokoh pembantu, dan antagonis). Kedua jenis penokohan itu sama memegang peranan. Perbedaannya adalah tokoh utama (protagonis) lebih banyak berhubungan dengan tema cerita, lebih banyak melakukan kontak dengan tokoh lain, dan lebih banyak memerlukan waktu penceritaan. Hal itu disebabkan tokoh utama merupakan tumpuan ide-ide yang menjadi cikal-bakal konflik. Tokoh utama cenderung mendapatkan pelukisan yang lebih lengkap dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Kenyataan itu wajar karena hampir setiap peristiwa yang muncul melibatkan tokoh utama. Demikian juga analisis terhadap tokoh utama layak dilakukan lebih mendetail dibandingkan dengan tokoh yang lainnya.

Dari uraian tentang teori penokohan di muka, mekanisme analisis penokohan *SGB* dimulai dari tokoh utama (protagonis) dan dilanjutkan dengan tokoh-tokoh sampingannya. Perlu dijelaskan bahwa tidak seluruh aspek dimensi penokohan akan dianalisis, melainkan hanya aspek-aspek yang tercermin dalam cerita. Kontak atau hubungan antartokoh akan dibicarakan setiap menganalisis seorang tokoh, sepanjang kontak dan hubungan itu ada, dan penting untuk dikemukakan.

Tokoh-tokoh yang terlibat dalam *SGB* adalah Men Negara, I Gusti Made Tusan, Ni Luh Sukreni, Ida Gde Suamba, I Made Aseman, dan I Gustam, merupakan tokoh-tokoh yang banyak mempunyai peranan dalam novel itu. Tokoh I Negara, Ni Negari, I Gerundung, Pan Gumirang, I Nyoman Raka, I Mujana, I Sudiana, I Ketut Rai, Chatter Jee, dan ada

lagi yang lainnya adalah tokoh-tokoh yang peranannya tidak dapat diabaikan walau pemunculannya sepintas saja dalam cerita.

**a. Tokoh Men Negara**

Protagonis *SGB* sesuai dengan intensitas keterlibatan antartokoh ialah tokoh Men Negara. Perwatakan tokoh itu paling lengkap diungkap. Tokoh Men Negara merupakan sumber pemunculan ide yang menyebabkan konflik di antara tokoh-tokoh dalam *SGB*. Di samping itu segala tindak-tanduk atau perbuatan tokoh Men Negara merupakan cermin dari tema novel *SGB* yaitu *Karmaphala*. Karena itulah, tokoh Men Negara paling awal dianalisis. Setelah itu, I Made Tusan dan tokoh-tokoh lain. Hal itu disesuaikan dengan kuantitas pemunculan masing-masing tokoh.

Pelukisan dimensi fisiologis Men Negara dideskripsikan sangat singkat oleh pengarang. Men Negara adalah seorang wanita yang sudah tua, tetapi masih tampak tanda-tanda pada mukanya bahwa ia cantik pada masa mudanya *(SGB*, hlm. 10). Dari kenyataan itu tidak perlu disangkal bahwa pada masa mudanya banyak lelaki yang menginginkannya. Hal itu terbukti dari data pribadinya, bahwa ia melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali dalam waktu yang tidak berselang terlalu lama. Pertama ia kawin dengan I Nyoman Raka di Karangasem. Akan tetapi, ketika anaknya baru berumur delapan bulan ditinggalkannya dan ia kawin dengan I Kompiang ke Binginbanjah di Buleleng. Perbuatannya itu tidak dipermasalahkan oleh I Nyoman Raka karena I Kompiang masih ada hubungan keluarga dengannya.

Dimensi kemasyarakatan (sosiologis) tokoh Men Negara berasal dari *Sudra* atau *jaba*. Hal itu terbukti dari nama sebutannya yaitu"Men" (meme atau ibu). Dalam masyarakat Bali nama "sebutan" ini sebenarnya mengandung makna "hormat" bagi orang yang dijuluki tersebut. Oleh sebab itu, ketika pasangan suami-istri (keluarga) mempunyai keturunan, nama asli mereka sudah tidak pernah disebut lagi dalam pergaulan di masyarakat. Nama sebutan bagi ayah dan ibu itu hanya berpedoman pada nama anak pertamanya. Perlu ditegaskan bahwa ibu disebut *meme* dalam bahasa Bali, sedangkan ayah atau bapak disebut *Bapa* (baca: bape). Kemungkinan karena terjadi pengadaptasikan proses persengauan maka

*meme* menjadi *men* dan *bapa* menjadi *pan*. Sebagai contoh: *Pan Adi* dan *Men Adi* itu, dapat dipastikan bahwa anak pertama pasangan suami-istri tersebut adalah *Adi*. Nama sebutan seperti di atas hanya berlaku dalam masyarakat Bali yang berasal dari warga *sudra* atau *jaba*. Bagi warga *triwangsa*, nama sebutan bagi pasangan suami-istri yang sudah mempunyai keturunan adalah: bagi warga *brahmana*, yaitu *Ida Bagus Aji* (ayah) dan *Ida Ayu Biang* (ibu), bagi warga *ksatria*, *Aanak Agung Aji* atau *Gusti Aji* (ayah) dan *Anak Agung Biang* atau *Gusti Biang* (ibu); sedangkan bagi warga *waisia*, yaitu *Ngakan Aji* atau *Sang Aji* (ayah) dan *Sang Ayu Biang* (ibu). Biasanya nama sebutan warga *triwangsa* tidak pernah diikuti oleh nama anak pertamanya.

Pekerjaan Men Negara di desa Binginbanjah sebagai pedagang. Ia membuka warung yang pada awalnya sangat sederhana. Akan tetapi, berkat ketekunannya warung itu maju dengan pesat dan terkenal bukan saja di sekitar desa itu melainkan sampai ke Singaraja yang jauhnya kurang lebih dua belas kilometer *(SGB*, hlm. 15). Masakannya enak dan murah harganya karena babi yang disembelihnya tanpa melalui prosedur yang semestinya. Di samping itu, cara melayani pembeli sangat memuaskan dengan menyuruh anaknya Ni Negari yang cantik itu untuk memikat pembeli. Banyak orang muda berbelanja ke situ sehingga memberikan keuntungan yang berlipat padanya. Di sini perlu diungkapkan, apabila dipandang dari sudut keturunan dalam sistem masyarakat Bali, Men Negara berasal dari warga *sudra*, tetapi bila ditinjau dari ajaran agama Hindu mengenai bakat dan jenis pekerjaan yang dilakukan (di bidang perekonomian), ia termasuk golongan *waisia*. Kenyataan itu membuktikan bahwa penggolongan *wangsa* atau *kasta* tidak selalu identik dengan pembagian *warna* dalam ajaran agama Hindu sebab *wangsa* atau *kasta* di Bali didasarkan pada keturunan, sedangkan *warna* didasarkan pada bakat dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

Men Negara kemungkinan mengenyam pendidikan formal. Ia seorang anak orang kaya dari Karangasem. Pada waktu itu orang yang dapat mengikuti pelajaran di sekolah adalah anak orang kaya dan anak bangsawan karena biaya pendidikan mahal. Kenyataan itu dibicarakan secara khusus dalam tingkat kecerdasan seperti di bawah ini.

Agama yang dianut oleh Men Negara dan tokoh lainnya adalah

agama Hindu, kecuali Petrus Sudana. Dalam ajaran agama Hindu ada lima hal yang menjadi dasar kepercayaan, yaitu percaya adanya *Sang Hyang Widhi/Tuhan, Atma, Punarbhawa* atau *Samsara, Karmaphala,* dan *Moksa. Sang Hyang Widhi-lah* yang menentukan segala-galanya di dunia ini. Kekuatannya tiada batas, dan berada di mana-mana. Oleh karena itulah diyakini segala apa yang terjadi di dunia, segala apa yang ada di dunia ini *Sang Hyang Widhi-lah* yang menentukan. Demikian juga semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam *SGB* seperti: kejadian yang di alami Luh Sukreni, Men Negara, I Gustam, I Gusti Made Tusan, Ida Gde Suamba dan tokoh lainnya ditentukan oleh-Nya. Hal itu terbukti dari pernyataan I Made Aseman, bahwa nasib tidak dapat dihindari oleh manusia. Seperti terungkap dalam kutipan di bawah ini

> "Nasib, ratu, tak dapat ditolak," kata I Made Aseman sambil menggeleng-gelengkan kepala dan menarik nafas panjang. "Dahulu hamba teramat takut akan penjara dan nama masuk penjara itu saja sudah cukup akan memucatkan warna muka hamba. Tetapi karena nasib juga maka hamba ada dalam gerobak kotoran ini." *(SGB,* hlm. 17).

Kejadian saling membunuh antara bapak dan anaknya yang dilakukan oleh I Gusti Made Tusan dengan I Gustam juga terjadi atas kodrat-Nya. Demikian juga nasib yang menimpa Men Negara yaitu semua harta benda yang diperoleh dari perbuatan yang kurang baik akhirnya musnah terbakar. Semua itu terjadi atas kehendak-Nya.

Pelukisan dimensi psikologis tokoh Men Negara lebih mendetail jika dibandingkan dengan dimensi fisiologis dan sosiologisnya. Hal itu membuktikan Men Negara memiliki ambisi pribadi yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-citanya, tetapi sangat disayangkan dalam mewujudkan ambisinya itu ia menghalalkan segala cara. Misalnya, untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya, disembelihnya babi tanpa menggunakan surat izin, serta dijualnya minuman keras yang dapat memabukkan. Anaknya Ni Negari disuruh meladeni anak-anak muda. Agar tidak kentara, ia memeras dan selalu memperlihatkan manisnya. Keuntungan yang didapat dipakai menggadai, bahkan membeli tanah sawah dan kebun milik orang yang tidak mampu di desa itu. Mengejar

kekayaan menjadi ambisi kehidupannya.

Dalam memilih calon menantu pun Men Negara tidak sembarangan. Ia menginginkan orang yang berpangkat, sebagaimana tercermin dalam kutipan berikut:

> "Ndung," kata Men Negara kepada I Gerundung yang masih duduk di bangku, "amatlah senang hatiku bila aku jadi mertua orang sebagai I Gusti Made Tusan itu, ia berpangkat ..." *(SGB,* hlm. 20).

Ambisi Men Negara sangat tinggi, tetapi rasa tanggung jawabnya sangat kurang. Hal itu terbukti ketika ia tertangkap basah menyembelih babi oleh mata-mata polisi. Di hadapan I Gusti Made Tusan, menteri polisi itu, ia tidak mengakui perbuatannya. Demikian juga saat Luh Sukreni hilang dari rumahnya setelah dinodai oleh I Gusti Made Tusan, ia tidak peduli sama sekali. Pernyataan itu terungkap dalam percakapan mereka di bawah:

> "Ah, itu takkan jadi apa-apa. Asal jangan engkau yang dirusakkan orang sedemikian," kata emaknya.
> "Apa salahnya engkau kubiarkan melayani tamu, asal engkau tak dipegangnya. Uang mereka itu perlu bagi kita, nak."
> "Ke mana perginya perempuan itu sekarang, eh, apa kata kawannya yang bermalam di rumah kakak I Negara itu kelak?"
> Ni Negari tercengang, sebab jika laki-laki itu datang bertanyakan Luh Sukreni, apakah jawabnya?
> "Mudah saja," kata Men Negara, "katakanlah dia sudah berangkat tadi pagi sebelum kita bangun. Kopornya tidak ada lagi, jadi barangkali ia sudah berangkat ke Kalianget." *(SGB,* hlm. 62).

Moral Men Negara pun sangat tidak terpuji. Ia tidak tahan menghadapi godaan, baik yang bersifat seksual maupun material. Ketidakberhasilannya mengatasi godaan seksual baik yang muncul dari dalam dirinya maupun pengaruh dari orang lain, terbukti dari perbuatannya pergi meninggalkan anaknya yang masih kecil, baru berumur delapan bulan. Ia pergi menuruti kehendak lelaki lain ke desa Binginbanjah untuk melangsungkan perkawinan kedua bersama I Kompiang. Untunglah I

Nyoman Raka suami pertamanya tidak mempermasalahkan perbuatannya itu sebab masih mempunyai pertalian keluarga dengan I Kompiang. Godaan Men Negara yang bersifat material tercermin atas tindakannya yang tidak segan-segan menjadi *ceti* (semacam "germo") untuk mendapatkan imbalan. Walaupun sebenarnya ia mengetahui menjadi *ceti* itu akan menjerumuskan harga diri seseorang apabila kedua orang yang dihubungkan itu tidak saling mengenal bahkan tidak saling mencintai. Hal itu tidak dijadikannya masalah. Yang penting bagi Men Negara adalah upahnya seperti tercermin dalam kutipan di bawah:

> Men Negara amat senang hatinya. Mujur juga hidupnya sejak ia datang ke Buleleng. Sudah tentu ia akan dapat uang pula, upah menolong memikat gadis itu.
> "Baiklah," katanya. "Hamba tolong ratu. Tetapi jangan lupa kepada Men Negara ini. Sebenarnya hamba terlalu takut akan mengerjakan pekerjaan seperti itu, jadi ceti. Tetapi ratu teramat baik hati kepada hamba, apa boleh buat ..." *(SGB,* hlm. 55).

Men Negara seorang tokoh yang licik, pandai mencari keuntungan dari barang dagangannya. Jika anak-anak muda yang datang berbelanja, sengaja Men Negara tidak melayaninya. Ni Negari-lah yang dipanggil untuk lebih menarik simpati anak-anak muda itu. Dengan demikian, secangkir kopi yang harganya dua sen pada saat itu dijualnya berlipat ganda kepada anak-anak muda tersebut.

Waktu Men Negara tertangkap menyembelih babi tanpa surat izin, I Gusti Made Tusan amat marah, dan I Gusti Made Tusan akan menghukumnya sesuai dengan peraturan. Untuk meredam amarah menteri polisi itu, Men Negara menyuruh Ni Negari menemuinya. Dengan lemah-lembut dan tutur kata yang amat sopan serta senyum manis, amarah manteri polisi itu sirna bagai api disiram air. Dengan demikian, hukuman untuk Men Negara dan I Gerundung tidak pernah kunjung datang, seperti terungkap dalam pernyataan di bawah:

> Lebih sebulan sudah menteri polisi menangkap Men Negara memotong babi tanpa bersurat keterangan itu, belum juga datang panggilannya dari kantor Singaraja untuk melanjutkan perkara itu.

Men Negara, demikian juga I Gerundung, tidak heran akan hal itu. Jerat Ni Negari telah mengena, dan tangan menteri polisi yang kukuh serta tahu melakukan kewajiban itu, telah dibelenggu oleh ikatan yang halus tetapi rapat dan erat, sampai ia tak kuasa lagi menggerakkan pena mengirim orang yang melakukan pelanggaran itu ke pintu penjara." (*SGB*, hlm. 31).

Men Negara selalu mengulur waktu untuk memenuhi hasrat I Gusti Made Tusan yang ingin menjadikan Ni Negari sebagai istrinya. Kalau diberikan tentu daya tarik warungnya akan pudar karena tidak ada lagi yang dijadikan sebagai penglaris.Men Negara sengaja membiarkan I Gusti Made Tusan menahan rasa cemburunya jika Ni Negari bersenda gurau dengan anak-anak muda. Hal itu dilakukan karena beranggapan bahwa I Gusti Made Tusan akan tergila-gila kepada I Negari sehingga memudahkan ia memerasnya. Oleh karena didesak terus akhirnya Men Negara memberikan Ni Negari menjadi istri I Gusti Made Tusan tetapi dengan syarat agar dijadikan istri yang sah. Mendengar syarat yang diajukan Men Negara itu, I Gusti Made Tusan berdiam diri. Lama ia berpikir tidak berkata-kata sepatah pun, sebab orang tua dan keluarganya tidak suka jika ia kawin secara sah dengan Ni Negari. Memang benar ada niat I Gusti Made Tusan mengawini Ni Negari sebagai istri yang sah tetapi setelah layu akan dibuang. Perihal watak I Gusti Made Tusan yang mata keranjang itu sebenarnya telah diketahui oleh Men Negara ketika Luh Sukreni singgah pertama kali ke warungnya mencari Ida Gde Suamba. Hal itu diketahui oleh Men Negara ketika gadis itu ke warung Pan Gara.

Dari pernyataan di atas, yang perlu dikaji adalah masalah perkawinan. Sebelum tahun 1951 sistem perkawinan dalam kehidupan masyarakat di Bali berlaku sistem perkawinan antarwarga *sewangsa* atau *sekasta*, maksudnya antarwarga *brahmana*, antarwarga *kastria*, antarwarga *waisia*, antarwarga *sudra* atau *jaba*. Jika terjadi perkawinan silang di antara golongan *triwangsa*, tidak menimbulkan permasalahan. Namun, ada jenis perkawinan yang menimbulkan masalah yaitu perkawinan silang antarwarga *triwangsa* dengan warga *sudra* atau *jaba*. Jika mempelai lelaki bersal dari warga *triwangsa* memperistri warga *sudra*, kedudukan mempelai wanita itu hanyalah sebagai *selir* walaupun mempelai laki

hanya kawin sekali. Mempelai laki itu baru memiliki istri yang sah jika melangsungkan pernikahan dengan wanita yang berasal dari warga *triwangsa*. Ada jenis perkawinan yang berakibat fatal yaitu jika laki-laki dari warga *sudra* atau *jaba* memperistri warga *triwangsa*. Mempelai laki dikenakan sangat *selong* (dibuang), biasanya ditenggelamkan di laut dengan pemberat atau dibunuh di hutan. Perkawinan itu disebut *asu pundung*, yaitu laki-laki *sudra* memperistri warga *brahmana*, dan *alangkahi karang hulu*, yaitu laki-laki *sudra* memperistri warga *ksatia* atau *waisia*.

Pandangan Men Negara mengenai anaknya adalah apabila Ni Negari dijadikan istri oleh I Gusti Made Tusan (warga *ksatria)*, ia harus dijadikan istri yang sah. Hal itu menandakan pandangan Men Negara sudah sampai pada tingkat kecerdasaan yang amat tinggi. Ia memandang bahwa manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama walau dari *wangsa* atau *kasta* mana pun asalnya. Secara eksplisit pandangannya itu diungkap dalam pernyataan berikut:

> "Gerundung," kata Men Negara kepada orang yang duduk di bawah lumbung dengan bingungnya, "walaupun bagaimana juga ia harus melakukan kewajiban serta memperlihatkan kejujurannya, kadang-kadang karena suatu hal, dapatlah ia menyimpang juga. Ia tidak terbuat dari besi dan waja. Ia cuma manusia biasa juga sebagai kita." *(SGB*, hlm. 29).

Sifat yang menonjol dimiliki Men Negara adalah cerdas tetapi amoral. Tindakan yang dilakukan dalam mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri merupakan perpaduan dari kedua sifat tersebut. Oleh karena itulah, akhir dari segala perbuatannya mendapat balasan yang setimpal, yakni rumah dan harta miliknya musnah terbakar. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa hukum *Karmaphala* merupakan sebab-akibat perbuatan seseorang yang hasilnya akan dinikmati dengan sendirinya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa sebagai tokoh protagonis, Men Negara paling banyak melakukan kontak atau hubungan dengan tokoh-tokoh lain. Hubungan atau kontak antartokoh yang sudah dijelaskan itu sedapat mungkin tidak akan diungkapkan pada saat membicarakan

tokoh-tokoh yang lain agar tidak memberi kesan mengulangi kembali penjelasan yang sama.

**b. Tokoh I Gusti Made Tusan**

Dimensi fisiologis tokoh I Gusti Made Tusan dilukiskan kurang lengkap. Mengenai umur tokoh itu sama sekali tidak disebutkan, yang disinggung hanyalah ciri-ciri jasmaninya saja. Ia dikatakan gagah perkasa. Berdasarkan dimensi sosiologisnya (kemasyarakatan), diungkap bahwa tokoh I Gusti Made Tusan berprofesi sebagai seorang polisi yang bertugas menjaga keamanan. Batas wilayah tugasnya meliputi daerah Temukus dan sekitarnya termasuk desa Binginbanjah dan Tigawasa.

Sebelum menjadi manteri polisi, pendidikan yang sempat ditekuni I Gusti Made Tusan adalah sekolah guru. Baru satu tahun ia menjadi guru, lalu pindah menjadi juru tulis dan akhirnya menjadi polisi yang bertugas di daerah itu. Sebagai polisi ia mendapat kedudukan yang terhormat. Kedudukannya itu sesuai dengan sistem kelompok sosial masyarakat Bali, yakni karena ia berasal dari warga *ksatria*. Dalam masyarakat Bali pada masa lalu kedudukan warga *triwangsa (brahmana, ksatria,* dan *waisia)* sangat terhormat, karena posisi-posisi penting dalam pemerintahan, baik semasa zaman kerajaan maupun pemerintahan kolonial, kebanyakan dipegang oleh orang-orang yang berasal dari golongan *triwangsa*. Dari kenyataan itu dalam pergaulan di masyarakat seperti dalam bertingkah laku maupun dalam sopan santun berbahasa, warga *sudra* selalu menggunakan bahasa *halus* (hormat) kepada warga *triwangsa*. Pernyataan itu terungkap dalam kutipan di bawah:

> I Gusti Made Tusan duduk di atas bangku, opasnya itu di bawahnya. Ia memandang ke kiri dan ke kanan dengan gagah perkasa lalu bertanya adakah I Made Aseman di rumahnya.
> Seorang berlari-lari ke rumah yang tiada berapa jauhnya dari situ. Sejurus antaranya ia pun kembali dengan seorang anak muda yang tegap badannya.
> "Aku hendak pergi ke Tigasa dan bermalam di situ.
> Bersediakah engkau akan menemani aku, Made Aseman," kata menteri polisi kepada orang itu, tatkala ia telah duduk bersila di bawahnya," *(SGB,* hlm. 20).

"He, ada apa di sini ramai?" tanya menteri polisi setelah ia tiba di kedai kopi itu.
"Men Negara kedapatan sedang menyembelih babi, *ratu,*" kata Made Aseman. *(SGB.* hlm. 25)

Dari segi penggolongan *wangsa* atau *kasta* I Gusti Made Tusan berasal dari wangsa *ksatria.* Tugas yang dilaksanakan sesuai dengan penjabatan dari ajaran *catur warna* dalam agama Hindu. Dalam ajaran *catur warna,* golongan *ksatria* bertugas menjaga ketertiban dan keamanan serta membela negara dan bangsa demi kemakmuran masyarakat.

Dari sudut moral, ambisi pribadi, kecerdasan, dan rasa tanggung jawab yang merupakan bagian dari dimensi psikologis, tokoh I Gusti Made Tusan dapat dikatakan kurang baik. Sebagai polisi, seharusnya ia menegakkan keadilan dan memberi contoh kepada masyarakat agar bertindak atau berbuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, tindak-tanduk I Gusti Made Tusan justru sebaliknya. Ia melaksanakan tugas sesuai dengan kehendaknya. Ia lemah apabila ada orang yang memuji, tetapi marah jika ada orang yang berani membantah kehendaknya. Ia tidak tahan godaan atas cumbu rayu seorang wanita, seperti yang sering dilakukan Ni Negari, begitu pula ketika melihat Luh Sukreni imannya menjadi goyah. Hal itu menunjukkan bahwa mentalnya tidak kuat menghadapi godaan. Kenyataan ini terbukti ketika Luh Sukreni kembali lagi ke Binginbanjah mencari Ida Gde Suamba, disuruhnya Men Negara membujuk gadis itu agar mau bermalam di sana, untuk dinikmatinya. Ia mendesak Men Negara agar ia dapat masuk ke bilik tempat tidur Luh Sukreni, seperti terungkap dalam kutipan di bawah:

Setelah itu diisyaratkannya kepada I Gusti Made Tusan, supaya ia masuk ke dalam. Dengan tak gentar sedikit jua iblis itu pun masuk. Dan setelah kedua anak beranak itu keluar dari situ, dikuncinyalah pintu dari dalam erat-erat. *(SGB,* hlm. 60).

Ambisi pribadi I Gusti Made Tusan sangat menonjol. Dengan lancang dan congkak diceritakannya bahwa ia akan menjadi *penggawa* (setingkat camat sekarang) kepada Ida Gde Suamba yang baru dikenal-

nya. Ia akan diangkat di Manggis (Karangasem). I Mujana seorang penjaga kebun kelapa milik Ida Gde Suamba yang berasal dari Binginbanjah hampir tertawa mendengar pengakuan I Gusti Made Tusan tersebut. Ia mengetahui perihal keadaan manteri polisi itu, sudah tujuh tahun bertugas di daerah itu tidak mengalami kenaikan jabatan. *(SGB,* hlm. 39).

Ida Gde Suamba pun maklum bahwa I Gusti Made Tusan sedang berbohong sebab penggawa di daerah Manggis telah meninggal yang sebenarnya adalah saudara Ida Gde Suamba, seperti terungkap dalam pernyataan di bawah:

> Begini saja, Pan Luh, nanti saya berkirim surat kepada kakak saya, penggawa, supaya ia memberi nasihat atau keterangan kepada Balai Kerta, bahwa janganlah orang mati dijadikan contoh dalam perkara itu.... *(SGB,* hlm. 47).

Tingkat kecerdasan I Gusti Made Tusan memang baik. Ia sangat cerdik, tetapi dalam hal "tertentu" dapat dikalahkan oleh Ni Negari anak Men Negara yang tidak mengenyam pendidikan formal, seperti pernyataan di bawah:

> Sebulan lebih I Gusti Made Tusan memikat hati gadis itu, terasa olehnya telah dapat, tetapi sebenarnya belumlah Ni Negari dapat dipengaruhinya. Walaupun demikian lahirnya Ni Negari kepunyaannya sudah. I Gusti Made Tusan yang cerdik itu dalam hal itu, kalah bercatur dengan gadis itu. *(SGB,* hlm. 38).

Rasa tanggung jawab I Gusti Made Tusan sebagai polisi tidaklah dilaksanakan dengan seksama. Dalam menjalankan tugas, khususnya mengenakan sanksi bagi orang-orang yang membuat pelanggaran terlalu pilih kasih. I Sukra dan I Gaia ditangkapnya karena memotong pohon sirih milik Pan Mudianis, serta Pan Purni ketika memotong sapi. Akan tetapi, Men Negara yang berkali-kali menyembelih babi tanpa surat izin tidak pernah dihiraukannya, karena anaknya Ni Negari pandai meluluhkan hatinya. Sebagai polisi, I Gusti Made Tusan yang seharusnya mengayomi masyarakat dari kejahatan dan keonaran, justru bertindak

sebaliknya. Seperti Luh Sukreni gadis manis dari desa Manggis, yang dicampakkan kehormatannya di rumah Men Negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diutarakan bahwa tokoh I Gusti Made Tusan sebagai polisi menyalahgunakan wewenangnya. Ia bertindak sangat bertentangan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengayomi masyarakat dari tindak kejahatan. Sebagai akibat dari perilakunya itu, akhirnya ia menerima balasan dari perbuatannya yakni ia dibunuh oleh I Gustam anak kandungnya sendiri.

**c. Tokoh Ida Gde Suamba**

Dari sudut fisiologis tokoh Ida Gde Suamba tidak banyak diutarakan pengarang. Ia adalah kemenakan *sedahan* (petugas pajak bumi) Kalianget (Buleleng). Penampilannya sangat sederhana dan sangat pandai bertutur terhadap siapa saja. Apa yang dikatakan menarik hati bagi orang yang mendengarnya.

Pencerminan dimensi sosiologis (kemasyarakatan) tokoh Ida Gde Suamba dapat diutarakan dari sistem pelapisan masyarakat Bali bahwa ia berasal dari warga *brahmana*. Hal itu tercermin dalam ciri khas nama depannya yaitu "Ida".

Dari sudut ajaran *catur warna* agama Hindu, tugas dan kedudukan dari golongan *brahmana* adalah menyejahterakan masyarakat dengan jalan mengamalkan ilmu pengetahuan serta dapat memimpin upacara keagamaan. Tugas dan kedudukan tersebut dikaitkan dengan fungsi pekerjaan seseorang dalam masyarakat. Kedudukan golongan *brahmana* itu sangat dihormati dalam masyarakat karena tugas dan kewajibannya sangat mulia. Akan tetapi, Ida Gde Suamba yang mata pencahariannya sebagai pedagang hasil bumi khususnya kelapa, tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diemban oleh golongan *brahmana dalam ajaran catur warna*. Hal itu menunjukkan bahwa penggolongan dalam *catur warna* itu tidak sepenuhnya identik dengan penggolongan *wangsa* atau *kasta* di Bali walaupun sebutan masing-masing *wangsa* atau *kasta* itu sama seperti penggolongan dalam *catur warna*.

Ijazah sekolah menengah yang dimiliki oleh Ida Gde Suamba merupakan bukti bahwa tingkat pendidikannya cukup tinggi. Hal itulah yang menyebabkan dia dapat dijadikan teladan dalam masyarakat.

Pelukisan dimensi psikologis Ida Gde Suamba dapat diutarakan melalui aspek moral, ambisi pribadi, tingkat kecerdasan, dan tanggung jawab. Moral Ida Gde Suamba sungguh sangat terpuji. Hal itu tercermin pada tingkah lakunya yang sopan dalam bertutur kata pada siapa saja. Ia sangat hormat sehingga banyak orang yang menaruh simpati kepadanya. Ambisi pribadinya pun tidak menonjol, selalu merendahkan diri. Hal itu tercermin dalam percakapannya dengan I Gusti Made Tusan seperti kutipan di bawah:

> "Baik saja, tidak kurang tidak lebih," jawab menteri polisi itu, sambil memilin-milin misainya. "Mengapa ratu tidak minta pada Pemerintah? Tidak payahkah ratu sebagai sekarang ini menunggu orang memetik kelapa dan melakukan pekerjaan kasar-kasar?"
> Mana mau pemerintah menerima orang bodoh sebagai saya ini, Jika saya pandai dan cakap untuk jadi pegawai, sudah tentu dulu saya minta salah satu pekerjaan," kata Ida Gde Suamba dengan lemah-lembut serta mengusap keningnya yang berkeringat karena kepanasan tadi itu. (*SGB*, hlm. 38).

Pernyataan Ida Gde Suamba di atas menunjukkan bahwa ia tidak mau menonjolkan dirinya. Namun, ia memiliki pengetahuan yang sangat luas serta pandai memecahkan suatu persoalan. Hal tersebut terbukti ketika I Nyoman Raka (ayah Luh Sukreni) meminta pertimbangan masalah warisan yang digugat oleh adiknya Petrus Sudana yang sudah diputuskan kalah oleh *Balai Kertha*. Kenyataan tersebut membuat I Gusti Made Tusan kaget dan kagum terhadap sosok tokoh Ida Gde Suamba, seperti terungkap dalam pernyataan di bawah ini:

> I Gusti Made Tusan heran. Mengapa orang tua itu menanyakan perkara yang amat sulit kepada anak muda sebagai Ida Gde itu? "Ajaib," pikirannya sambil menggelengkan kepala. (*SGB*, hlm. 46).

Mengenai hal tersebut, Ida Gde Suamba menyarankan agar masyarakat desa yang memutuskan dengan suara yang terbanyak. Inti saran itu ialah apakah anak yang beralih agama bagi orang Bali yang beragama Hindu itu masih berhak mendapatkan warisan?

Pandangan Ida Gde Suamba di atas menunjukkan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Karena dengan jalan musyawarahlah segala suatu permasalahan dapat diatasi. Demikian juga pandangan Ida Gde Suamba terhadap masalah agama sangat terpuji. Agama yang satu dengan agama yang lainnya sama saja, masing-masing mempunyai kepercayaan dan keyakinannya. Hal yang terlarang yakni tidak boleh mencela agama. (*SGB*, hlm. 47).

Di samping itu, pandangannya mengenai keempat warga di Bali adalah sama saja atas hak dan kewajibannya masing-masing. Hal itu dibuktikan dengan tekadnya meminta Luh Sukreni untuk dijadikan istri yang sah. Pandangan seperti itu terungkap dalam percakapannya dengan Chatter Jee dari India, seperti berikut:

> "Tuan Chatter Jee pendapatan saya, dalam keempat warga tak ada kedapatan lagi perbedaan, sudah lama rata saja, beribu-bapak berkaum keluarga, walaupun nenek moyang orang Bali masih mengatakan kasta itu bertingkat." (*SGB*, hlm.79).

Rasa tanggung jawab Ida Gde Suamba tercermin saat pertemuannya dengan I Made Aseman ketika menjadi narapidana, seperti terungkap dalam pernyataan di bawah:

> "Ah, Aseman" Boleh jadi begitu kata pemuda itu, tetapi engkau tidak boleh bersembunyi-sembunyi kepadaku. Ingat kalau ia mendapat sengsara, siapa yang akan menolong dia? Aku kira, aku patut sekali ....". (*SGB*, hlm. 75).

Demikian pula dengan kesanggupan Ida Gde Suamba membiayai Luh Sukreni dan anaknya menunjukkan ia memiliki rasa tanggung jawab yang dalam. Hal itu tercermin dalam pernyataan di bawah:

> "Jangan menangis jua, Engkau tak bersalah, engkau tetap suci padaku. Di sini saja dulu dengan anakmu. Aku beri engkau belanja tiap bulan seberapa cukup, supaya engkau dapat menyelenggarakan dirimu dan anakmu dengan sederhana. Jika anakmu sudah besar, berilah ia pengajaran yang baik, masukkanlah dia ke sekolah, aku

memikul ongkosnya. Nanti kubicarakan dengan Pan Gumirang hal maksudku itu." *(SGB,* hlm. 84).

**d. Tokoh Ni Luh Sukreni**

Dimensi fisiologi Ni Luh Sukreni yang diutarakan pengarang mempunyai perawakan yang sangat mempesona, yakni ia berumur tujuh belas tahun. Men Negara, Ni Negari, I Gusti Made Tusan, Ida Gde Suamba, dan orang-orang yang berbelanja di warung Men Negara terheran-heran menyaksikan kecantikan gadis itu, seperti terungkap dalam pernyataan di bawah:

> Ida Gde menoleh. Darahnya bagaikan .... ah, sungguh? Seorang gadis berdiri di pintu. Badannya molek, serta *bersanteng* kain merah jambu yang membayang cahayanya pada kulit bahunya yang putih kuning. Rambutnya yang hitam itu menambah elok warna kulit mukanya, serta matanya yang lemah-lembut serta kelopak matanya yang panjang itu, memandang kepada mereka yang ada di kedai itu.
>
> Men Negara, demikian juga Ni Negari, tidak berkata-kata atau menyapa gadis itu. Mereka sebagai terpaku di lantai serta mulutnya ternganga memandangi kecantikan yang luar biasa itu, apalagi I Gusti Made Tusan, menteri polisi, seakan-akan ia ada di surga melihat bidadari melayang-layang, dan gadis itu pun seorang daripada bidadari itu. *(SGB,* hlm. 40--41).

Dari sudut sosiologi tokoh Luh Sukreni berasal dari warga *sudra* karena ayahnya, I Nyoman Raka, berasal dari warga itu. Akan tetapi, kalau ditinjau dari pekerjaan ayahnya sebagai *sedahan* di Karangasem, dapat dikatakan berkedudukan sebagai golongan *ksatria* dalam ajaran *catur warna.* Walaupun demikian, dalam sistem pelapisan masyarakat di Bali, ia tetap berasal dari golongan warga *sudra* karena menggunakan ciri khas nama depannya yakni "Luh".

Motif penggantian nama Luh Sukreni menjadi Ni Made Sari ialah untuk menghilangkan aib yang menimpa dirinya. Hal itu mencerminkan moral dari dimensi psikologisnya. Pergantian nama dilakukan untuk menjaga kehormatan di masyarakat walau ia sudah dinodai oleh I Gusti

Made Tusan. Ia pasrah, tidak menuntut atas kejadian yang menimpa dirinya walau bukan atas kemauannya. Kenyataan itu mungkin disebabkan oleh kedudukan I Gusti Made Tusan baik sebagai menteri polisi maupun kedudukannya dalam sistem pelapisan masyarakat di Bali sebagai warga *triwangsa* yang sangat dihormati pada masa itu. Bagi wanita masalah 'kehormatan' sangat peka, sebab sekali terjerumus akan berakibat fatal walau bukan atas kemauan sendiri. Nasib yang menimpa Luh Sukreni tersebut menyebabkan Ida Gde Suamba tidak jadi meminangnya untuk dijadikan istri. Kemalangan yang dideritanya tanpa berkeputusan itu menyebabkan ia meninggal.

**e. Tokoh I Made Aseman**

Badannya tegap, orangnya masih muda. Demikian pelukisan dari sudut fisiologi tokoh I Made Aseman. Ia sangat tekun menjalankana tugas sebagai mata-mata polisi, dan patuh kepada I Gusti Made Tusan walau tindakan hukum yang dilaksanakan menteri polisi itu sering bertentangan dengan kenyataan yang dilaporkannya. Namun demikian, I Made Aseman tidak berani membantah sebab kedudukannya sebagai bawahan dan berasal dari warga *sudra* selalu menaruh rasa hormat terhadap warga *triwangsa*.

Tanggung jawab I Made Aseman sebagai mata-mata merupakan salah satu aspek sikap psikologisnya yang dijalankan dengan konsekuen. Dengan perilaku semacam itu, pelaksana tindak kejahatan di desa Binginbanjah segera dapat diketahui. Tindak kejahatan pemotongan kebun sirih Pan Mudianis, pemotongan sapi oleh Pan Purni, serta pembunuhan I Gerada dapat diketahui dengan seketika oleh polisi. Tertangkapnya pelaku-pelaku kejahatan tersebut oleh polisi jelas atas bantuan I Made Aseman seperti terungkap dalam kutipan berikut:

> "Eh, Ndung, siapakah yang engkau sangka jadi mata-mata polisi" tanya Men Negara tiba-tiba.
> I Gerundung membuka matanya dengan malas; jawabnya, I Aseman.
> Men Negara terkejut, karena orang yang bernama I Aseman itu tadi ada di situ, duduk di sebelah I Gerundung, yaitu orang yang mengatakan "cepat *kelihan* desa itu mencari keterangan." Sebab ia

berkata demikian tidaklah dapat orang menyangka, bahwa ia jadi mata-mata *(SGB,* hlm. 13).

Perbuatan I Gusti Made Tusan menodai Luh Sukreni di rumah Men Negara diketahui juga oleh I Made Aseman. Ketika itu ia ingin mengantar *opas* polisi ke sana. Peristiwa itu diungkap di hadapan I Negara yang dituduhnya tidak bertanggung jawab. Akhirnya, terjadi perkelahian. I Negara dipukul sampai pingsan sehingga I Made Aseman dipenjara selama enam bulan.

Dalam penjara I Made Aseman sangat rajin sehingga ia mendapat tugas luar yakni mengangkut sampah di dalam kota Singaraja. Ia sering bertemu dengan Luh Sukreni, baik waktu ia jadi pembantu di rumah seorang guru maupun saat ia melahirkan di rumah Pan Gumirang. Semua itu diceritakan kepada Ida Gde Suamba ketika ia bertemu di sebuah hotel.

Demikian pula saat terjadi pembunuhan antara kelompok polisi dengan kawanan penjahat yang merampok rumah Men Negara. I Made Aseman tidak sampai hati membiarkan hal itu walaupun ia sudah lama berhenti menjadi mata-mata. Ia berusaha memberitahu I Gusti Made Tusan agar tidak berkelahi dengan I Gustam. Akan tetapi kodrat Yang Maha Kuasa menentukan lain sehingga kedua orang itu menerima pahalanya yakni mereka saling bunuh secara tragis.

**f. Tokoh I Gustam**

I Gustam adalah anak laki-laki Luh Sukreni yang lahir di luar nikah. Ketika baru berumur satu tahun anak itu dinamai I Gustam oleh Pan Gumirang. Pemberian nama *Gusti* pada tokoh I Gustam untuk mengingatkan bahwa ia keturunan *I Gusti*. Demikianlah pelukisan dari sudut fisiologis yang diungkapkan pada tokoh I Gustam.

Maksud Pan Gumirang menamai anak itu "I Gustam" karena status sosialnya sebagai anak haram atas perbuatan I Gusti Made Tusan. Hal itu sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakat di Bali yaitu menganut faham patrilineal (pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak). Namun, perlu diketahui sistem kekerabatan itu pelaksanaannya dalam masyarakat Bali tidaklah murni sebab ada jenis perkawinan yang disebut *sentana* yaitu bentuk perkawinan, mempelai wanita berstatus

sebagai *purusa* (laki-laki) sedangkan mempelai laki-laki sebagai *pradana* (wanita). Mempelai laki-laki tinggal dan menjadi bagian keluarga mempelai wanita. Jelasnya mempelai laki-laki tinggal bersama dengan keluarga mempelai wanita. Perkawinan itu terjadi apabila orang tua mempelai wanita hanya mempunyai seorang anak (anak wanita).

Dalam sistem pelapisan masyarakat Bali, apabila I Gusti Made Tusan mengawini Luh Sukreni, status anak itu adalah warga *ksatria* sebab ayahnya dari warga tersebut. Karena kelahiran I Gustam tidak didasarkan atas perkawinan yang sah, ia dikatakan anak *astra* (anak haram). Dengan demikian, status I Gustam bergantung pada orang yang memungutnya sebagai anak. Oleh karena Pan Gumirang memungut I Gustam sebagai anak, status I Gustam adalah warga *sudra*.

Gustam tidak senang menimba ilmu di sekolah. Kesenangannya pergi ke Kampung Anyar dengan kawan-kawannya berjudi dan melihat orang menyabung ayam. Sering ibunya menasihati tetapi tidak dihiraukan. Pengaruh lingkungan seperti itu mempengaruhi jiwanya sehingga berani memukul ibunya dan mencaci Pan Gumirang apabila tidak memberi uang untuk berjudi. Proses pembentukan jiwa I Gustam dipengaruhi oleh berbagai bentuk judi sehingga moralnya menjadi rusak.

I Gustam masuk penjara waktu berumur sembilan belas tahun karena mencuri. Pergaulannya di penjara dengan orang-orang tahanan mengakibatkan moralnya semakin rusak. Mereka berjanji jika keluar nanti akan bergabung bersama-sama. Gustamlah sebagai pemimpin perampokan di rumah Men Negara. Rumah, warung, dan lumbung Men Negara dibakar. Disitulah terjadi pertempuran antara kawanan perampok dengan polisi. Polisi itu tidak lain dari I Gusti Made Tusan yang secara kebetulan menjaga rumah Men Negara. Dalam pertempuran itu I Gusti Made Tusan tidak menyadari I Gustam itu adalah anaknya sehingga terjadilah perlawanan seorang anak melawan orang tuanya. Mereka saling bunuh karena perbuatan yang mereka lakukan itu merupakan hasil dari karmanya sendiri.

**g. Tokoh Lainnya**

Tokoh-tokoh lain yang mendukung *SGB* seperti I Negara, Ni Negari, I Kompiang, I Gerundung, I Nyoman Raka, I Mujana, I

Sudiana, I Lenged, Petrus Sudana, Pan Rias, dan I Tambir dari sudut perwatakannya tidak diungkapkan secara lengkap. Peranan tokoh-tokoh itu secara tidak langsung mendukung tema yang tercermin dalam *SGB* yaitu hukum *karmaphala*. Chatter Jee adalah seorang ahli sejarah bangsa-bangsa dari India yang datang ke Bali ingin mengetahui adat-istiadatnya. Pada saat itu ia akan menghadiri upacara *pelebonan* (baca: *pelebon*) atau *ngaben* seorang Anak Agung di Karangasem. Prosesi upacara itu amat besar, meriah dan ramai.

Berdasarkan uraian penokohan di atas tercermin sistem pelapisan masyarakat Bali yang terdiri dari warga *brahmana, kastria, waisia* (disebut warga *triwangsa*), dan *sudra* yang lebih populer dengan sebutan *anak jaba* (orang luar *puri*). Untuk mengetahui identitas warga tersebut, dapat dirunut dari nama depannya, seperti nama-nama tokoh-tokoh yang digunakan dalam *SGB*.

### 3.4 Latar

Berdasarkan pandangan teori yang telah dipaparkan di muka, sangatlah jelas bahwa dimensi-dimensi yang membangun latar cerita *SGB* adalah latar tempat, latar waktu, dan latar sosial ketika terjadinya peristiwa. Aspek-aspek itulah yang digunakan dasar analisis latar *SBG*. Dalam mengungkapkan salah satu aspek latar itu dapat dipastikan akan menyinggung aspek yang lain, sebab ketiga aspek itu saling mendukung, saling mewujudkan, serta tidak dapat dipisah-pisahkan.

#### 3.4.1 Latar Tempat

Tempat terjadinya peristiwa dalam *SGB* secara eksplisit sudah ditentukan oleh pengarang yaitu desa Binginbanjah. Desa itu tidaklah begitu ramai. Jalan menuju desa itu tidak terpelihara, berdebu pada musim kemarau dan menjadi lumpur di musim hujan. Lalu lintas di jalan itu hanya ramai dilalui apabila masyarakat melakukan kerja rodi atau berkumpul di kedai desa. Desa itu letaknya kurang lebih dua belas kilometer sebelah barat kota Singaraja. Ada dua warung di sana, yang satu milik Men Negara dan yang lainnya milik Pan Gara. Letak warung itu tidak berjauhan. Namun, warung Men Negara lebih banyak dikunjungi pembeli karena anaknya Ni Negari pandai melayani pembeli.

Pada mulanya warung Men Negara itu amat buruk. Isinya hanya dua buah meja kecil untuk menaruh beberapa botol dan stoples yang berisi barang dagangan yang murah-murah harganya. Tiap pagi warung itu dijadikan tempat untuk minum kopi bagi warga desa yang akan bekerja ke sawah dan ladang. Keadaan tersebut menggambarkan ciri khas warung-warung pedesaan di Bali pada tahun tiga puluhan.

Berkat ketekunan Men Negara yang dibantu oleh anaknya (Ni Negari) yang pandai merayu pembeli (khususnya anak-anak muda), dalam waktu yang tidak begitu lama warung itu sudah diperbaiki menjadi permanen. Di warung itulah awal mula terjadinya peristiwa dalam *SGB*. Di warung itu pula tempat bertemunya para tokoh dalam cerita. Di belakang warung itu terdapat bangunan rumah Men Negara. Di salah satu bilik rumah itulah Luh Sukreni dinodai oleh I Gusti Made Tusan. Di situlah akhirnya terjadi pertempuran antara I Gustam dengan ayahnya, yang mengakibatkan seluruh harta benda milik Men Negara musnah terbakar.

Tempat-tempat lain yang diutarakan sebagai latar *SGB* adalah: Tigawase, wilayah operasi menteri polisi I Gusti Made Tusan waktu bertugas di daerah Binginbanjah. Mayong, tempat tugas I Gusti Made Tusan setelah menodai Ni Luh Sukreni di rumah Men Negara. Kalianget, asal Ida Gde Suamba, Temukus, tempat tinggal I Gusti Made Tusan. Banjar Bali, rumah Pan Gumirang tempat Luh Sukreni melahirkan anak. Kampung Anyar, tempat atau arena sabung ayam di kota Singaraja. Pabean, pelabuhan laut di kota Singaraja. Semua tempat-tempat tersebut berada di wilayah Kabupaten Buleleng. Desa Manggis, asal Luh Sukreni terletak di daerah Kabupaten Karangasem. Kembang Sari terletak di Kintamani daerah Kabupaten Bangli. Kampung Bali di Banyuwangi (Jatim) tempat keluarga Ida Gde Suamba, dan Jemberana tempat kerja I Ketut Rai *tunangan* (kekasih) Ni Negari.

Dalam kenyataannya tempat-tempat yang disebutkan di atas memang betul-betul ada, bahkan tidak terlalu sulit melacaknya.

### 3.4.2 Latar Waktu

Kisah awal terjadinya peristiwa dalam *SGB* tidaklah begitu sulit untuk dilacak, sebab pengarang secara eksplisit telah menentukan pada "suatu

pagi". Kejadian tersebut berawal dari aktivitas Men Negara di warungnya, seperti terungkap dalam pernyataan di bawah:

> Hari masih amat pagi. Jalan kecil itu sebagai sungai rupanya, karena malam hari turun hujan dengan lebatnya.... Tetapi walaupun demikian asap kedai itu mengepul jua ke udara, dan Men Negara berseru memanggil-manggil dengan sibuknya. Seorang dua orang, tampak masuk dari pintu bambu itu hendak minum kopi. (*SGB*, hlm. 10).

Jika "waktu pagi" seperti kutipan di atas dihubungkan dengan suasana jalan di desa Binginbanjah yang hanya ramai dilalui bila diadakan kerja rodi, dapatlah dikatakan bahwa waktu berlangsungnya peristiwa dalam *SGB* pada zaman penjajahan Belanda. Dalam sejarah disebutkan bahwa Buleleng jatuh ke tangan Belanda tahun 1849. Kejadian itu tidaklah mungkin dijadikan batas awal *(terminus a quo)* kejadian dalam *SGB* sebab kejadian yang tercermin di dalamnya menunjukkan situasi masyarakat Bali pada awal abad XX (sekitar tahun 1930-an). Hal itu dapat dibuktikan dari masuknya agama Kristen ke daerah Bali pada abad tersebut yang dibawa oleh para "misi". Dampak yang timbul dalam masyarakat Bali dengan masuknya agama tersebut adalah masalah kuburan dan warisan keluarga. Di samping itu pada tahun 1926--1927 di Buleleng terjadi polemik antara warga *sudra* atau *jaba* warga *triwangsa* mengenai hak kedudukannya di masyarakat. Polemik mereka tertuang dalam media massa masing-masing. Warga *sudra* dalam majalah *Surya Kanta* dan warga *triwangsa* dalam majalah *Bali Adnyana*. Kemungkinan dari polemik itu tercermin ide pengarang yang dituangkan dalam *SGB* melalui tokoh Men Negara (warga *sudra*) yang menuntut agar anaknya, Ni Negari, dijadikan istri sah jika dinikahi oleh I Gusti Made Tusan (warga *kastria)*. Begitu juga Ida Gde Suamba (warga *brahmana)* telah meminta Luh Sukreni (warga *Sudra)* untuk dijadikan istri, walau tidak kesampaian karena Luh Sukreni telah ternoda. Gagasan-gagasan konfli antarkelompok itu menunjukkan bahwa *SGB* merupakan karya sastra yang menarik pada zamannya.

Waktu berlangsungnya peristiwa-peristiwa dalam *SGB* cukup lama, dari Men Negara membuka warung di desa Binginbanjah sampai ter-

bunuhnya I Gustam di tempat itu pada usia dua puluh dua tahun, seperti terungkap dalam pernyataan di bawah:

> "... Ia kusuruh memata-matai hal itu kesana," jawab I Gustam, Muka I Gustam amat bengis, rupanya umur dua puluh dua tahun itu telah dijalaninya dengan keganasan. (*SGB,* hlm. 89--90).

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa berlangsungnya kejadian-kejadian dalam *SGB* diperkirakan lebih dari dua puluh dua tahun. Batasan waktu itu setidaknya dipakai perkiraan saja sebab setelah terbunuhnya I Gustam di rumah Men Negara cerita belum selesai masih dilanjutkan lagi dengan kedaan Men Negara yang hilang ingatannya menunggu puing-puing lumbung, dan warungnya. Namun, secara jelas dapat dikatakan bahwa peristiwa itu berlangsung sekitar tahun tiga puluhan. Hal itu karena sesuai denga terbitnya novel *SGB* pertama kali tahun 1936.

### 3.4.3 Latar Sosial

Aspek sosial masyarakat Bali yang menjadi latar belakang *SGB* tercermin dalam uraian aspek tempat dan waktu, walaupun tidak diutarakan secara eksplisit. Seperti telah disebutkan di atas, peristiwa dalam *SGB* diperkirakan terjadi pada tahun tiga puluhan. Pernyataan itu didukung oleh suasana di desa Binginbanjah yang dijadikan latar tempat cerita.

Untuk mendukung aspek tempat dan waktu, dalam uraian aspek sosial kemasyarakatan diutarakan masalah latar belakang peristiwa dan situasi masyarakat Bali yang sudah mulai menampilkan gejala-gejala pembaharuan mengenai perbedaan status di antara masing-masing warga, yaitu warga *triwangsa* dengan warga *sudra* atau *jaba.*

Suasana desa Binginbanjah digambarkan dengan sekumpulan rumah orang tani, jalan desa tidak terpelihara dengan baik. Jalan tersebut berlumpur bagai bendungan di musim hujan sehingga menyusahkan orang berlalu lintas. Alat transportasi yang digunakan penduduk waktu itu adalah kereta yang ditarik dengan kuda. Demikian juga petugas keamanan dalam menjalankan tugas di wilayahnya hanya menunggang kuda, seperti yang dilakukan I Gusti Made Tusan yang menjabat menteri

polisi di daerah itu. Pernyataan itu terungkap dalam kutipan di bawah:

> I Gusti Made Tusan, menteri polisi yang berangkat kemarin itu, turunlah dari kudanya. Sambil menyerahkan kuda itu kepada I Made Aseman yang berdiri di belakangnya, ia pun berkata, "Bawa kudaku ke warung Men Negara serta katakan kepadanya bahwa aku hendak datang sebentar lagi minum kopi. Engkau, pergilah dahulu dengan dia," katanya pula kepada opasnya. *(SGB,* hlm. 24).

Seperti telah disebutkan di atas, sistem kekerabatan masyarakat Bali dikenal dengan adanya warga *triwangsa (brahmana, ksatria,* dan *waisia)* dan warga *sudra* atau *jaba*. Sejak zaman kerajaan di Bali, warga *triwangsa* menganggap dirinya (baca: derajatnya) lebih tinggi dari warga *Sudra* atau *jaba*. Kenyataan ini tercermin dari tingkah laku mereka dalam pergaulan. Warga *sudra* atau *jaba* menyebut "ratu" (gelar yang berkuasa) kepada golongan *triwangsa,* dan dalam posisi duduk pun warga *sudra* atau *jaba* selalu berada lebih rendah dari golongan *triwangsa*. Pernyataan itu juga tersurat dalam *SGB*. Setelah Belanda masuk ke daerah Bali, berangsur-angsur mulai timbul pembaharuan di dalam masyarakat yang berpengaruh pula terhadap sistem kekerabatan. Bahkan, munculnya kesadaran pada abad XX yang ditandai dengan berdirinya pergerakan Budi Utomo (1908), yang gaungnya sampai juga ke dalam masyarakat Bali menyebabkan timbul pandangan memperbaharui perbedaan *kasta* tersebut. Perbedaan derajat antara warga *triwangsa* dengan warga *sudra* yang sebelum itu sangat tajam sudah mulai menampilkan gejala menggembirakan bagi warga *sudra* atau *jaba*. Kenyataan itu terwakili dari pandangan tokoh Men Negara dan Ida Gde Suamba dalam *SGB*

Mobilitas *kasta* sudah tampak, baik dalam hak maupun dalam kewajibannya. Warga *sudra* sudah mulai menduduki jabatan pemerintahan yang sebelumnya hanya dipegang oleh warga *ksatria*. Dalam *SGB,* terbukti I Ketut Rai sudah bekerja dalam pemerintahan di Jemberana. Men Negara dari warga *sudra* sudah melakukan kewajiban di bidang perekonomian yang sebelumnya hanya ditekuni oleh warga *waisia*. Bahkan Ida Gde Suamba yang berasal dari warga *brahmana* menekuni pekerjaan yang sebelumnya digeluti oleh warga *waisia* yaitu berdagang hasil bumi (kelapa).

Kenyataan itu semua terungkap dalam *SGB*. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa situasi dan kondisi kehidupan yang tercermin di dalamnya adalah suasana masyarakat Bali awal abad XX, sekitar tahun 1930-an.

Setiap peristiwa yang terjadi dalam cerita sebenarnya telah mengandung ide pengarang. Ide pengarang yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa itu merupakan simbol sosial yang mencerminkan kondisi masyarakatnya. Proses kejadian dalam *SGB* merupakan gambaran kehidupan tokoh-tokoh yang menyandang nilai-nilai sosial tertentu. Setiap peristiwa, perilaku tokoh, dapat dianggap sebagai pola-pola sosial sehingga antara perilaku dan cara tokoh berperilaku dapat dianggap sebagai fakta sosial. Kuntowijoyo (1986:4--6) mengatakan bahwa karena sastra adalah simbol sistem yang mempunyai kaitan erat dengan sistem sosial yang melahirkannya. Memahami sastra sama dengan mempelajari kondisi masyarakat, termasuk kesadaran masyarakat. Kondisi masyarakat itulah yang menjadi bahasan latar sosial sebagai pandangan kelas sosial yang ada dalam karya sastra bersangkutan. Pandangan kelas sosial yang terungkap dalam karya sastra secara konkret bukanlah merupakan fakta empiris langsung, tetapi merupakan gagasan-gagasan, aspirasi perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama, anggota-anggota suatu kelompok sosial tertentu dan yang mempertentangkannya dengan kelompok-kelompok sosial yang lain. Sebagai suatu kesadaran yang kolektif, pandangan sosial itu berkembang sebagai hasil dari situasi sosial dan ekonomi tertentu yang dihadapi oleh subjek kolektif yang memiliki (Goldman, 1977:17--18). Oleh karena itu, ide-ide yang tersurat dalam karya sastra baru dapat dipahami kalau dihubungkan dengan pandangan masyarakat sekitarnya.

Kita mengetahui bahwa pengarang adalah seorang manusia yang senantiasa berusaha memahami lingkungannya yang secara terus-menerus memberikan respon terhadap kecenderungan sosialnya. Upaya Pandji Tisna dalam *SGB* sangat mendalam memberikan respon terhadap lingkungan sosialnya sehingga ia harus berhdapan dengan masalah yang kompleks, seperti kompleksnya ide-ide yang hendak disampaikan. Di antaranya masalah *wangsa* di Bali. Ide-idenya itu sesungguhnya menyiratkan sosial masyarakat. Sehubungan dengan itu, Goldman (1981:40)

menyatakan bahwa peranan pengarang sebagai orang yang selalu merespon kejadian yang ada dalam masyarakat selalu berusaha memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menekankan daya nalar. Pandangan Goldman tersebut sesuai dengan sifat dan sikap Pandji Tisna sebagai seorang pelajar yang menyukai mobilitas berpikir. Faktor pendidikan mempengaruhi jiwanya yang dinamis. Ia selalu menginginkan perubahan-perubahan ke arah kemajuan yang lebih baik. Namun, ia menyadari bahwa perubahan-perubahan ke arah kemajuan yang dikehendakinya akan memiliki arti positif apabila masyarakat tempatnya hidup mengalami perubahan sesuai dengan harkat kemajuan tersebut.

Seperti telah disebutkan di atas, *SGB* melukiskan pengaruh kebudayaan Barat, kehidupan masyarakat Bali sekitar tahun 1930-an yang menimbulkan pembaharuan-pembaharuan dalam masyarakat. Dalam menerima pengaruh itu, masyarakat Bali Utara lebih bersifat terbuka, sedangkan masyarakat Bali Selatan agak tertutup. Keadan itu menyebabkan mobilitas *wangsa* di Bali Utara lebih tampak nyata jika dibandingkan dengan di Bali Selatan. Terjadinya mobilitas *wangsa* disebabkan oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan kekuasaan. Mobilitas *wangsa* terjadi pada warga *sudra* yang menginginkan persamaan-persamaan seperti warga *triwangsa*. Banyak ide yang muncul dari warga elit (terpelajar) *Sudra* untuk memperbaharui adat-istiadat masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan zaman. Pernyataan-pernyataan warga itu banyak dipublikasikan dalam majalah *Surya Kanta* yang terbit di Singaraja sekitar tahun 1924-an.

Dalam *SGB* warga *sudra* yang menuntut persamaan hak adalah tokoh Men Negara. Ia berhasil mencapai kemajuan di bidang ekonomi, sebagai pedagang kopi. Ia menuntut agar anaknya dijadikan istri yang sah apabila kawin dengan I Gusti Made Tusan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti terungkap dalam kutipan di bawah:

> "Tidak, jika ratu suka menjadikan dia istri yang sah, silakan. Bila saja boleh ratu ambil dia," kata Men Negara dengan sungguh-sungguh rupanya. *(SGB,* hlm. 51).

Pernyataan seperti di atas didukung juga oleh tokoh Ida Gde Suamba yang meminta Luh Sukreni menjadikan istri. Begitu juga dalam pernyataannya kepada Chatter Jee, seperti terungkap di bawah:

> "Tuan Chatter Jee, pandangan saya, dalam keempat warga itu tidak ada kedapatan lagi perbedaan, sudah lama rata saja, beribu-bapak, berkaum keluarga, walaupun nenek moyang orang Bali masih mengatakan kasta itu bertingkat-tingkat." *(SGB,* hlm.79).

Pembagian warisan bagi masyarakat Bali yang beralih agama hendaknya didasarkan pada musyawarah desa. Karena setiap agama mempunyai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pernyataan tersebut terungkap dalam kutipan di bawah:

> "Hai ratu," kata Ida Gde memutuskan kata I Gusti Made Tusan. "Sudah, bukan tempat membicarakan agama di sini. Masing-masing ada kepercayaannya, keyakinannya. Janganlah mencela agama orang, terlarang dan tidak baik!. Begini saja Pan Luh, nanti saya berkirim surat kepada kakak saya, penggawa, supaya ia memberi nasihat atau keterangan kepada Balai Kerta, lebih baik kerama desa berkumpul serta memutuskan dengan suara terbanyak, masih dianggapkan oleh orang Bali anaknya yang sudah masuk agama lain, jadi ahli warisnya?" *(SGB,* hlm.47).

Kutipan tersebut menunjukkan betapa luas cakrawala pikiran pengarang yang ingin ditanamkan dalam masyarakat, yakni menyarankan agar bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara agar tidak merugikan salah satu pihak. Penyelesaian seperti itu dianggap paling tepat dan dapat diterima oleh siapa saja di dunia ini.

Perilaku negatif setiap tokoh dalam *SGB* apa pun *wangsanya* tidak pernah lepas dari *karmanya*. Perbuatan yang baik pasti akan memperoleh hasil yang baik, sebaliknya perbuatan yang kurang baik (jelek) pasti akan mendapat hasil yang setimpal. Tokoh I Gusti Made Tusan dan Men Negara yang menjerumuskan Luh Sukreni, dan I Gustam sebagai perampok akhirnya mendapat ganjaran dari perbuatannya itu, I Gusti Made Tusan mati bersama dan Men Negara menjadi gila karena harta bendanya

musnah terbakar. Seperti terungkap dalam pernyataan di bawah:

> Kodrat Yang Mahakuasa telah berlaku. Tidak dapat ditahan oleh tangan manusia. Kelewang menteri tiba di leher anaknya... Kepala I Gustam jatuh terpelanting ke tanah... Rupanya kepalanya kena diparang I Gustam, sebelum lehernya putus. Pandangan Made Tusan kabur... lalu rebah di sisi mayat I Gustam. Komandan tentara datang ke dekatnya, lalu diangkatnya kedua mayat itu ke pinggir jalan. *(SGB,* hlm. 97).

> Di bawah pohon kelapa kelihatan Men Negara dan Ni Negari serta keluarganya yang lain-lain duduk merenungi api yang telah hampir padam. Ketika itu terasa oleh mereka itu, bahwa mereka telah kena hukuman Widi, Tuhannya. Terbayang Men Negara pada rupa Ni Luh Sukreni, anaknya yang telah dicelakakannya... Men Negara memekik, berlari lalu jatuh terguling,--tak ingat lagi akan dirinya. *(SGB,* hlm. 97).

Demikian gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan suatu kelompok sosial yang dipertentangkan dengan kelompok sosial lain yang tercermin dalam *SGB* sebagai pandangan pengarang terhadap lingkungan masyarakat yang melahirkannya.

# BAB IV
# GAYA BAHASA DALAM NOVEL *SUKRENI GADIS BALI*

Ragam bahasa sastra termasuk bahasa yang bergaya karena fungsinya sebagai pendukung inspirasi seni. Dalam bahasa seni, yang paling penting adalah nilai keindahannya. Oleh sebab itu, bahasa sastra lebih bersifat konotatif sehingga mampu memberi nilai-nilai estetis. Pemakaian bahasa dalam karya sastra setiap pengarang memiliki corak yang berbeda-beda bergantung pada sikapnya dalam mengungkapkan masalah yang dihadapi. Sikap itulah yang akan melahirkan gaya tersendiri.

Retnoningsih (1965:14) menjelaskan bahwa gaya bahasa tidak dapat dilepaskan dari pengarang itu sendiri karena gaya bahasa itu merupakan susunan perkataan atau kalimat yang timbul atau terjadi dari curahan perasaan yang hidup dalam hati pengarang, kemudian dalam hati pembaca. Sejalan dengan itu, M.S. Hutagalung (1963:69) mengatakan bahwa gaya bahasa memberi warna pada suatu karangan, dan merupakan bahasa perorangan atau ekspresi individual. Lebih lanjut dikatakan meninjau gaya bahasa seorang pengarang berarti menyelidiki bagaimana ia menggunakan dan mempermainkan bahasa dalam memilih ungkapan-ungkapan, membuat perbandingan-perbandingan sehingga menarik perhatian pembaca.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa setiap pengarang mempunyai gaya bahasa sendiri sesuai dengan sifat dan kegemarannya masing-masing. Gaya bahasa itulah merupakan keistimewaan atau kekhususan seorang pengarang. Bentuk-bentuk yang digunakan pengarang dalam karyanya disebut sarana retorika *(rhetorical-devices)*. Sarana retorika itulah yang menimbulkan ketegangan puitis, karena pembaca

harus memikirkan efek apa yang ditimbulkan dan dimaksudkan pengarang.

Dari uraian di atas, yang dijadikan titik tolak analisis gaya bahasa *SGB* ialah penggunaan kata-kata, frase, anak kalimat dan kalimat yang dapat menumbuhkan kesan estetis yang menjanjikan suatu kenikmatan tersendiri pada pembaca. Melihat keberadaan *SGB* yang banyak mengungkapkan kata-kata (istilah) bahasa Bali, analisis gaya bahasa ini diawali dengan menelusuri pengertian istilah tersebut untuk mengetahui aspek sosial budaya dan dilanjutkan dengan memaparkan jenis gaya bahasa.

Ada beberapa istilah bahasa Bali yang terkandung dalam *SGB,* seperti istilah *toya-tirta* dalam kehidupan masyarakat Bali yang beragama Hindu. *Toya-tirta* adalah dua istilah yang mempunyai pengertian sama yaitu "air suci" yang telah dipuja dengan mantra-mantra oleh para pendeta, baik pendeta Hindu maupun Budha. Tirta (air suci) itu adalah sarana dalam upacara keagamaan maupun adat. Jenis tirta itu pun bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. Dalam ajaran Hindu, air *(tirta)* api *(geni),* dan bunga *(puspa)* adalah sarana yang harus ada dalam berbagai bentuk upacara *yadnya,* yang dipersembahkan kepada *Hyang Widhi/*Tuhan, leluhur, para pendeta, diri sendiri, dan makhluk halus. Tanpa ada ketiga unsur tersebut *yadnya* yang dipersembahkan oleh umat Hindu tidaklah lengkap.

Banyak jenis gaya bahasa yang diungkapkan dalam *SGB* untuk mewujudkan nilai estetis karyanya, seperti: personifikasi, perbandingan, simile, hiperbola, sarkasme, antitetis, repetisi, sadisme, dan metonimis. Dalam analisis ini gaya bahasa yang diutarakan hanyalah yang berkaitan dengan aspek sosial budaya masyarakat yang tercermin dalam SGB.

**a. *Hiperbola***

Keadaan jalan di desa Binginbanjah dideskripsikan pengarang pada awal cerita terlukis kurang terpelihara yang pada musim hujan bagai bendungan. Hal itu mencerminkan penggunaan gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa hiperbola melukiskan pernyataan berlebihan dengan membesar-besarkan suatu hal (Gorys Keraf, 1984:135). Dalam *SGB* banyak diutarakan gaya bahasa tersebut, di antaranya: kecantikan Luh

Sukreni menyerupai seorang bidadari di sorga, yang dapat menggoyahkan iman I Gusti Made Tusan *(SGB,* hlm. 41). Pernyataan itu mencerminkan bahwa banyak laki-laki warga *Ksatria* di Bali pada zaman dahulu (apalagi yang memegang pemerintahan atau yang menjadi raja) tidak tahan terhadap godaan wanita cantik. Oleh karena itu, umumnya laki-laki mempunyai istri (selir) lebih dari seorang.

**b. *Metonimia***

Menurut Altenbernd (Pradopo, 1987:77) metonimia adalah kiasan pengganti nama. Istilah itu menggunakan struktur sebuah objek. Cukup banyak gaya bahasa metonimia ditemukan dalam *SGB,* seperti istilah *Sang Hyang Surya* merupakan sebutan untuk matahari. Dalam bahasa Bali kata *surya* berarti sinar. Mataharilah yang memberi sinar kehidupan bagi isi alam ini, sehingga orang Bali menyebut seperti itu.

Demikian juga, menyebutkan nama orang tua yang sudah mempunyai keturunan. Misalnya, di kalangan warga *sudra* dianggap *tulah* (tidak hormat), apabila tidak menyapa nama panggilan seperti "Pan" untuk bapak dan "Men" untuk ibu. Untuk menyapa orang tersebut, digunakan sebutan sesuai dengan nama anak pertamanya, yaitu bagi ayahnya dipakai *Pan* dan bagi ibunya dipakai *Men.* Di samping itu, sebutan tempat tinggal keluarga setiap warga di Bali juga berbeda. *Geria* untuk warga *brahmana, Puri* atau *Jero* bagi warga *ksatria* dan *waisia,* dan *Umah* bagi warga sudra.

**c. *Sarkasme***

Sarkasme adalah suatu pernyataan yang disampaikan secara kasar serta mengandung nada mengejek (Hutagalung, 1963:73), sedangkan menurut Goris Keraf (1984--143--144) adalah pernyataan yang mengandung kepahitan dan celaan. Gaya bahasa itu selalu menyakitkan hati dan kurang enak didengar.

Pernyataan I Made Aseman yang menyebut setan dan mengharap agar *gerubug* (penyakit sampar) melanda keluarga Men Negara, jelas merupakan suatu penghinaan. Pernyataan itu adalah contoh gaya bahasa sarkasme, seperti diungkapkan dalam kutipan di bawah:

I Made Aseman, mata-mata yang cerdik itu, tak tertahan marah hatinya kepada setan itu. Terasa olehnya lahir batin ia tidak kuasa melawan Men Negara jahaman itu, Bilakah datang *gerubug* akan memusnahkan keluarga mereka itu? *(SGB,* hlm. 33).

Memang masyarakat Bali sangat takut akan *gerubug*. Apabila penyakit itu berjangkit dalam suatu masyarakat, dapat dipastikan dalam waktu sehari saja banyak warga masyarakat yang meninggal dunia. Suatu keadaan yang sangat mengerikan. Biasanya warga masyarakat tersebut akan melakukan *percaruan* (upacara bersih desa diperuntukkan buat *bhuta-kala* yaitu makhluk halus pengganggu) di *perempatan* (simpang empat) desa setelah malapetaka itu berlalu. Memohon agar warga yang masih hidup terhindar dari bencana itu. Upacara itu biasanya dilaksanakan pada hari *kajeng kliwon* yaitu pertemuan hari kajeng (bagian *triwara*) dengan hari *kliwon* (bagian *pancawara)* yang datangnya setiap lima belas hari sekali. Hari itu merupakan hari keramat bagi masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu. Konon menurut orang Bali bahwa pada hari itu atau menjelang hari itu makhluk halus pengganggu dan makhluk jadi-jadian (disebut *leyak)* gentayangan mencari mangsa.

**d. *Repetial***

Menurut Hutagalung (1963:72) gaya repetial adalah pengulangan beberapa kali sebuah kalimat, kata-kata, atau frase untuk melukiskan sesuatu kejadian atau tindakan yang berlangsung agak lama atau terus-menerus. Goris Keraf (1984:127) berpendapat bahwa repetial adalah perulangan bunyi, kata, atau bagian kalimat untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks. Penggunaan gaya itu tercermin dalam *SGB* seperti pernyataan Men Negara ketika Ni Negari berhasil dihindarkan dari cengkraman I Gusti Tusan dengan menjerumuskan Luh Sukreni seperti terungkap dalam kutipan di bawah:

"Biarkan saja, barangkali ia malu, nak; biar saja, ke mana ia akan apergi? Untuk engkau, nak, dapat bertangguh setahun, dua tahun, bertahun-tahun," kata Men Negara sambil meniup-niup api di dapur kecil itu. "Aku tak suka engkau kawin, tak ada penarik langganan lagi." (*SGB,* hlm. 62).

Dalam kutipan itu tersurat bahwa kehidupan warung di Bali (terutama warung kopi), hendaknya dilayani oleh wanita cantik sebagai penarik pembeli atau langganan.

**e. *Antitesis***

Goris Kerat (1984:126) mengatakan bahwa gaya bahasa antitesis adalah pernyataan yang mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Dalam *SGB*, gaya itu terungkap dalam percakapan I Made Aseman dengan Ida Gde Suamba yang mengatakan bahwa "berbohong itu pada tempatnya adalah baik". *(SGB*, hlm.76).

Pernyataan yang kontras tersebut mencerminkan konsepsi nilai-nilai masyarakat Bali yang telah ada sejak dahulu. Misalnya, ada empat konsep berbohong yang dibenarkan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu berbohong kepada anak kecil, orang yang sakit, pacar atau kekasih, dan musuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur *SGB* yang diaktualisasikan dalam plot, karakter, latar dan gaya bahasa mempunyai makna yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Bali.

# BAB V
# WARNA LOKAL BALI DALAM *NOVEL SUKRENI GADIS BALI*

## 5.1 Kondisi Keagamaan

Kebudayaan masyarakat Bali pada umumnya dipengaruhi dan dijiwai oleh ajaran agama Hindu. Agama Hindu yang mendasari kehiduapn masyarakat di Bali menumbuhkan nilai moral dan nilai budaya yang tinggi pada masyarakat. Falsafah *Tri Hita Karana* yang hakikatnya merupakan pengejawantahan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.

Bagi umat Hindu ajaran agama adalah pengetahuan kerohanian yang dapat mempertebal keyakinan dan kepercayaan penganutnya. Tiga kerangka dasar agama Hindu yang terdiri atas filsafat agama *(tatwa),* etika agama *(susila),* dan upacara agama *(ritual).*

Filsafat agama memberikan lima keyakinan dan kepercayaan mutlak atau *Panca Crada.* Kelima kepercayaan itu adalah sebagai berikut.

1) Percaya adanya *Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa;
2) Percaya adanya *Atma* (roh);
3) Percaya adanya hukum *Karmaphala;*
4) Percaya adanya *Punarbawa (Samsara);* dan
5) Percaya adanya *Moksa.*

Kepercayaan terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa memberikan ajaran kepada umat, bahwa Tuhan itu hanya satu (tunggal), Maha Sempurna, Maha Tahu, Maha Adil, Pengasih dan Penyayang

Kepercayaan terhadap *Atma* memberikan keyakinan bahwa manusia

terdiri atas *Atma* (roh atau jiwa), dan badan *wadag* (badan kasar). Kepercayaan terhadap hukum *Karmaphala,* yaitu keyakinan terhadap hukum *rwa bhineda,* hukum sebab akibat, baik buruk, sedih bahagia, sorga neraka. Percaya akan *suba asuba karma,* perbuatan baik akan berpahala bahagia dan perbuatan jahat akan berakibat sengsara.

Menurut hukum *Karmaphala,* pahala dari perbuatan itu akan mempengaruhi kehidupan manusia, baik di masa hidupnya sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang. Dalam ajaran agama Hindu, *Karmaphala* dapat digolongkan menjadi empat bagian:

1) *Parabda karma* adalah pahala dari perbuatan yang kita laksanakan pada saat sekarang tanpa ada sisanya lagi:
2) *Sancita karma* adalah pahala dari perbuatan yang kita laksanakan dahulu yang belum sempat dinikmati pada waktu itu, sehingga merupakan benih dalam kehidupan sekarang;
3) *Kriyamana karma* adalah pahala dari perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat dalam kehidupan sekarang ini, sehingga harus diterima dalam kehidupan yang akan datang; dan
4) *Karma sentana* adalah pahala dari perbuatan yang diterima oleh *sentana* (keturunan) akibat dari perbuatan orang tua (leluhur). (Prajaniti dalam Weda, 1990:43).

Memahami kutipan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa dalam kehidupan sekarang atau nanti, cepat atau lambat, hasil perbuatan harus kita terima dengan segala konsekuensinya. Untuk itu, patut disyukuri karena kelahiran kita sebagai manusia memiliki kesempatan berbuat yang lebih baik.

Dalam novel *SGB* ajaran *Karmaphala* tersirat dalam kutipan berikut ini.

> "Apa jadi Luh Sukreni anak Men Negara!" tanya Ida Gde dengan terperanjat. "Benar, ratu, dan itu asal mulanya maka hamba berkelahi dengan I Negara. Ia marah ketika hamba katakan kepadanya, bahwa ibunya telah menjual anaknya sendiri. Ia menantang berkelahi, hamba pukul kepalanya dan hambapun masuk penjara." Ida Gde termenung, tiada terkata-kata beberapa lamanya. "Kalau begitu tak salah penglihatanku dulu, "katanya kemudian

dengan pelahan-lahan, "bahwa Ni Negari serupa benar dengan Luh Sukreni, Aseman. Jadi karena dosanya yang sudah-sudah, Men Negara ditakdirkan Widi merusakkan anaknya sendiri. Tetapi, ah, Dewa, apakah salah Luh Sukreni maka ialah yang menjadi kurban." (*SGB*, hlm.113).

Di bawah pohon kelapa Men Negara dan Ni Negari serta keluarganya yang lain-lain duduk merenung api yang telah hampir padam. Ketika itu terasa oleh mereka itu, bahwa mereka telah kena hukuman Widi. Tuhannya terbayang di mata Men Negara rupa Ni Luh Sukreni, anaknya yang telah dicelakakannya. Asap yang mengepul naik dari unggunan bara rumahnya dan harta bendanya itu tampak olehnya sebagai orang menghamba-hamba sambil tertawa gelak dan memberingas dengan dahsyat. Men Negara jatuh terguling dan tidak ingat akan dirinya. (*SGB*, hlm. 142).

Kutipan di atas dapat digolongkan pada *Parabda Karma,* yang menyatakan perbuatan baik maupun jahat pahalanya dapat kita rasakan pada kehidupan sekarang. Hukum karma yang juga merupakan hukum alam tidaklah terbatas pada manusia saja. Semua isi alam (makhluk) yang bergerak maupun tidak bergerak, bernyawa atau pun tidak bernyawa akan mengalami suatu proses perubahan (hukum karma) dalam arti yang lebih luas dan universal.

Karya sastra memang tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial budaya yang melatarbelakanginya. Salah satu aspek itu adalah aspek religius atau keagamaan. Aspek keagamaan yang tercermin dalam *SGB* adalah tentang ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali sudah berabad-abad lamanya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa ajaran agama Hindu sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kitab suci *Weda (Upadeca,* 1982:11) disebutkan bahwa tujuan agama Hindu adalah *Moksartham Jagadhitaya Caiti Dhrama* yang artinya *dharma* atau agama bertujuan untuk mencapai *moksa* yaitu kebebasan rohani atau kebahagiaan akhirat yang abadi, dan mencapai *jagadhita* yaitu kesejahteraan masyarakat dan semua makhluk. Namun, harus disadari bahwa *moksa* hanya dapat dicapai melalui *jagadhita,*

maksudnya dalam kondisi masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, diharapkan setiap umat harus mengabdikan diri dalam bidangnya dan menurut kemampuan masing-masing secara tulus ikhlas *(sepi ing pamrih)* untuk melenyapkan kesengsaraan dan penderitaan dalam segala bentuknya, baik lahir maupun batin.

Untuk mencapai tujuan tersebut agama Hindu mempunyai tiga kerangka dasar yaitu: (a) *tatwa* atau filsafat, (b) *susila* atau etika, dan (c) *upacara* atau *ritual*. Dalam kenyataannya ketiga unsur itu terjalin menjadi satu. Ketiganya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu. Jika filsafat agama *(tatwa)* saja diketahui tanpa melaksanakan ajaran-ajaran *susila* (etika) dan *upacara* (ritual) tidaklah sempurna. Demikianlah juga jika hanya melakukan upacara *saja* tanpa dasar-dasar filsafat dan etika, percuma juga *upacara* tersebut. Jadi, ketiga hal itu tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan *tatwanya* (filsafatnya), agama Hindu mempunyai kepercayaan yang disebut *Panca Crada* (lima kepercayaan) yaitu percaya dengan adanya: (1) *Sang Hyang Widhi*/Tuhan, (2) *Atma* (rokh), (3) *Hukum Karmaphala,* (4) *Samsara* atau *Punarbhawa* (reinkarnasi), dan (5) *Moksa* (kebahagiaan abadi). Terkait dengan masalah kepercayaan tersebut, masalah yang akan diungkapkan dalam kondisi keagamaan ini hanyalah mengenai upacara pembakaran mayat yang disebut upacara *ngaben,* seperti diungkapkan dalam *SGB*.

Dalam ajaran Hindu *(Prajaniti Widya Sesana,* 1971:6) menyebutkan hidupna manusia di dunia ini terjadi dari dua unsur yaitu unsur *purusa* (unsur yang menjiwai yaitu *atma)* dan unsur *pradana* (unsur yang dijiwai) yang bersumber pada unsur *panca maha butha* yaitu: (1) *apah* atai air, (2) *teja* atau panas, (3) *bhayu* atau tenaga, (4) *akasa* atau udara, dan (5) *pertiwi* atau tanah. Apabila *atma itu* meninggalkan *pradana,* manusia itu dikatakan mati. *Atma* akan kembali ke asalnya ke alam *niskala* (alam tidak nyata) untuk segera menerima pahala atas segala perbuatan yang telah dilakukan semasih manusia itu hidup, sedangkan *pradana* akan kembali kepada unsur *panca maha butha.* Cara mengembalikan *pradan* kepada *panca maha butha* menurut kepercayaan agama Hindu di Bali disebut *ngaben.*

Dalam buku *Akar Kata* dan *Kata dalam Bahasa-bahasa Indonesia* (terjemahan) karya Renward Branstetter (1957:82) diungkap kata *ngaben* berasal dari bahasa Bali dari kata dasar *api,* mendapat awalan 'ng' dan akhiran 'an' (hukum bahasa Bali) menjadi *ngapien.* Bahasa Bali mengenal hukum sandi, jika 'i+e' menjadi 'e'. Hurup 'p' satu warga dengan 'b' dan 'm" (bilabial). Jadi kata *ngapien* menjadi *ngaben* yang artinya menuju api. Api dalam ajaran agama Hindu merupakan lambang manisfestasi *Sang Hyang Widhi* sebagai pencipta dengan sebutan *Brahma* (batara *Brahma).* Dari pandangan ini *ngaben* berarti menuju kembali kepada Sang Pencipta.

Dalam kehidupan masyarakat Bali (masa lalu) ditemui istilah *pelebuan (pelebon)* dan *pengutangan* yang maksudnya sama dengan *ngaben.* Istilah *pelebuan* diperuntukkan bagi warga *triwangsa,* dan *pengutangan* untuk warga *sudra* atau *jaba.* Besar kecilnya upacara *ngaben* biasanya bergantung pada bentuk jasad orang yang *diaben.* Dalam lontar *Bayi Lok Tatwa* (Wisna, 1986: 5--6) disebutkan jenis *pengabenan* adalah: (1) *sawa preteka* yaitu jasad orang yang *diaben* masih utuh. Upacaranya besar dan paling lengkap, menggunakan *wadah* atau *bade* yaitu menara usungan jenazah di Bali sesuai dengan keturunannya. Biasanya jenis *pengabenan* seperti ini dilakukan oleh warga *brahmana* dan *ksatria.* (2) *asti wedana* yaitu tulang belulang orang yang meninggal setelah beberapa lama ditanam yang *diaben.* Tingkat upacara *ngaben* itu dikategorikan tingkat *madya* (menengah). Sedangkan (3) *swasta* yaitu orang yang *diaben* tidak dijumpai jasadnya. Biasanya digunakan *pengawak* (wujud badan manusia) dari kayu cendana atau daun lalang. Upacara *pengabenan* itu paling sederhana perlengkapannya.

Tingkat upacara ngaben itu belum menjamin seseorang untuk mencapai sorga atau neraka. Pelaksanaan upacara itu adalah wujud dari rasa bakti yang tulus dan ikhlas umat Hindu kepala keluarganya (leluhur) yang meninggal. Upacara itu hanya merupakan permohonan semoga roh orang yang *diaben* tidak lagi diikat atau dibelenggu oleh unsur-unsur yang membentuk tubuhnya *(panca maha butha).* Upacara *ngaben* merupakan upacara terakhir dalam kehidupan manusia untuk membayar utang baik material maupun spiritual kepada leluhur. Suatu tanda adanya rasa bakti dan rasa terima kasih atas jasa-jasa yang telah dilimpahkannya

sebelum mendahului kita ke alam baka. Bagi umat Hindu (di Bali) mereka tidak akan hidup tenteram apabila mereka belum mengerjakan upacara *ngaben* terhadap leluhur atau keluarga yang telah mendahuluinya. Konon menurut kepercayaan mereka yang meninggal dan belum *diaben,* rohnya akan berkeliaran di sekitar keluarga mereka yang sewaktu-waktu dapat mengganggu ketenteraman rumah tangga.

Dari pernyataan di atas, kemungkinan besar jenis upacara pembakaran mayat *(ngaben, peleburan)* Anak Agung di Karangasem yang disaksikan oleh Chatter Jee dari India itu adalah jenis *sawa pretaka.*

Masalah *ngaben* dalam kehidupan masyarakat Bali yang bergama Hindu mempunyai arti penting khususnya dalam masalah warisan. Anak-anak yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya tidak boleh membagi warisan sebelum orang tuanya *diaben.* Pembagian warisan di Bali sangat berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Di Bali masalah warisan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah keagamaan. Beralih agama menurut hukum adat di Bali berarti orang itu tidak ada lagi hubungan dengan *sanggah* atau *merajam* yang erat kaitannya dengan asal-usul dari harta warisan itu. Di samping itu, orang yang pindah agama (dari agama Hindu) tidak lagi berhubungan dengan *desa adat* dan *Pura Kahyangan Tiga* yang mempunyai rantai tak terputuskan dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Dengan kata lain orang Bali yang beragama Hindu mempunyai kewajiban atas tempat pemujaan dalam melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Denga demikian, orang yang pindah agama tidak mendapat warisan. Seperti terungkap dalam pernyataan di bawah:

> Sudah hamba ajukan perkara itu ke muka Balai Kerta, dan dengan putusan baru-baru ini dia dikalahkan. Tidak boleh menerima waris orang tua, bapak hamba. "Bahwa Petrus Sudana, saudara hamba tidak boleh menerima waris orang tua, jadi waris orang tua hamba, sebabnya pertama yang meninggalkan waris itu belum diaben, dan karena itu ahli waris belum boleh membagi-bagi pusakanya. Kedua karena Petrus Sudana menjadi Kristen, sudah meninggalkan agamanya yang asli". *(SGB,* hlm. 45).

Tindakan I Gusti Made Tusan menodai Luh Sukreni bertentangan dengan tugas dan kewajiban seorang pemimpin. Dalam ajaran *etika* agama Hindu seorang pemimpin masyarakat hendaknya dapat menciptakan perdamaian, perlindungan dan keadilan. Hal tersebut terungkap dalam kitab *Ramayana (Prajaniti Widya Sastra,* 1971:80--81) bahwa ada delapan landasan berpijak seorang pemimpin yang diberikan Sri Rama kepada adiknya Bharata yang disebut dengan *Asta Bharata,* yaitu (1) *Indra Bharata*, pemimpin itu hendaknya memperjuangkan kemakmuran atau kesejahteraan, seperti sifat dari *Bharata Indra* sebagai *Dewa Kemakmuran;* (2) *Yama Bharata*, pemimpin hendaknya mempunyai sifat-sifat seperti *Bhatara Yama* yaitu menegakkan keadilan dan memberi hukuman menurut kesalahan yang diperbuat, menjatuhkan hukuman secara objektif tanpa pandang bulu; (3) *Surya Bharata*, pemimpin hendaknya memberi penerangan secara menyeluruh kepada masyarakat dengan tidak memandang derajat; (4) *Chandra Bharata*, hendaknya selalu memperlihatkan wajah yang tenang dan berseri-seri kepada masyarakat sehingga penuh simpati untuk mendidik mental rakyat; (5) *Bhayu Bharata*, pemimpin hendaknya mengetahui dan menyelidiki keadaan dan kehendak masyarakat seperti sifat angin di mana ada tekanan yang rendah ke sanalah angin bertiup membawa kesegaran dan kenyamanan; (6) *Danaba Bharata*, pemimpin hendaknya tahu menggunakan dana (uang) secara efisien dan produktif; (7) *Baruna Bharata*, pemimpin hendaknya dapat menghilangkan penyakit masyarakat seperti pengacau politik, eknomi, dan pengacau ketertiban sosial; dan (8) *Agni Bharata*, pemimpin memiliki sifat-sifat ksatria atau pemberani dalam menghadapi rintangan-rintangan dan sanggup membakar semangat rakyat untuk mengadakan pembangunan baik material maupun mental spriritual. Ajaran kepemimpinan Sri Rama ini pada pokoknya menghendaki pemimpin yang bersifat religius.

Atas perbuatannya yang kurang baik sebagai pemimpin, I Gusti Made Tusan menerima ganjaran yang kurang baik. Kenyataan tersebut mencerminkan persepsi ajaran hukum *Karmaphala.* Berikut peristiwa yang menggambarkan hal tersebut.

Darah sudah mengalir. Rintih orang luka kedengaran di antara teriak yang bengis itu. Api menderu dengan dahsyat, dan bunyi bambu meletus hidup jiwanya terancam, ia berteriak dengan suara gemetar:
"Ratu menteri, jangan dibunuh dia, I Gustam anak ratu..." Tetapi terlambat sudah. Kodrat yang Maha Kuasa telah berlaku. Tidak dapat ditahan oleh tangan manusia. Kelewang manteri tiba di leher anaknya....
Kepala I Gustam jatuh terpelanting ke tanah.
Dalam pada itu I Made Aseman berteriak-teriak juga. I Gusti Made Tusan tercengang, lalu menunduk memandangi anaknya yang terbaring di bawah kakinya. Ketika itu baru terasa olehnya, bahwa iapun luka parah....
Rupanya kepalanya kena diparang I Gustam, sebelum lehernya putus. Pandangan I Gusti Made Tusan kabur, dialiri oleh darah dan hatinyapun terharu mendengar seru I Made Aseman itu. Anaknya, iapun berusaha jua hendak mendekati muka anak itu, tetapi ia telah pening *(SGB,* hlm. 142).

Dalam pelaksanaan upacara keagamaan di Bali, *Bhatara Siwa* selalu dipuji karena para *pedanda* (pendeta) kebanyakan berasal dari warga *Brahmana-Siwa* yang lebih dikenal dengan sebutan *Pedanda Budha*. Akan tetapi, agama itu tidak berkembang di masyarakat karena mungkin telah bercampur dengan agama Hindu. Demikian juga, yang *mediksa* (mensucikan diri) menjadi Ipedanda Budha adalah warga *Brahmana*. Kutipan berikut menyatakan hal tersebut.

"Tidak terang, tuan. Cuma Siwa-Sidanta yang dipujikan orang", jaab anak muda itu. "Segala Pedanda Budha".
"O," kata orang itu. "Jika demikian agama Budha sudah tentu terdesak, bukan? Sebagai kata tuan tadi, jika Pedanda itu Siwa-Sidanta semaunya?"
"Agama Bhuda sebagaimana tersebut dalam buku-buku Hindu, yaitu Budha Gautama, tidak nyata ada di pulau Bali ini. Di sini agama itu telah bercampur dengan agama Siwa. Pedanda Budha kebanyakan kedapatan di Karangasem dan cuma Brahmanawangsa yang boleh

berdiksa menjadi Pedanda Budha itu, kata anak muda itu. *(SGB,* hlm. 108).

Menurut Goris (Sutojo, 1984:4-6) kebanyakan para *pedanda* di Bali adalah *Sekta Siwa Sidanta* yang *muput* (menyelesaikan) upacara keagamaan menggunakan mantra-mantra pujian (bahasa Sanskerta) kepada *Bhatara Siwa* sebagai *Dewa Matahari* yang disebut *Siwa Raditya.* Aktivitas *pedanda* itu adalah: (a) melaksanakan doa persembahyangan sebanyak tiga kali sehari (tri sandya) yaitu: pagi hari (saat matahari terbit), siang hari (saat matahari tepat berada di atas kepala kita), dan sore hari (saat matahari terbenam), (b) mempersembahkan air suci (tirta) untuk berbagai upacara, dan (c) muput upacara keagamaan baik di *pura* maupun dalam keluarga dengan memberkahi air suci serta menggunakan mantra-mantra (doa-doa) dengan sikap-sikap tangan yang khas.

Di samping *sekta* (kelompok pemuja) di atas dikenal pula sekta *pasupata* yaitu suatu kelompok pemuja *Siwa* dalam wujud *linga (linggayoni).* Akan tetapi, di Bali kelompok itu telah lenyap. *Sekta Wesnawa* yang memuja *Bhatara Wisnu* dan *Dewi Sri* sebagai *Dewa Kemakmuran* masih ditemukan dalam masyarakat, dengan dijumpai tokoh *Sengguhu*, yaitu pendeta yang bukan dari warga *Brahmana* melainkan dari warga *Sudra* atau *jaba.* Kutipan berikut menggambarkan hal tersebut.

Tuan Chatter Jee, orang India itu, berdiam diri beberapa lamanya. Entah ia sedang memikirkan pula Bali yang kecil itu, wal' lahu alam! Sedjurus kemudian iapun berkata:
"Jika begitu, niscaya Wisnu tidak disembah orang lagi, atau tidak diperhatikan lagi."
"Mengapa tidak, tuan Chatter Jee! Batara Wisnu yang terlebih dipujikan sesudah Siwa Isteri Batara itu, Batara Seri, amat dijunjung orang, karena ia dewi padi, Anaknya, Dewi Melanting, dijadikan sembah-sembahan dikebun, dipasar, dimana orang mengerjakan pekerjaan yang bresangkut paut dengan tanam-tanaman. Dan sengguhu ialah pangkat upacara agama Wisnu."
"Apa sengguhu itu!"
"Pendeta bukan orang Brahmana, melainkan orang jaba".

"Jadi orang Bali masih setia kepada agamanya!"
Kata Chatter Jee pula. *(SGB,* hlm. 109).

*Sengguhu* adalah istilah yang berasal dari bahasa Bali yaitu *Sang* dan *Guru* (yang mulia), yang menurut Goris (Sutoyo, 1986:13) berperan pokok dalam upacara *Tawur Kasnaga* (upacara percaturan pergantian tahun Caka) yang dilaksanakan pada simpang empat setiap desa pada bulan *Kesanga* (bulan sembilan Bali, sekitar bulan Maret) setiap tahun menjelang hari raya *Nyepi*. Dengan berpakaian putih dan peralatan upcara seperti: *sengkala* (kerang *Wisnu), Cakra* (senjata *Wisnu),* dan seekor *kurma* (kura-kura) sebagai *gentha* (lonceng). Dia menggunakan mantra-mantra dan mempersembahkan korban suci *(yadnya)* bagi alam bawah, menunjukkan sifatnya yang *wisnuis*. Maksudnya *Wisnu* sering menyelamatkan dunia dalam wujud binatang, di antaranya sebagai *Kurma Raja* (kura-kura yang besar), yang terungkap dalam lontar *Mandara Giri,* yang menceritakan saat para *dewa* mencari tirta *Amerika* (air kehidupan yang kekal abadi).

Perkembangan *Catur Warga* di Bali berbeda dengan di India yang dikenal istilah kasta. *Catur Warga* di Bali eksistensinya tampak pada upacara-upacara yang tidak mengenal tinggi rendah kedudukan melainkan ketulusan lahir-batin menyukseskan upacara-upacara tersebut. Kutipan berikut melukiskan hal tersebut.

> "Jika demikian keempat warga itu masih kedapatan dipulau ini?"
> "Ya tuan Chatter Jee, tetapi tidak sebesar di India perbedaan masing-masing," kata anak muda itu sambil menyilahkan Chatter Jee minum rokok. "Jika lama tuan dipulau Bali ini, akan tuan persaksikan sendiri betapa mereka bergaul, sebagai sudah sama rata saja. Cuma kalau ada upacara agama, baru kelihatan perbedaannya. Itulah sudah selayaknya, sebab jika tidak demikian, takkan dapat lagi orang di sini mengatakan bahwa ia masih beragama Hindu Bali." *(SGB,* hlm. 110).

Agama Hindu yang berkembang di Bali merupakan perpaduan antara agama Budha dan Ciwa. Karenanya ketika ada upacara besar pendeta Ciwa dan Budha harus dilibatkan. Agama Budha yang ber-

kembang di Bali bukanlah agama Budha Gautama yang dikenal di India ataupun di Thailand. *(SGB,* hlm. 108).

Dalam novel *SGB* diuraikan mengenai fungsi dari Tri Sakti atau tiga dewa penguasa alam yaitu Dewa Ciwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Dewa Wisnu sebagai pemelihara isi alam agar manusia bisa mendapatkan kesejahteraan hidup. Misalnya, Dewa Wisnu melalui simbolnya sebagai Dewi Sri disembah oleh petani dan Dewi Melanting disembah oleh para pedagang. Kutipan berikut menjelaskan hal tersebut.

> "Demikian juga Pedanda-pedanda itu memakai mantera-mantera yang sama, seperti: saptangga dan sebagainya," kata anak muda itu pula.
> Tuan Chatter Jee, orang India itu, berdiam diri beberapa lamanya. Entah ia sedang memikirkan pulau Bali yang kecil itu, wal' lahu alam! Sejurus kemudian iapun berkata:
> "Jika begitu, niscaya Wisnu tidak disembah orang lagi, atau tidak diperhatikan lagi."
> "Mengapa tidak, tuan Chatter Jee! Batara Wisnu yang terlebih dipujikan sesudah Siwa Isteri Batara itu, Batara Seri, amat dijunjung orang, karena ia dewi padi, Anaknya, Dewi Melanting, dijadikan sembah-sembahan di kebun, di pasar, di mana orang mengerjakan pekerjaan yang bersangkut-paut dengan tanam-tanaman. Dan sengguhu ialah pangkat upacara agama Wisnu."
> "Apa sengguhu itu!"
> "Pendeta bukan orang Brahmana, melainkan orang jaba".
> "Jadi orang Bali masih setia kepada agamanya!"
> Kata Chatter Jee pula. *(SGB,* hlm. 109).

## 5.2 Kondisi Politik

Kehadiran karya-karya A.A. Pandji Tisna telah memberikan nuansa baru dalam penulisan novel di Bali pada tahun tiga puluhan pada masa itu, kondisi sosial budaya Bali yang memiliki nilai religius dapat diangkat ke dalam karya-karyanya tanpa menimbulkan kontradiksi bagi pembaca dan masyarakat.

Sapardi Djoko Damono (1979:58) berpendapat bahwa sastra berkaitan dengan sejumlah faktor sosial; untuk bisa memahami usul-usul, bentuk, dan isinya, faktor-faktor sosial itu bisa membantu kita. Sosiologi

sastra yang mendasarkan diri pada pengamatan, dan bukan pada teori sudah selayaknya dikembangkan apabila kita ingin memperhitungkan pentingya faktor-faktor sosial yang menyangkut sastra.

Pemisahan pada aspek sosial dan budaya Bali pada kesempatan ini didasari oleh kemudahan pemahaman analisis. Sebab, disadari kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan meskipun dapat dibedakan. Yang dimaksud dengan latar belakang sosial itu adalah latar belakang kemasyarakatan yang meliputi lembaga masyarakat dan sistem pelapisan masyarakat rakyatnya. (Weda, 1990:29).

Mengenai lembaga masyarakat dan sistem pelapisan masyarakat Bali yang tercermin dalam novel *SGB* diungkapkan sebagai berikut.

Dalam sistem kemasyarakatan dan sosial politik di Bali dikenal suatu lembaga sosial yang disebut *Desa Adat*. Suatu *Desa Adat* memiliki aturan adat yang tertuang dalam *awig-awig* (seperangkat aturan). *Awig-awig* dijadikan pedoman untuk mengatur aktivitas kehidupan warga desa yang tinggal di wilayah *Desa Adat*.

Penerapan aturan-aturan *Desa Adat* dibantu oleh kelompok masyarakat, yang merupakan persekutuan hidup sosial yang disebut *Banjar*. Pemimpin atau orang yang dipercayakan mengkoordinasi anggota *Banjar* dinamakan *kelian banjar*, sedangkan dalam *desa adat* disebut *bendesa adat*.

Nama-nama kepala atau pimpinan desa di Bali baik yang berkaitan dengan adat maupun formal (sistem pemerintahan sekarang). Misalnya ada nama *perbekel, tuha, lurah,* dan sebagainya.

Kepala atau pemimpin *Desa Adat* di Bali terikat kepada tatanan yang mengatur segi-segi kehidupan masyarakat. Menurut pengamatan di berbagai desa di Bali, terlihat adanya tata (aturan) yang disebut sebagai *sima, paswara,* dan *piagam*.

*Sima* adalah suatu tata masyarakat adat yang tidak tertulis, tetapi ditaati turun-temurun. *Paswara* adalah suatu tata lain yang penjelmaannya dari kehendak penguasa zaman dulu (raja), yang pada hakikatnya untuk mengatur masyarakat adat, sedangkan *piagam* adalah aturan adat yang tertulis. Dalam perkembangannya istilah *piagam* tidak begitu dikenal lagi. Beberapa dosa di Bali ada yang menggunakan istilah *piagam* tersebut. Dewasa ini istilah *awig-awig* lebih dikenal dan dipergunakan masyarakat.

Pranata sosial yang terdapat dalam desa adat di Bali dalam novel *SGB* berfungsi sama dengan sistem keamanan pemerintah pada waktu itu. Peranan Manteri Polisi tidak menghilangkan lembaga ketahanan desa adat yang selama ini telah mampu menciptakan keamanan desa.

Situasi keamanan yang terkendali berkat peranan intelejen atau mata-mata yang berhasil menangkap pencuri dan menyelesaikan perkara yang tergambar dalam novel *SGB* membuktikan ketajaman imajinasi pengarang mengangkat permasalahan sosial politik pada masa itu. Misi tugas manteri polisi memiliki wewenang penuh untuk menjaga wilayahnya dari gangguan keamanan, seperti kutipan berikut:

> "I Sukra dan I Ragis keduanya didakwa memotong pohon sirih Pan Mudiasih." "O, benar, yang terjadi tiga hari yang lalu, cepat benar kakimu mengurus perkara sebagai itu," kata orang laki-laki itu pula. "Bukan, bukan dia yang mendapati perkara itu melainkan I Gusti Made Tusan, menteri polisi, kata Men Dadi. "Tetapi tak mungkin ia sendiri yang mencari keterangan. Sudah tentu ada beberapa orang lagi yang tahu hal-ihwal dan seluk-beluk keadaan disini," kata Gerundung dengan melasnya menaikkan kakinya, lalu bersila di bangku. "Sudah tentu" jawab Men Dadi, sambil bergerak hendak pergi dari situ," cuma menteri polisi memerintah saya supaya pesakitan itu dibawa kekantor polisi." "Saya heran, siapa yang jadi mata-mata polisi disini," kata I Gerundung." Dulu keterangan pembunuhan I Gerada didapati dengan seketika walaupun pembunuhan itu dilakukan orang dengan cerdik benar." "Dan penangkapan Pan Parni memotong sapi dikebunnya," kata orang lain yang sedang memasukkan ke mulutunya." Bukan main cepatnya." *(SGB,* hlm. 8).

> I Gusti Made Tusan tiap-tiap hari datang ke Binginbanjah, seolah-olah daerah Binginbanjah itu perlu selalu diamat-amati polisi. Oleh karena itulah maka desa Binginbanjah jadi sangat aman, sampai orang berkata, berani menaruh apa-apa yang berharga di luar rumah pada malam hari dengan tiada di jaga. *(SGB,* hlm. 40).

Ketegasan I Gusti Made Tusan yang menjabat sebagai manteri polisi ketika menangani masalah perijinan memotong hewan yang di-

langgar oleh Men Negara membuktikan ia disegani dan ditakuti oleh warga desa. Berikut ini kutipan yang menggambarkan ketakutan Men Negara dan I Gruduk tertangkap basah memotong babi tanpa izin.

> "Benarkah sebagai cerita I Aseman ini" tanya I Gusti Made Tusan dengan keras kepada perempuan itu.
> "Tidak ratu mentri, saya tidak menyembelih babi," jawab Men Negara dengan takutnya. "Engkau tidak, tetapi ketiga orang itu." Kata menteri polisi." Orang boleh memotong babi, sapi dan kerbau. Tetapi mengapakah engkau ketakutan, ketika opas dan I Made Aseman masuk ke pekaranganmu dan apa sebab kau lepaskan babi yang telah luka itu engkau terlalu amat buas, menyakiti binatang dengan jalan demikian. Tentu babi itu engkau potong dengan tidak minta surat keterangan dahulu, Men Negara "kata manteri polisi dengan suara yang menakutkan serta memegang-megang misainya." Kalau tidak, masak engkau melihat aku, menteri polisi. Engkau tidak akan luput dari hukuman. Tunggulah perintah, panggilan datang ke kantor, "Menteri polisi itu berpaling kepada I Gerundung yang duduk di tanah, seraya bertanya dengan bengis: Hei engkau mengaku memotong babi itu dengan tidak bersurat keterangan, bukan!"
> I Gerundung tidak menjawab dengan segera, ia menggigil sebagai kena penyakit demam. "Jawab dengan segera!" Men Negara menyuruh saya.... Setelah dituliskannya semuanya, menteri polisi itupun hendak pergi dari situ, tidak jadi minum kopi. Ia berpaling arah kepintu. *(SGB,* hlm. 32).

Unsur politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah-masalah sosial yang tercermin dalam karya sastra. Ruang lingkup masalah ini sangat luas menyangkut bidang ketatanegaraan (struktur pemerintahan, dasar pemerintahan), hubungan negara dengan negara lain, kebijaksanaan pemerintah, siasat dan lain sebagainya (Poerwadarminta, 1983:76).

Berdasarkan latar waktu yang tercermin dalam *SGB* dapat dikatakan bahwa struktur pemerintahan di Bali saat itu masih berpedoman pada pemerintah kerajaan. Struktur pemerintahan pada masa pemerintahan kerajaan di Bali dapat dilihat melalui sistem birokrasi tradisional.

Dalam pemerintahan kerajaan, pimpinan tertinggi adalah raja. Dalam *Babad Buleleng* disebutkan bahwa pemerintahan raja-raja di Bali Utara dari permulaan abad XIX sampai jatuhnya Buleleng ke tangan Belanda tahun 1849, diperintah oleh raja-raja keturunan Panji Sakti (Putra Agung, 1974:27). Raja di dalam menjalankan politik pemerintahan sangat ditentukan oleh pribadinya. Kekuasaan raja sangat besar dalam masyarakat, sebagai pemilik kekuasaaan di seluruh wilayah kerajaannya. Hubungan raja dengan rakyat diatur melalui suatu birokrasi yang merupakan suatu sistem pemerintahan tradisional yang dimiliki juga oleh kerajaan-kerajaan lain di Bali.

Dalam bidang kebudayaan istana raja dapat dikatakan sebagai pusat kebudayaan karena segala aktivitas kesenian seperti: seni tari, tabuh, pahat, suara, dan sastra, timbul di kalangan istana. Demikian juga di bidang keagamaan raja berkewajiban memberi perlindungan dan sumbangan terhadap perbaikan-perkaitan *pura* yang bersifat umum yaitu *pura Kahyangan Tiga*.

Setelah Buleleng jatuh ke tangan Belanda, masalah politik diambil alih oleh pemerintah kolonial untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas-petugas yang diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda kebanyakan dari warga *Triwangsa*. Kenyataan ini terungkap dalam *SGB* yaitu menteri polisi yang bertugas di desa Binginbanjah dan sekitarnya adalah I Gusti Made Tusan yang berasal dari warga *Ksatria*. Begitu juga yang menjadi *penggawa* di Manggis adalah saudara Ida Gde Suamba yang berasal dari warga Brahmana. *Penggawa* mempunyai wewenang dalam pemerintahan dan mengatur ketertiban di wilayahnya, mendapat kekuasan penuh dari pemerintah terutama dalam hal memutuskan perkara yang berhubungan dengan adat istiadat dan agama. Wewenang *penggawa* itu tersirat dalam pernyataan Ida Gde Suamba berikut ini:

> Begini saja, Pan Luh nanti saya berkirim surat kepada kakak saya, Penggawa, supaya ia memberi nasihat atau keterangan kepada Balai Kerta, bahwa janganlah orang mati dijadikan contoh dalam perkara itu. Lebih baik krama desa berkumpul serta memutuskan dengan suara terbanyak, masih dianggapkah oleh orang Bali anaknya yang sudah masuk agama lain, jadi ahli warisnya?" (*SGB*, hlm. 47).

Mengenai jabatan *perbekel* (kepala desa) langsung di bawah *penggawa,* yang tugasnya mengurus bidang administrasi pemerintah, pencatatan penduduk, dan dapat menjadi saksi dalam suatu transaksi, misalnya dalam pengibahan tanah dan perkawinan. Di bawah *perbekel* ada jabatan *kelian* yang memimpin suatu *banjar*. Tentang tugas dan fungsi *kelian banjar* sudah diuraikan di atas.

Kondisi politik pemerintah berbeda dengan politik ekonomi. Untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya Men Negara dalam menjalankan warungnya menggunakan siasat, yaitu menyuruh anaknya, Ni Negari, melayani para pembeli. Amat manis perlakuannya menerima mereka, senyumnya dibuat-buat supaya lebih menarik hati orang. Semakin banyak orang-orang muda tertarik kepada anaknya semakin deras uang masuk ke dalam peti kayu yang diletakkan Men Negara di bawah balai-balai tempat tidurnya. Kutipan berikut menyatakan hal tersebut:

> Mereka bertiga lalu masuk dan duduk menghadapi meja kejadian itu. Di Negari tampak amat bercahaya rupanya. Matanya bersinar-sinar serta senyumnya dan iman yang teguh kuat. Kopi telah dituang dan masing-masing lalu minum dengan senangnya, kecuali I Made Aseman saja yang tampak kurang senang. Ia tidak berkata-kata, sebab hendak mengetahui cara tuannya mencari bukti itu, Ah, ia berasa sedang ada di medan peperangan dan melihat nyata-nyata betapa musuh mengepung benteng yang telah mulai goyang dan lemah senjatanya.
> Selama I Gusti Made Tusan minum kopi serta ditemani oleh anak gadis itu, Men Negara tidak pernah masuk ke warung, melainkan duduk di dapur mendengarkan kata-kata anaknya yang sebagai sundari ditiup angin sepoi-sepoi basa. Keadaan menteri polisi itu adalah sebagai orang terdakwa yang dibelenggu dengan rantai mas: walaupun bagus rupanya, tetapi sampai kuat akan mengongkong dia, sehingga tidak kuasa bergerak barang sedikitpun, *(SGB,* hlm. 36).

Siasat itu dapat juga melumpuhkan kepribadian I Gusti Made Tusan, manteri polisi, yang mata keranjang. Hal itu terbukti dari per-

buatan Men Negara Menyembelih babi yang ditangkapnya, tetapi tidak pernah ada panggilan dan kantor polisi untuk menerima hukuman. Bahkan gaji bulanan I Gusti Made Tusan hampir habis di warung tersebut berkat cumbu rayu Ni Negari seperti dalam kutipan berikut:

> Lebih sebulan sudah menteri polisi menangkap Men Negara memotong babi tiada bersurat keterangan itu, belum juga ada datang panggilan dari kantor Singaraja untuk melanjutkan perkara itu. Men Negara, demikian juga I Gerundung, tidaklah heran akan hal itu. Jerat Ni Nengah telah mengena, dan tangan menteri polisi yang kukuh serta tahu melakukan kewajiban itu, telah dibelenggu oleh ikatan yang halus tetapi erat, sampai ia tak kuasa lagi menggerakkan pena mengirim orang yang melakukan melanggaran itu ke pintu penjara. *(GBB,* hlm. 39).

**5.3 Kondisi Perekonomian**

Sejak dahulu hampir semua penduduk di Bali hidup dari hasil pertanian. Sebagai masyarakat agraris segala aktivitas perekonomian bersumber pada masyarakat desa. Semua hasil pertanian pada umumnya dipakai untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan untuk kepentingan keagamaan. Dalam *SGB,* tercemin masyarakat pedesaan Binginbanjah yang penduduknya hidup dari hasil pertanian. Hal tersebut terbukti dengan adanya *seka* (perkumpulan) orang tukang panjat kelapa seperti kutipan berikut.

> Kebun kelapa disitu amat luas-luas serta amat suburnya. Tidak berhentinya orang memetik kelapa di daerah desa itu. Tukang panjat kelapa itulah yang selalu datang makan kekedai kecil itu. Banyaknya mereka itu ada du puluh lima orang. Kedai itu seolah-olah perlu bagi mereka saja.Tukang panjat itu gemar akan makanan yang enak-enak. Sedang makan mereka itu bercerita-cerita. Karena itu lama mereka menghadapi makanan itu, dan minum itu. Beberapa botol tuak tiap-tiap hari disitu. Demikian keadaan warung itu. *(SGB.* Hlm. 4).

Kenyataan tersebut bukanlah berarti tidak ada kontak antara desa yang satu dengan yang lainnya dalam bidang ekonomi. Antara desa yang

berdekatan sering terjadi tukar-menukar kebutuhan melalui perdangan bahkan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Hal itu terbukti dalam *SGB* terjadi di desa Binginbanjah. Di desa itu ada dua warung (kedai kopi) yang saling bersaing merebut langganan (para pembeli). Kedua warung kopi itu masing-masing kepunyaan Men Negara dan Pan Gara. Persaingan kedua kedai kopi itu tampak pada kutipan berikut.

> Betapa juga akalnya untuk menghindarkan diri dari kedai kopi Men Negara, musuh atau saingan Pan Gara, iparnya, dalam perdagangan, tidaklah dapat, karena I Gusti Made Tusan sejak itu kerap benar datang ke Binginbanjah. Sudah beberapa kali dipersilahkan tuannya singgah berhentikan lelah ke kedai Pan Gara tidaklah berhasil. Sebabnya karena kurang pemikat, penarik hati sebagai anak Men Negara itu, tidaklah ada pada Pan Gara. Dari itu makin lama makin jadilah permusuhan kedua kedai di tepi jalan kecil itu. *(SGB,* hlm. 40).

Persaingan bisnis antara dua kelompok kedai kopi tersebut menghalalkan segala cara untuk menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal semacam itu diperlihatkan oleh tokoh Men Negara. Untuk memikat para pembeli, Men Negara menggunakan anak gadisnya (Ni Negari) yang cantik itu melayani para tamu (pembeli) yang datang ke warungnya. Siasat itu digunakan untuk mengurus uang para pembeli yang kebanyakan anak muda.Bahkan suatu kebetulan ada orang yang berpangkat yang menjadi langganan warungnya itu bernama I Gusti Made Tusan. Ia adalah seorang polisi yang secara kebetulan menaruh hati kepada Ni Negari. Pada kesempatan itulah Men Negara secara diam-diam menggunakan anaknya sebagai pemikat untuk menguras uang I Gusti Made Tusan. Hal seperti itu dapat dibuktikan pada kutipan berikut.

> Amat senang hati Men Negara melihat I Gusti Made Tusan gelisah semacam itu. Sudah tentu banyak ia akan mendapat uang upah jerih payahnya. Dalam pada itu anaknya masih dapat dipergunakannya pemikat uang orang lain. Pikiran dan maksud I Gusti Made Tusan itu sudah diketahuinya benar-benar; habis manis sepah dibuang. *(SGB,* hlm. 86).

Sebagai masyarakat pedesaan, warga desa Binginbanjah selain hidup dari berdagang juga dari pertanian. Masyarakatnya hidup dari menanam padi. Hal itu ditunjukkan dengan adanya lumbung Men Negara penuh berisi padi seperti kutipan berikut.

> ..." Sungguhpun demikian mereka datang juga kesitu makan minum sebagai biasa juga, tetapi mereka duduk di bawah lumbung Men Negara yang penuh sesak dengan padi." *(SGB,* hlm. 41).

Di samping adanya persawahan untuk menanam padi di desa Binginbanjah terdapat pula ladang pohon kelapa yang lebat. Oleh karena itu, desa Binginbanjah sebagai tempat kisah awal cerita *SGB* merupakan desa yang amat subur. Kesuburan pohon kelapa yang tumbuh di sekitar desa itu memberikan peluang bagi *seka* (kelompok) panjat kelapa melakukan pekerjaannya. Hal itu seperti tampak pada kutipan berikut.

> "Kita mulai dari sebelah selatan," kata Ida Gde Suamba kepada Wayan Sempir, seorang tukang panjat yang masih muda dan kuat badannya, "ingat jangan tergesa-gesa memetik. Sambilkan juga membersihkan pohonnya dan daunnya yang kering."
>
> Pagi itu ramai mereka bekerja, seolah-oleh hendak mengejar hari kemarin yang lalu dengan cuma-cuma saja. Di sana-sini tersirak kelapa yang jatuh dengan gemuruhnya, orang yang menjaga berseru-seru memanggil pengupas, tiga puluh orang banyaknya. Mereka itupun merayap sebagai semut, mengupas segala kelapa yang telah dikumpulkan oleh tujuh orang tukang jaga." *(SGB,* hlm. 25).

Sistem ekonomi tradisional di Bali erat sekali hubungannya dengan tata kehidupan masyarakat desa. Ikatan masyarakat cukup kuat dan setiap anggota masyarakat harus tunduk kepada *krama desa* (keanggotaan desa). Misalnya, jika sewaktu-waktu tenaga mereka diperlukan untuk kepentingan desanya seperti: gotong-royong, memperbaiki *pura Kahyangan Tiga,* dan jalan mereka harus bekerja secara sukarela yang disebut dengan *ngayahang desa* (bekerja untuk desa). Jika mereka tidak datang

akan dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku.

Untuk kepentingan kemakmuran desa, muncul organisasi-organisasi sosial dalam lapangan ekonomi pertanian yang oleh masyarakat Bali disebut dengan *seka* (baca: seke). *Seka* adalah suatu kelompok sosial dibentuk berdasarkan kriteria yang tunggal dan selektif, dicurahkan untuk mencapai tujuan sosial tertentu dan biasanya agak khusus, seperti keagamaan, eknomi, atau apa saja yang bergerak di bidang kehidupan manusia (Clifford Geertz dalam S. Supomo, 1973:39). Ikatan *seka* terbina oleh adanya tujuan bersama dan norma-norma yang ditetapkan dan disepakati bersama. Eksistensi suatu *seka* ada yang bersifat sementara (dibentuk dalam waktu dan keadaan tertentu dan kemudian bubar) dan ada juga bersifat permanen (keanggotaannya diwariskan melalui beberapa generasi turun-temurun). Setiap anggota *seka* mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nilai kesetiaan *seka* menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi; diskriminasi peranan berdasarkan faktor luar tidak dibenarkan.

Menurut Clifford Geertz (S. Supomo, 1973:90) tipe pengelompokan ekonomi di Bali yang didasarkan atas *seka* dapat dibagi menjadi lima katagori utama yaitu: (1) *penyungsung* (jemaah) *pura,* (2) kesatuan tempat tinggal, (3) masyarakat pengairan dan pertanian, (4) kelompok kekerabatan, dan (5) perkumpulan sukarela. *Seka* tipe pertama mempunyai tujuan utama dalam bidang keagamaan; tipe kedua mempunyai tujuan di bidang politik. Namun, kedua tipe tersebut mempunyai implikasi-implikasi ekonomi yang penting dan sering melaksanakan tugas khusus yang bersifat ekonomis, sedangkan pada ketiga tipe yang lain tujuan ekonomi yang menonjol. Sesungguhnya hampir semua kehidupan ekonomi di Bali terealisasi lewat salah satu dari *seka-seka* tersebut. Pada umumnya semua *seka* itu bergerak juga dalam bidang ekonomi pertanian. Kegiatan ekonomi yang bersifat perorangan masih agak langka, jika ada itu pun hanya bergerak dalam bidang terbatas dalam kehidupan, seperti: membuka warung kopi, warung nasi, dan warung kecil lainnya. Keadaan seperti itu tersurat juga dalam *SGB* yaitu usaha Men Negara di desa Biningbanjah membuka warung kopi sambil menjual nasi.

*Seka penyungsung* (jemaah) *pura* terdiri atas sekelompok orang yang berkewajiban melakukan persembahyangan dalam sebuah *pura.*

Dalam penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan dan pemeliharaan bangunan *pura* pasti menyangkut masalah dana atau keuangan. Kewajiban keuangan ini dapat dipenuhi, antara lain, dengan menetapkan sumbangan wajib bagi para anggotanya. Di samping itu, masalah biaya sering dipenuhi dengan semacam kegiatan ekonomi secara kolektif oleh seluruh jemaah yang hasil kegiatannya digunakan untuk membiayai perbaikan yang perlu atau apa saja yang dibutuhkan bagi keperluan *pura*. Biasanya *seka* kolektif yang paling warja adalah dibentuknya *seka manyi* (menuai padi) oleh para anggota jemaah untuk menuai beberapa bidang sawah secara bersama-sama. Ongkos hasil menuai itu dimasukkan ke dalam kas *seka* yang nantinya digunakan untuk kepentingan di *pura* tersebut.

Dengan kondisi seperti itulah tercermin suatu kesatuan dalam diri *seka* tersebut sehingga di antara anggotanya terjalin suatu hubungan yang sangat erat, sedangkan bagi anggota yang melanggar aturan-aturan dalam *seka* dapat dikeluarkan dari keanggotaan atau dikenakan sanksi. Dari kenyataan itulah, kasus perpindahan agama Petrus Sudana yang diputuskan *Balai Kertha*, tidak mendapat warisan keluarga seperti terungkap dalam *SGB* sebagai berikut.

> "Bagaimana bunyi putusan itu?"
> Bahasa Petrus Sudana, saudara hamba, tidak boleh menerima waris orang tua hamba. Sebabnya pertama: karena yang meninggalkan waris itu belum *diaben*, dan karena itu ahli waris belum boleh membagi-bagi pusakanya. Kedua, karena Petrus Sudana menjadi Kristen, sudah meninggalkan agamanya yang asli." *(SGB*, hlm. 63).

Atas dasar pertimbangan masalah adat, setiap warga desa yang (asalnya) memeluk agama Hindu wajib memikul tanggung jawab untuk kepentingan tempat-tempat pemujaan. Misalnya *Sanggah* atau *Merajan* yaitu tempat pemujaan untuk keluarga, *Pura Panti* atau *Penataran* yaitu tempat pemujaan untuk kelompok warga, dan *Pura Kahyangan Tiga* yaitu tempat pemujaan untuk masyarakat desa, serta *Pura Sad Kahyangan Jagat* yaitu tempat pemujaan untuk umum.

*Seka* yang berdasarkan wilayah (kesatuan tempat tinggal yang paling dasar di Bali adalah *banjar*. Suatu *banjar* anggotanya terdiri dari sepuluh sampai seratus (bahkan ada yang lebih) kelompok rumah tangga,

tersusun menurut pola tempat tinggal yang memusat. Setiap *banjar* memiliki tempat pertemuan yang disebut *Balai Banjar*. Setiap bulan (tiga puluh lima hari) sekali warga *Banjar* mengadakan pertemuan atau *sangkepan* yang dipimpin oleh pimpinan warga *banjar* yang disebut *kelian*. Tugas *kelian banjar* memang cukup berat dari yang bersifat ekonomi, sosial, keagamaan, sampai di bidang keamanan. Tugas yang diembannya itu betul-betul penuh pengabdian karena ia tidak mendapat gaji. Kenyataan itu terungkap dalam pernyataan di bawah:

> "Jika emak pergi saya hendak menumpang juga minta tolong membelikan I Negara beberapa kancing baju. Besok ia akan pergi ke kantor mengantarkan pesakitan. Wah, tidak mudah jadi *kelian*. Gaji tidak dapat, tetapi pekerjaan banyak dan berat, sehingga ia tidak sempat ke sawah lagi." *SGB*, hlm. 12).

*Banjar* itu biasanya memiliki tanah-tanah pekarangan yang meliputi seluruh wilayahnya, karena itu dapat memungut pajak, menetapkan denda, mengasingkan orang-orang yang bersalah, serta berhak menyuruh warga *banjar* mengerjakan tugas-tugas untuk kepentingan bersama. Misalnya membangun bangunan umum seperti tempat ibadah atau memperbaiki jalan-jalan di wilayah *banjar* bersangkutan. *Banjar* merupakan suatu kesatuan dengan arti politik yang paling umum. Namun demikian, *banjar* juga melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Biasanya membentuk *seka* menuai untuk mengisi kas. Ada kalanya *banjar* memiliki tanah persawahan yang digarapkan pada warganya yang tidak mempunyai tanah pertanian. Tanah itu biasanya digarap secara bergilir agar hasilnya dapat dinikmati secara merata. Jika kas *banjar* memiliki persediaan, warganya diperbolehkan meminjam uang atau padi dari kas dengan bunga yang rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *banjar* itu mengikat warganya dalam suatu kesatuan politik, ekonomi, agama, dan masalah sosial yang lain.

*Seka* pengairan dan pertanian sangat penting artinya dalam masyarakat agraria. Masyarakat Bali telah mengenal sistem irigasi sejak dulu yang disebut *subak*. *Seka subak* bertugas mengatur pengairan di sawah. Pimpinan *subak* disebut *pekaseh*. Pekaseh dalam menjalankan

tugasnya dibantu oleh (a) *penyaringan* (juru tulis), (b) *sedahan tembuku* yang bertugas mengurus pajak dan bendahara, dan (c) *juru arah* yang bertugas memberikan warga *subak* apabila ada pertemuan atau hal-hal yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada warga *subak*. Tugas warga *subak* antara lain membuat bendungan, membagi air dengan membuat selokan-selokan, dan menjaga air tersebut. Penghasilan *subak* biasanya didapat dari denda-denda pelanggaran, misalnya dari denda pencurian air dan dari warga *subak* yang melanggar peraturan (disebut *sima)* yang telah ditentukan. Oleh karena itulah, pengairan sawah di Bali jarang ditemukan pencurian air, sekalipun tempat sawah yang akan diairi letaknya sangat sulit.

Di samping mengatur air, fungsi *subak* yang lain adalah meng-koordinasi penanaman dan menyelenggarakan upacara keagamaan, khusus di *pura* milik warga *subak* yang disebut *Pura Ulun Carik* (tempat pemujaan *Dewa* kemakmuran atau kesuburan yaitu *Dewi Sri)*. Di samping itu, *subak* menentukan kapan orang mulai menanam padi dan palawija.

Warga *subak* adalah semua orang yang sawahnya diairi dari satu saluran pengairan atau bendungan yang menuju sawahnya. Air yang mengalir dari satu bendungan mungkin dapat mengairi persawahan pada beberapa desa. Oleh karena itu, warga *subak* berarti dari berbagai *banjar* misalnya *seka* menanam padi, memetik kelapa, memburu tupai dan menyiang padi. Nilai yang tertanam dalam *seka* itu adalah bersifat teknis, ikatan persahabatan, dan saling percaya sesama anggota. Jenis *seks* sukarela yang terungkap dalam *SGB* adalah *seks* panjat kelapa, identik dengan jenis perkebunan di desa Binginbanjah, yaitu kelapa, seperti pernyataan di bawah:

> Kebun kelapa di situ amat luas-luas serta amat suburnya. Tidak berhentinya orang memetik kelapa di daerah itu. Tukang panjat kelapa itulah yang selalu datang makan ke kedai itu. Banyaknya mereka itu ada dua puluh lima orang. *(SGB,* hlm. 10).

## 5.4 Lembaga Masyarakat Bali

Sesuai dengan judulnya, dalam novel *Sukreni Gadis Bali* tercermin latar belakang sosial budaya, yaitu latar belakang sosial budaya masyarakat Bali. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri adanya pranata-pranata sosial yang mengatur kehidupan masyarakat Bali itu. Pranata sosial itu di antaranya berkaitan erat dengan lembaga masyarakat Bali. Berkaitan dengan latar belakang budaya yang tercermin dalam karya sastra itu, secara tegas Teeuw (1983:11) berpendapat bahwa karya sastra tidak pernah lahir dari kekosongan budaya. Latar belakang sosial budaya Bali yang tercermin dalam *SGB* tidak bisa dilepaskan dari segi historisnya. Sosial budaya dalam *SGB* yang tercermin sekitar tahun tiga puluhan itu tentu berbeda dengan sosial budaya masyarakat Bali pada zaman sekarang ini.

Sesungguhnya, latar belakang sosial budaya ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek sosial dan budaya. Kedua aspek ini tidak mungkin dapat dipisahkan meskipun dapat dibedakan. Yang dimaksud dengan latar belakang sosial adalah latar belakang kemasyarakatan yang meliputi lembaga masyarakat dan sistem pelapisan masyarakatnya, sedangkan latar belakang budaya adalah latar belakang sistem nilai-nilai konseptual yang membangun masyarakat tersebut.

Lembaga masyarakat, sistem pelapisan masyarakat, dan sistem nilai budaya yang membangun masyarakat Bali yang tercermin dalam *SGB* sebagai latar belakang sosial budaya dapat diungkap seperti di bawah ini.

Dalam sistem kemasyarakatan di Bali sejak dahulu dikenal adanya suatu lembaga sosial yang disebut *desa adat*. Kata *adat* bukan berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa daerah di Indonesia, melainkan berasal dari bahasa Arab yang menurut Van Vollenhoven berarti kebiasaan (B. Muhammad, 1978:11). Di Bali kata *adat* diperkirakan mulai dikenal sejak zaman penjajahan Belanda pada permulaan abad XX, yang diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat yang berlangsung turun-temurun. Demikian juga dengan istilah *desa adat,* yang baru populer sejak zaman Pemerintahan Belanda untuk membedakan dengan *desa dinas* yang dibentuk oleh Belanda.

Terwujudnya suatu *desa adat* di Bali bukan saja merupakan persekutuan teritorial dan persekutuan hidup atas kepentingan bersama

dalam masyarakat, tetapi merupakan persekutuan dalam kesamaan kepercayaan memuja Tuhan. Dengan kata lain, identitas *desa adat* di Bali mempunyai tiga unsur yaitu: wilayah, masyarakat yang menempati wilayah itu, dan tempat suci untuk memuja *Sang Hyang Widhi*/Tuhan sebagai pujaan bersama. Pernyataan itu senada dengan pendapat Ida Bagus Rata (1988:19) yang mengatakan bahwa *desa adat* adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan bersama dalam bermasyarakat dan persekutuan kesamaan keyakinan memuja Sang Hyang Widhi/Tuhan.

Suatu *desa adat* di Bali memiliki aturan adat tersendiri yang tertuang dalam *awig-awig* (seperangkat aturan) *desa adat*. Aturan-aturan yang tertuang dalam *awig-awig desa adat* itu dijadikan pedoman untuk mengatur segala perilaku kehidupan warga desa yang tinggal dalam wilayah desa bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi dan peranan *desa adat* di Bali itu mengatur warga masyarakat desa di bidang adat dan agama. Dalam menjalankan fungsinya itu, tiap *desa adat* mempunyai kedudukan yang bersifat otonom dalam arti setiap *desa adat* berdiri sendiri menuruti *awig-awig* yang telah dirumuskan, dan dilaksanakan, dijadikan pedoman bertindak oleh segenap warga desa yang bermoisili dalam suatu wilayah desa bersangkutan.

*Desa adat* secara struktural membawahi *banjar adat* (pada umumnya lebih dari satu). *Banjar adat* adalah kelompok masyarakat yang merupakan persekutuan hidup sosial baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tujuan *banjar adat* adalah: (1) saling bantu-membantu sesama anggota *banjar* dalam hal perkawinan, kematian, upacara *ngaben* (upacara pembakaran jenazah), dan yang bersifat suka dan duka lainnya; (2) ambil bagian dalam hal perbaikan *pura kahyangan tiga,* yaitu pura *desa, puseh,* dan *dalem,* dan upacara persembahyangan; (3) mengadakan aktivitas bersama dalam lapangan perekonomian untuk menambah pendapatan *banjar;* dan (4) mengadakan aktivitas bersama dalam upacara keagamaan (Rivai Abu, ed. 1981: 57-58).

Atribut pokok dalam *Desa Adat* di Bali terwujud dalam konsepsi *Tri Hita Karana.* Secara etimologis istilah itu terbentuk dari tiga kata yaitu: *tri* artinya tiga, *hita* artinya kemakmuran, dan *karana* artinya sebab. Jadi, istilah tersebut berarti tiga penyebab kemakmuran yaitu:

1) *pelemahan* yaitu wilayah sebuah *desa adat* atau tanah *ulayat* yang merupakan tempat pemukiman warga desa termasuk pekarangan, persawahan, dan ladang yang mempunyai batas-batas yang jelas dengan *desa adat* yang lain;

2) *pawongan* yaitu seluruh warga desa yang bertempat tinggal di dalam wilayah *desa adat*, disebut *krama desa*. Sebagai warga inti adalah setiap pasangan yang telah berkeluarga; dan

3) *parhyangan* atau tempat suci yaitu tempat untuk memuja *Sang Hyang Widhi*/Tuhan dengan manifestasinya yang diwujudkan dalam *Pura Kahyangan Tiga,* yaitu Pura Desa, tempat pemujaan *Batara Brahma* yaitu manifestasi *Sang Hyang Widhi*/Tuhan yang fungsinya menciptakan alam beserta isinya; *Pura Puseh,* tempat pemujaan *Batara Wisnu* yang fungsinya sebagai pelindung dan pemelihara; dan *Pura Dalem,* tempat pemujaan *Batara Siwa* yang fungsinya melebur ke asalnya disbut *pralina* (Rivai Abu (Ed), 1981:48 dan Ida Bagus Rata, 1988:20).

Implikasi dari ketiga unsur itu adalah *krama desa* sebagai kelompok manusia yang bermasyarakat memerlukan alam tempat berpijak dalam menempuh hidupnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa alam. Oleh karena itu, dalam *desa adat* terjadi hubungan yang serasi antara *krama desa* dengan wilayahnya (tempat mereka tinggal). Demikian juga, manusia yang hidup di dalam suatu wilayah *desa adat* tidak bisa hidup menyendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya yang juga sama-sama mendiami wilayah *desa adat* yang bersangkutan. Oleh karena itu, terjadi hubungan harmonia antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya di dalam suatu *desa adat* karena diikat oleh faktor kesamaan tempat tinggal dalam suatu wilayah dan faktor kebutuhan manusia yang memerlukan komunikasi harmonis dengan sesamanya. Manusia hidup tidak cukup dengan kebahagiaan lahiriah saja melainkan memerlukan kesejahteraan rohani. Di dalam memperoleh kesejahteraan rohani, manusia berkiblat kepada Tuhan Yang Mahaesa/*Sang Hyang Widhi* sebagai sumber kesejahteraan rohani. *Sang Hyang Widhi* adalah pemberi

perlindungan kepada manusia, pemberi tuntutan dalam manusia menempuh kehidupan, dan pemberi kebahagiaan lahir dan batin. *Sang Hyang Widhi* adalah asal dan tujuan akhir dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, *Sang Hyang Widhi* selalu dimohon agar mengayomi kehidupan manusia baik secara perorangan maupun secara berkelompok dalam *desa adat*. Atas dasar pandangan ini, setiap *desa adat* di Bali mempunyai *Pura Kahyangan Tiga* seperti disebutkan di atas.

Bertolak dari pandangan di atas, maka di dalam mewujudkan rasa aman, tenteram, damai, serta sejahtera lahir dan batin, dalam kehidupan *desa adat* dilandasi oleh tiga hubungan yang harmonis yaitu: (1) hubungan manusia dengan alam atau hubungan *krama desa* dengan wilayah *desa adat, (2)* hubungan manusia yang satu dengan yang lain dalam *desa adat,* dan (3) hubungan *krama desa* dengan *Sang Hyang Widhi*/Tuhan sebagai pencipta, pelindung, dan melebur kembali ke asalnya atas alam beserta isinya. Eksistensi *Tri Hita Karana* inilah yang melandasi kehidupan *desa adat* di Bali.

Perlu diungkapkan bahwa dengan tercakupnya unsur Ketuhanan di dalam kehidupan *desa adat* di Bali, desa adat tersebut mencakup pula pengertian sosio-religius. Oleh karena itu, implikasi antara adat dan agama Hindu di Bali adalah pekat sekali sehingga sulit memisahkan secara tegas unsur-unsur adat dengan unsur-unsur agama karena adat-istiadat di Bali dipancari oleh agama Hindu dan aktivitas agama Hindu didukung oleh adat-istiadat di masyarakat.

Sistem keanggotaan *desa adat* yang didasarkan pada penempatan tanah wilayah desa bagi warga disebut *karang ayahan desa,* dan yang tidak didasarkan pada *karang ayahan desa* yaitu bagi warga (yang sudah berumah tangga) yang berkeinginan mengorganisasi diri ke dalam *desa adat*. Berdasarkan kerangka dasar teruwujudnya suatu *desa adat* seperti tersebut di atas, maka setiap warga *desa adat* berkewajiban melaksanakan *ayahan desa* yaitu tugas dan kewajiban *krama desa*. Seperti bekerja bakti memperbaiki/membangun pura milik *desa adat,* menyelenggarakan upacara *Odalan (Dewa Yadnya)* di pura milik *desa adat,* dan melaksanakan upacara *Mecaru (Bhuta Yadnya)* yang dilaksanakan setahun sekali sehari sebelum umat Hindu merayakan hari raya *Nyepi* (tahun Baru *Saka*). Di samping itu, warga *desa adat* wajib menta ati peraturan-

peraturan *(awig-awig)* yang berlaku dalam *desa adat* baik tertulis maupun tidak tertulis *(pasuara)*. Warga *desa adat* berhak memilih dan menjadi kepala *desa adat* (*bendesa*) dan *prajuru* (pembantu *bendesa)*, ikut dalam *sangkepan* (rapat) *desa adat,* dan ikut serta dalam pemerintahan desa *adat*.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa adat itu merupakan aturan-aturan atau kebiasaan yang disepakati bersama sebagai aturan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap adat, warga dapat dikenakan tindakan atau sanksi yang dilaksanakan oleh *bendesa*. Sanksi adat ada yang berwujud denda, dan ada yang bersifat psikologis seperti: disisihkan dari masyarakat, tidak diajak bicara, dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat. Semua itu merupakan sanksi sosial. Dengan adanya sanksi adat, *desa adat* tersebut mempunyai hukum adat. B. Muhammad (1978:37) mengatakan bahwa *desa adat* adalah suatu masyarakat hukum desa. Masyarakat hukum desa adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup, dan sistem kepercayaan yang sama.

Eksistensi hukum adat di Bali secara mendasar berpedoman kepada tiga hal pokok yaitu: (1) upacara umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat dengan lingkungan, (2) upacara menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat, dan (3) menegakkan keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam Ketuhanan (Ketut Artadi, 1987:1). Memang hukum adat di Bali sebagian besar tidak merupakan hukum tertulis.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan adat yang melandasi *desa adat* di Bali, dimungkinkan Petrus Sudana dikenakan sanksi tidak mendapat warisan dari orang tuanya karena sudah beralih agama, seperti pernyataan di bawah:

> "Bahwa Petrus Sudana, saudara hamba tidak boleh menerima waris orang tua, jadi waris orang tua hamba, sebabnya pertama yang meninggalkan waris itu belum diaben, dan karena itu ahli waris belum boleh membagi-bagi pusakanya. Kedua karena Petrus Sudana menjadi Kristen, sudah meninggalkan agamanya yang asli". *(SGB,* hlm. 45).

Perlu diketahui, Pengadilan *Kertha* pada masa pemerintah jajahan Belanda di Bali memutuskan bahwa seseorang yang beralih agama dari Hindu ke agama lain tidak mendapat warisan. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan *Kertha* memakai pertimbangan hukum bahwa orang yang pindah agama dari agama Hindu ke agama lain tidak mau lagi membiayai upacara-upacara keagamaan yang ada hubungannya dengan pewaris. Keputusan hukum itu pernah diputuskan pada pengadilan *Kertha* di Badung (Denpasar sekarang) tanggal 3 Agustus 1933 dan tanggal 21 Februari 1939, serta pengadilan *Kertha* di Tabanan tanggal 18 Juli 1939 (Ketut Artadi, 1987:34).

Desa adat sebagai desa *dresta* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di daerah Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* (kahyangan desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat di samping sebagai kesatuan masyarakat hukum, juga sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara tidak langsung di bawah camat. Desa adat berfungsi dan berperan mengatur kehidupan masyarakat desa adat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang dinamakan *prajuru* desa adat.

Desa adat, yang dikepalai oleh kepala desa adat memiliki hak, wewenang, dan kewajiban, sesuai dengan pasal 10 Perda Bali, nomor 5 tahun 1979 adalah sebagai berikut.

(1) Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
(2) Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan umum pemerintahan desa;
(3) Menyelenggarakan urusan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
(4) Menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan perdamaian di dalam masyarakat tiap desa adalah kepala desa. Hal itu disebabkan ketika zaman dulu (penjajahan Belanda), kepala desa adalah juga pemuka adat dan agama, di samping kedudukannya sebagai kepala warga desa seluruhnya. Akan tetapi, bukan berarti kepala desa itu bukan sebagai pimpinan agama dan atau adat. Di Bali, *kepala desa dinas* bertugas melaksanakan urusan kedinasan atau pemerintahan sebagai organisasi terendah di bawah camat. Adapun urusan yang berkaitan dengan adat dan agama diselenggarakan oleh desa adat atau *desa pakraman*.

Memperhatikan kenyataan di atas, *kepala desa dinas* tetap mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan dan bertanggung jawab di bidang kemasyarakatan dan pembangunan. Hal itu berarti masalah agama dan adat telah tercakup di dalamnya. Itulah sebabnya di dalam praktek dan penanganan masalah adat (agama) antara *desa dinas* dengan desa adat terjalin suasana koordinatif. Demikian juga dalam kenyataannya warga desa dapat membawa masalahnya kepada kepala dinas atau pun kepada *prajuru desa adat*.

Berdasarkan pasal 11 Perda Bali nomor 06/1986 tugas-tugas *prajuru desa adat* Desa Adat adalah:

(a) Melaksanakan *awig-awig* desa adat;
(b) Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan bagi desa adat, sesuai dengan sastra;
(c) Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa adat;
(d) Mengembangkan kebudayaan daerah dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional;
(e) Membina dan mengkoordinasikan masyarakat hukum adat mulai dari keluarga berdasarkan adat-istiadat yang berlaku pada setiap desa adat, guna meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.
(f) Mewakili desa adat dan bertindak atas nama dan untuk desa adat dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan; dan

(g) Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan harta dan pusaka desa adat.

Kewenangan *prajuru desa adat* sebagai hakim desa adalah kewenangan asli berdasarkan hukum adat. Menurut Soepomo (1988), hakim desa berhak memeriksa semua perkara menurut hukum adat termasuk yurisdiksinya. Perkara itu pada umumnya perkara yang lazim sebagai urusan desa. Misalnya, perkara antarteman sedesa yang berkenaan tentang tanah, perkawinan, maskawin, urusan keluarga lainnya, dan perbuatan-perbuatan pidana terhadap tatanan desa.

Berdasarkan hukum adat, ternyata hakim desa atau *prajuru desa adat* tidak saja berwewenang menangani perkara-perkara yang bersifat keperdataan tetapi juga bersifat publik. Misalnya, memberhentikan sebagai anggota *(krama) desa adat*, dan juga dapat menjatuhkan hukuman atau *pamidanda*. Sesuai dengan undang-undang *(awig-awig)* desa yang tertulis, *prajuru desa adat* menjatuhkan hukuman atau memberhentikan menjadi *krama desa adat* antara lain: (a) atas permintaan sendiri, karena pindah ke daerah (desa) lain, (b) diberhentikan, karena tidak bisa menepati aturan-aturan yang berlaku.

Adapun yang bertindak sebagai hakim desa di dalam memberikan sanksi kepada *krama* (anggota) desa adat, sangat bergantung dari siapa yang menjadi *prajuru desa adat* dan bagaimana sistem pemerintahannya. Secara historis, demografi Desa Adat di Bali dibedakan menjadi Desa Adat Bali dataran dan Desa Adat Balingga. Warga desa Bali dataran yang menjadi unsur Prajuru Desa Adat menurut Perda Daerah Bali No. 6 tahun 1986 adalah sebagai berikut:

(1) *Bendesa/Kelihan Adat, (prajuru desa adat);*
(2) *Petajuh,* (wakil Bendesa Adat);
(3) *Penyarikan,* (juru tulis);
(4) *Kasinoman,* (juru arah);
(5) *Pemangku,* (orang yang membidangi urusan upacara agama di Pura); dan
(6) *Pesedahan/Petengah,* (bendahara)

Adat-istiadat yang dikembangkan serta dijunjung oleh masyarakat Bali merupakan pelaksanaan ajaran agama sehingga adat-istiadat dirasakan oleh orang Bali sebagai cara hidup menurut agama Hindu. Pelaksanaan adat dan sangsi adat selalu berpedoman pada asas-asas sebagai berikut.

(a) Penerapan hukum dan sanksi adat harus selalu mengaitkan aspek kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat;
(b) Penerapan huku dan sanksi harus merupakan upaya pendidikan sehingga menumbuhkan usaha penyadaran dan tuntunan;
(c) Pelaksanaan norma dan sanksi harus secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran; dan
(d) Selalu memperhitungkan keseimbangan dan kesucian desa yang mencakup hubungan antarmanusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan lingkungannya.

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat, hukum adat mempunyai fungsi membantu pemerintah desa untuk kelancaran pembangunan di segala bidang terutama bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, peranan dan fungsi *Desa Adat* diperinci sebagai berikut.

(1) Membina dan mengembangkan nilai-nilai Agama Hindu dan kaidah adat *(dresta)* di tengah-tengah masyarakat *desa adat*;
(2) Menyelesaikan sengka-sengketa *desa adat*;
(3) Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap status hak dan kewajiban anggota masyarakat yang bersangkutan menurut hukum adat yang berlaku;
(4) Mengembangkan kebudayaan masyarakat *desa adat* dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah dan memperkaya khazanah kebudayaan nasional;
(5) Membina dan melestarikan adat-istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa; dan
(6) Menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat baik dalam hubungan antara masyarakat sendiri, hubungan masyarakat dengan alam sekitarnya, dan hubungan anggota

masyarakat dengan Maha Pencipta yang dikenal dengan filsafat *Tri Hita Karana.*

Dari fungsi dan peran Desa Adat tersebut, tampak *desa adat* memiliki kekhususan dibandingkan dengan kedudukan dan peranan *desa dinas*. Meskipun demikian, warga masyarakat adat adalah juga warga desa dinas. Karena disebabkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan warga *desa adat* terlibat di dalamnya. Jadi, *desa adat* dan *desa dinas* kedudukannya adalah sejajar. Hubungan kerja antara *prajuru desa adat* dengan kepala desa/kepala kelurahan adalah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Seperti telah dikemukakan di depan, adat Bali bersumber pada ajaran-ajaran agama Hindu. Hal itu berarti bahwa keseluruhan adat Bali, baik yang berhubungan dengan aspek sosial budaya maupun aspek hukumnya, harus bertitik tolak dari ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang terdapat di kalangan masyarakat Hindu sendiri. Nilai budaya itu berkaitan erat dengan ajaran yang disebut dengan *Tri Hita Karana.* Ajaran *Tri Hita Karana* seperti telah disinggung di muka yakni adanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan wilayah tempat permukiman dan alam sekitarnya, dan antara manusia dengan sesamanya, akan memungkinkan mereka untuk menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan yang disebut *moksa* dan *jagadhita.* Dengan demikian, secara umum ada Bali itu diarahkan untuk membimbing warga adatnya melaksanakan "Dharma Agama" yaitu mengamalkan ajaran agama Hindu seutuhnya dan mengamalkan "Dharma Negara" atau menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai warga negara.

Dalam rangka pembinaan *desa adat*, perlu adanya *awig-awig* (aturan) tertulis yang harus ditegakkan oleh *krama desa adat*. Hal itu dimaksudkan agar warga desa adat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam adat mereka. Dengan adanya *awig-awig* itu diharapkan berkurangnya sengketa-sengketa adat yang terjadi di lingkungan masyarakat desa. Hal itu akan dapat memberi dorongan untuk memperbaiki dan membangun sarana-sarana adat dan agama yang mereka butuhkan. Misalnya, pembangunan pura *kahyangan tiga/kahyangan desa,*

*bale banjar/bale desa,* pembentukan *sekehe-sekehe* (perkumpulan) di bidang seni tabuh, seni tari, seni suara tradisonal baik yang bersifat sakral maupun hiburan seperti *kidung, kakawin,* dan *garuritan* (puisi).

Dalam rangka upaya melestarikan tatanan nilai adat Bali, menurut Surpha (1997:12) perlu adanya usaha-usaha kegiatan sebagai berikut.

(1) Dalam bidang hukum, berusaha melestarikan antara adat dengan hukum positif yang berlaku secara nasional;

(2) Antara adat dengan ajaran agama Hindu semakin dipadukan dengan berpedoman kepada ejaan agama Hindu yang meliputi *tatwa, sila sasana,* dan upacara *yadnya*; dan

(3) Mendorong warga adat melalui motivasi adat dan ajaran-ajaran agama Hindu, agar mereka lebih mampu mengembangkan potensi, daya, dana yang dimilikinya guna meningkatkan kegiatan di bidang sosial budaya dan sosial ekomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan pendapat Surpha tersebut, usaha pelestarian desa adat di Bali menurut Darmayuda (1997:24) perlu dilakukan karena desa adat sebagai warisan leluhur adiluhung terus mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan masyarakat pendukungnya. Akan tetapi, perkembangan dan perubahan itu tidak lepas dari dasar *tatwa* (filsafat) Hindu yang memberi nilai dan konsepsi pada kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, proses modernisasi dan globalisasi tidak akan menghilangkan jati diri *desa adat* karena pelestarian kebudayaan daerah merupakan komitmen nasional yang telah memiliki strategi yang mantap serta formal.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Darmayuda bahwa dalam tatanan nasional, masyarakat hukum adat tetap diakui eksistensinya. Demikian juga halnya dengan *desa adat* sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang dilandasi oleh ajaran agama Hindu tetap akan lestari dengan perangkat otonominya. Namun, kedudukannya tidak akan beralih menjadi desa yang berada langsung di bawah camat, tetapi sebagai organisasi pemerintah yang secara tidak langsung berada di bawah camat.

Dengan demikian, *desa adat* dengan desa administratif (dinas) memiliki kedudukan yang sejajar.

### 5.5 Sistem Pelapisan Masyarakat Bali (Struktur Kelompok Sosial)

Kehidupan manusia dalam kelompok sosial seperti halnya kehidupan dalam *desa adat*, pada hakikatnya mewujudkan sejumlah hak dan kewajiban tertentu bagi orang-orang yang menempati kedudukan tersebut. Kedudukan atau status seperti itu dalam setiap komunitas, di samping berbeda secara horizontal juga berbeda secara vertikal. Perbedaan horizontal menekankan pada aspek jenis kedudukan yang satu dengan yang lain, yang akan mewujudkan gejala difensiasi sosial. Perbedaan vertikal menekankan pada aspek tinggi rendahnya kedudukan sehingga tercipta peringkat dalam kedudukan, yang akan mewujudkan gejala stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Oleh karena itu, ada kecenderungan bahwa orang-orang yang tergolong dalam lapisan tertentu memiliki pola hidup tertentu yang berbeda dengan lapisan yang lain, baik menurut persepsi orang-orang dari dalam lapisan tersebut maupun dari kecamatan pandangan seluruh warga suatu komunitas (Koentjaraningrat, 1974:174).

Sistem pelapisan sosial ada pada setiap zaman dari kehidupan suatu bangsa ataupun dari kehidupan suatu kelompok sosial yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kalau dilihat dari dimensi waktu, sistem pelapisan masyarakat Bali didominasi oleh kebudayaan Hindu-Jawa yang berkembang bersamaan dengan agama Hindu di Pulau Bali. Dalam kehidupan masyarakat Bali masa lalu sudah dikenal adanya suatu sistem pelapisan yang menunjukkan ciri-ciri pelapisan sosial resmi, yaitu suatu sistem pelapisan yang sudah tegas. Ada warga suatu lapisan itu mendapat sejumlah hak dan kewajiban yang termasuk ke dalam adat dan dilindungi oleh hukum adat atau hukum yang berlaku (Rivai Abu, ed. 1981:61).

Untuk menunjukkan terwujudkan pelapisan sosial resmi seperti itu di dalam masyarakat Bali dapat dirunut dari faktor keaslian, senioritas, kekuasaan, dan keturunan. Dari sifat keaslian sebagai dasar terjadinya pelapisan sosial, sering terlihat dalam masyarakat yang hidup dalam bercocok tanam menetap. Penduduk asli dianggap sebagai lapisan tertinggi dan penduduk pendatang dianggap sebagai lapisan yang lebih rendah.

Kenyataan itu dalam masyarakat Bali masih ditemukan dalam masyarakat Bali-Kuna yang kehidupannya dari hasil bercocok tanam, seperti di desa Tenganan Pagringsingan (Karangasem).

Dari dasar senioritas dapat dilihat dalam kehidupan suatu komunitas tradisional. Semakin tradisional orientasi kehidupan masyarakatnya, semakin kentara dasar senioritas sebagai dasar pelapisan sosial. Dalam kehidupan seperti itu golongan tua menjadi pusat orientasi dalam masalah adat. Golongan tua menjadi *panutan* dan berperan dalam mengambil keputusan sepanjang menyangkut masalah adat. Kenyataan seperti itu dapat ditemui dalam *paruman* (pertemuan untuk mengambil keputusan) *desa adat* di Bali. Karena kedudukannya itu, golongan tua dikategorikan sebagai golongan yang menempati lapisan sosial tinggi dan golongan muda dianggap berkedudukan lebih rendah.

Faktor kekuasaan dapat juga dipakai dasar pelapisan sosial resmi masyarakat Bali masa lalu. Fenomena ini sangat kentara dalam kehidupan masyarakat Bali waktu berkembang sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Dalam sistem seperti itu keluarga raja dan kerabatnya merupakan suatu golongan tersendiri, yang dikategorikan sebagai golongan bangsawan.

Faktor kekuasaan itu mempunyai implikasi politik, sosial, dan ekonomi bahwa lapisan bangsawan sebagai lapisan tertinggi sering menjadi pusat orientasi (orientasi partikal) dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Masyarakat banyak (rakyat jelata) menempati lapisan terbawah yang segi kehidupannya banyak tergantung pada golongan di atasnya.

Faktor keturunan sebagai dasar pelapisan sosial dalam kehidupan masyarakat Bali, sangat kentara dengan sebutan sistem *wangsa* (keturunan), tetap lebih populer dengan sebutan *kasta*. Dasar pelapisan itu kemungkinan merupakan suatu proses alkulturasi dari sistem *warna* (sifat bakat seseorang) yang berakar pada agama dan kebudayaan Hindu dengan sistem kekerabatan orang Bali yang berdasarkan kepada prinsip keturunan *patrilineal*. Pelapisan menurut dasar keturunan itu dapat dibedakan menjadi empat yaitu: (a) golongan *brahmana*, (b) golongan *ksatria*, (c) golongan *waisia*, dan (d) golongan *sudra*. Golongan *brahmana*, *ksatria*, dan *waisia* menyebut dirinya warga *triwangsa* sebagai

lapisan atas (bangsawan) dalam kehidupan masyarakat Bali, sedangkan golongan *sudra* disebut warga *jaba* (orang kebanyakan) sebagai lapisan bawah.

Keanggotaan dalam suatu *kasta* didasarkan pada prinsip kelahiran/ keturunan. Seorang anak selalu tergolong ke dalam *kasta* ayahnya (prinsip patrilineal) walaupun ibunya berasal dari *kasta* yang berbeda. Misalnya, jika ayahnya berasal dari kasta *brahmana,* semua anaknya berkasta *brahmana,* demikian seterusnya.

Dalam kehidupan masyarakat Bali masa lalu masalah hak antara *kasta* satu dengan yang lainnya agak berbeda, sebagai contoh: hanya golongan *brahmana* yang berhak menjadi *pedanda* (pendeta Hindu), demikian juga yang berhak menjadi penguasa pemerintahan (raja, patih, punggawa) hanyalah dari lingkungan kasta *ksatria.* Biasanya dalam kaitannya dengan hak seperti itu sering tercakup sejumlah hak yang bersifat ekonomi, sosial, keagamaan, politik. Pendek kata konsep *kasta* di masa lalu sering berkaitan erat dengan kewajiban yang mengangkat suatu profesi tertentu. Seperti kastra *brahmana* berkaitan erat dengan kewajiban di bidang keagamaan, kasta *ksatria* di bidang pemerintahan dan pertanahan, kasta *waisia* di bidang perekonomian seperti perdagangan, dan kasta *sudra* berkewajiban di bidang pertanian. Sistem pelapisan yang didasarkan pada keturunan ini tercermin dalam *SGB* terutama yang berkaitan dengan aspek penokohan atau perwatakan dan kondisi sosial budaya masyarakat Bali.

Penduduk Pulau Bali sejak awal mayoritas beragama Hindu. Sistem pelapisan masyarakat Bali yang beragama Hindu mengalami sejarah pertumbuhannya sendiri. Sistem pelapisan ini disebut *wangsa.* Bagi orang yang belum mengetahui pengertian *wangsa, kasta,* dan *warna* (dalam ajaran agama Hindu) ketiga istilah tersebut sering disamakan, tetapi sebenarnya berbeda-beda. Masing-masing istilah memiliki pengertian tersendiri dengan sumber yang berbeda.

Kata *warna* berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata *vri* yang artinya memilih lapangan kerja. *Warna* dalam konsepsi ajaran kemasyarakatan Hindu ditentukan berdasarkan *guna,* yaitu sifat, bakat pembawaan seseorang, dan *karma* yaitu perbuatan atau pekerjaan (Siana, 1989:4). Jadi, kata *warna* mengacu kepada makna pilihan lapangan pekerjaan

sesuai dengan sifat dan bakat pembawaan seseorang, atau pilihan lapangan pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuan (profesi) dalam masyarakat. Dalam kitab *Bagawadgita* (IV, 13) disebutkan bahwa konsepsi *warna* dalam masyarakat Hindu dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yakni *Brahmana, Ksatria, Waisia,* dan *Sudra.* Lebih lanjut dalam kitab *Slokantara,* pasal 36, ayat 78 (I Gusti Ketut Widana, 1989: kolom V. *Bali Post)* dijelaskan asal keempat kelompok itu sebagai berikut.

Kelompok *brahmana* dikatakan lahir dari kepala *Brahma* (Sang Pencipta), yang fungsi dan peranannya untuk menumbuhkan daya cipta rohani umat manusia untuk mencapai ketenteraman hidup lahir dan batin. Di samping itu, berperan juga sebagai guru dari rakyat yang memberi tuntutan moral bagi kehidupan spiritual masyarakat serta menyelenggarakan upacara-upacara keagamaan. Jadi, *warna brahmana* itu adalah golongan atau mereka yang berkecimpung dalam bidang kerohanian. *Warna brahmana* tidak berdasarkan keturunan, melainkan karena mereka mendapat kepercayaan dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut. Dalam *Upadeca* (1982:52) disebutkan bahwa *warna brahmana* itu adalah golongan karya yang setiap orangnya memiliki ilmu pengetahuan suci dan mempunyai bakat kelahiran untuk mensejahterakan masyarakat, negara, dan umat manusia dengan jalan mengamalkan ilmu pengetahuannya dan dapat memimpin upacara keagamaan *(kryawidhiyoga* dan*krya arcana).*

Kelompok *ksatria* dikatakan lahir dari tangan Brahma, yang berfungsi memimpin pemerintah, memanggul tanggung jawab ketatanegaraan, menjaga wilayah sekaligus membawa bangsa dan negara ke dalam suasana aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Mempunyai sifat pemberani, kuat, teguh, iman, ikhlas, berjiwa besar, dan pemaaf dalam menjalankan tugasnya. *Warna ksatria* adalah golongan karya yang setiap orangnya memiliki kewibawaan cinta tanah air, memimpin negara dan umat manusia berdasarkan *dharmanya* (Upadeca, 1982:53).

Kelompok *waisia* dikatakan lahir dari paha *Brahma* yang berfungsi menunjang kesejahteraan masyarakat melalui bidang perekonomian. Dengan kata lain, *warna waisia* itu adalah golongan karya yang setiap orangnya memiliki ilmu pengetahuan suci dan mempunyai bakat

kelahiran untuk mensejahterakan masyarakat, negara, dan umat manusia dengan jalan mengamalkan ilmu pengetahuannya dan dapat memimpin upacara keagamaan *(krya widhiyoga* dan *krya arcana)*.

Kelompok *sudra* dikatakan lahir dari kaki *Brahma* berfungsi sebagai pelayan, pesuruh, atau pembantu. Golongan ini lebih mengandalkan bidang kehidupannya sebagai pekerja-pekerja dengan etos kerja tinggi untuk kemakmuran masyarakat atas petunjuk-petunjuk golongan fungsional lainnya *(Upadeca,* 1982:53).

Posisi vertikal kelompok *warna* di atas bukan dimaksudkan menentukan tinggi rendahnya harkat, martabat, dan derajat setiap kelompok, tetapi lebih mengacu pada fungsi dan kemampuan atau kesanggupun bidang tugas yang dikerjakan dalam keseharian hidupnya. Hal itu hanya sekedar simbolis dan mendukung keseluruhan sistem hidup dan kehidupan sosial masyarakat Hindu. Dengan demikian, dalam sistem *catur warna* tidak ada satu kelompok atau golongan yang patut merasa lebih tinggi dari yang lain. Sebenarnyalah di mata Tuhan yang membedakan jati diri manusia dari manusia lain adalah *karmanya (Bhagawadgita,* Bab XVIII:41).

Istilah *kasta* berasal dari bahasa latin yaitu *catus* yang berarti utama, murni, tak bernoda, suci dan terhormat (Prent, 1969:119). Dalam bahasa Portugis, *casta* berarti keturunan, ras (Webster's, 1951:418). Pengertian inilah yang dipakai oleh orang Eropa untuk membedakan atau menggolongkan kelompok-kelompok sosial yang ada di India. *Kasta* adalah cermin stratifikasi masyarakat India masa lampau.

Menurut sejarah, *kasta* diperkirakan muncul kira-kira setelah tahun 1500 sebelum Masehi ketika ekspansi suku bangsa Arya dari rumpun bangsa Indo-German atau Indo-Eropa ke India (Wiana, 1989:5). Suku bangsa Arya mempunyai fisik: berkulit putih, hidung mancung, dan rambut pirang terkenal akan keperkasaannya dan kemahirannya dalam berperang. Suku bangsa Dravida penduduk asli lembah Sungai Sindu di India yang berkulit hitam, hidung pesek, dan rambut keriting, dengan mudah dapat ditaklukkannya walaupun telah memiliki lingkungan peradaban dan kebudayaan tinggi. Seperti lazimnya pihak pemenang yaitu suku bangsa Arya mengokohkan dirinya sebagai pihak terjajah dipandang sebagai budak. Dengan demikian, konsekuensi perlakuan terhadap

golongan masyarakat Dravida pun akhirnya di posisi pertikalkan sebagai golongan pengusaha dengan yang dikuasai atau golongan petinggi dan rendahan. Sesungguhnya *kasta* bermakna diskriminasi yakni sebagai usaha suku bangsa Arya untuk memelihara dan sekaligus menjaga kemurnian darah dan warna kulit (ras) mereka dengan suku bangsa Dravida. *Kasta* di India membedakan harkat dan martabat manusia menjadi empat golongan secara vertikal-genealogis yaitu: *brahmana* kasta tertinggi, *ksatria* golongan kedua, *waisia* dan *sudra,* kasta yang paling rendah. Di samping keempat *kasta* tersebut di India juga dikenal kasta *Paris* sebagai *Cendala* (hina). *Kasta* pada hakikatnya bertentangan dengan ajaran agama Hindu.

Istilah *wangsa* di Bali belum diketahui dari bahasa apa asal-usulnya. Kemungkinan merupakan metamorfose dari kata *warna. Wangsa* di Bali membedakan masyarakatnya berdasarkan keturunan. Penggolongan masyarakat Bali yang didasarkan pada sistem wangsa disebut *catur wangsa* yang sebutan pembagiannya sama dengan *catur warna* yakni *brahmana, ksatria, waisia,* dan sSudra. Wangsa brahmana, ksatria, dan *waisia* menyebut diri mereka golongan *triwangsa,* dan *wangsa sudra* menyebut dirinya golongan *jaba.* Pelapisan tersebut lebih tampak berbau feodal yang tumbuh dan berkembang tidak dapat dilepaskan dari politik pemerintah kerajaan masa lalu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah Bali.

Dalam kenyataan sistim *wangsa* di Bali membedakan kelompok sosial tidak setajam *kasta* di India. Pernyataan itu terungkap juga dalam percakapan Ida Gde Suamba dengan Chatter Jee dari India seperti di bawah.

> "Jika demikian keempat warga itu masih kedapatan di pulau ini?'
> "Ya, tuan Chatter Jee, tetapi tidak sebesar di India perbedaan masing-masing," kata anak muda itu sambil menyilakan Chatter Jee minum rokok. "Jika lama tuan di Pulau Bali ini, akan tuan persaksikan sendiri betapa mereka bergaul, sebagai sudah sama rata saja." (*SGB,* hlm. 74).

Diakui dalam sistem *wangsa*, ada suatu golongan yang secara tradisional mendapat hal-hal istimewa terutama dalam pergaulan adat. Timbulnya

sistem *wangsa* di Bali diperkirakan semenjak pemerintahan Dalem Sri Kresna Kepakisan yang diangkat oleh Maha Patih Gajah Mada setelah Bali ditaklukkan oleh Majapahit tahun 1343.

Pada waktu Pemerintahan Dalem itulah datang seorang pendeta dari Majapahit yang bernama Dang Hyang Dwi Jendra, yang kemudian disusul oleh keponakannya bernama Dang Hyang Astapaka. Kedua pendeta itulah yang diyakini secara tradisional menurunkan warga *Brahmana Siwa* dan *Budha* di Bali, dan beliau yang menyebarkan agama Hindu dan Budha di Pulau Bali. Dang Hyang Dwi Jendra menyebarkan agama Hindu dan Dang Hyang Astapaka menyebarkan agama Budha. Di Bali kedua ajaran agama tersebut tidak nyata perbedaannya seperti di India. Kenyataan ini terungkap dalam pernyataan di bawah.

> "Agama Budha sebagaimana tersebut dalam buku-buku Hindu, yaitu Budha Gautama, tidak nyata ada di pulau ini. Di sini agama itu telah bercampur dengan agama Siwa. Pedanda Budha kebanyakan kedapatan di Karangasem, dan cuma Brahmana wangsa juga yang boleh berdiksa menjadi pedanda Budha itu," kata anak muda itu.
> Orang itu mengangguk-angguk kepalanya, serta bertanya pula, "Jadi bukan tiap-tiap orang, sebagai kedapatan pada agama Budha di India?"
> "Tidak, tuan Chatter Jee, "Jawab anak muda itu. "Demikian pula orang boleh minta toya-tirta kepada kedua pendeta itu, apalagi bila melakukan upacara membakar mayat."
> "Ha, jika demikian benar sebagai kata tuan tadi, hampir tak ada perbedaan antara agama Bhuda dengan Siwa di pulau ini, "kata orang hitam itu dengan senang hati, karena mendapat keterangan itu. *(SGB,* hlm. 73).

Pada mulanya putra-putri kedua pendeta itu menggunakan nama Ida dan diikuti dengan nama urutan kelahiran orang Bali pada awal namanya, seperti Ida Wayan/Gede/ Putu" (anak I). "Ida Made/ Kadek/ Kade (anak II), Ida Nyoman/Komang (anak III), dan Ida Ketut (anak keempat). Kalau lahir anak kelima dan seterusnya, diulang lagi dari sebutan yang pertama, nama belakangan warga *Brahmana Siwa* menggunakan sebutan Ida Bagus untuk anak laki-laki dan Ida Ayu untuk anak perempuan.

Penggolongan *Wangsa ksatria* di Bali dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *Ksatria Dalem* keturunan Sri Kresna Kepakisan dan *Ksatria Jawa* yang datang ke Bali bersama Maha patih Gajah Mada waktu mengadakan ekspansi tahun 1943. Bagi keturunan Sri Kresna Kepakisan yang naik tahta kerajaan bergelar Dewa Agung dan anak-anaknya bergelar Cokorda. Keturunannya yang tidak menjabat tahta kerajaan mendapat gelar I Dewa: untuk laki-laki dan I Dewa Ayu untuk perempuan (Putra Agung, 1974:53). Dalam *Kidung Paman Cangah* (transliterasi Gora Sirikan, 1957) disebutkan bahwa *Ksatria Jawa* yang datang ke Bali terdiri dari para *Arya* (pimpinan pasukan), yaitu Arya Kepakisan, Kanuruhan, Kenceng, Dalancang, Tan Wikan, Wang Bang, Kutawaringin, Pengalasan, Gajah Para, Manguri, dan Kuta Wandira. Keturunan mereka bergelar I Gusti. Sesudah masuknya kekuasaan Pemerintah Belanda di Bali, golongan ksatria Jawa yang diangkat menjadi raja bergelar Anak Agung. Pernyataan itu terungkap dalam surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Juni 1929, nomor 226 yang menetapkan kembali eksistensi delapan kerajaan di Bali yang disebut *asta Negara* serta disumpah di Pura Besakih. Raja Buleleng, Jemberana, Gianyar, Bangli, dan Karangasem diberi gelar Anak Agung, Raja Badung dan Tabanan bergelar Cokorda, dan Raja Klungkung bergelar I Dewa Agung (Wiana, 1989:33).

Mengenai golongan *Wangsa Waisia* di Bali, disebutkan dalam *Kidung Paman Cangah* bahwa pada waktu para Arya tersebut datang ke Bali ikut serta tiga orang dari golongan *waisia*, yaitu Tan Kober, Tan Kawur, dan Tang Mundur sebagai laskar Majapahit. Dalam perkembangannya kemudian tidak terdapat sumber secara pasti tentang keturunannya. Memang dalam masyarakat Bali ada anggota masyarakat yang nama depannya beratribut Si, Sang, dan Gusti yang diperkirakan keturunan mereka. Kemungkinan kekaburan golongan ini disebabkan karena faktor ekonomi dan kekuasaan. Di samping itu, banyak dari warga *sudra* atau *jaba* menekuni bidang perekonomian.

Golongan *Wangsa Sudra* di kalangan masyarakat Bali lebih dikenal dengan sebutan *jaba* yang berarti golongan yang bertempat tinggal di luar istana *(puri),* dan ada juga pendapat bahwa *jaba* berarti di luar golongan *triwangsa*. Di samping itu, ada lagi sebutan bagi orang *jaba* adalah

*kawula* yang berarti abdi atau orang kebanyakan. Ciri nama depan *wangsa Sudra* yaitu: I Wayan/Gede/Putu (anak I), I Made/Kadek" (anak II), I Nyoman/Putu" (anak III), dan I Ketut (anak IV). Ciri nama depan itu untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan adalah Ni atau Ni Luh. Demikian seterusnya kalau lahir anak kelima, keenam, dan selanjutnya kembali nama depannya ke urutan pertama, kedua dan seterusnya. Secara umum warga *sudra* dapat diklasifikasikan lagi atas jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu: warga *pande* yaitu orang yang mengerjakan berang-barang dari emas, perak, maupun jenis logam yang lain; warga *sangging* yang menekuni pekerjaan sebagai pelukis, pematung, maupun menganya; serta warga *pasek, senggu* dan sebagainya yang aktivitasnya tidak mengkhusus.

Dari penjelasan di atas dapat diungkapkan bahwa stratifikasi tokoh-tokoh dalam *SGB* adalah: Ida Gde Suamba berasal dari warga *Brahmana Bhuda,* I Gusti Made Tusan dari *Ksatria Jawa,* dan tokoh-tokoh yang lain dari warga *sudra* atau *jaba.*

Pada jaman Pemerintahan Belanda di Bali hubungan antara *wangsa* tersebut berjalan seperti zaman kerajaan. Tampaknya pemerintah kolonial Belanda mengambil keuntungan tersendiri dengan adanya diskriminasi berdasarkan keturunan itu dengan mengesahkan keputusan hukum *pasuara* (tak tertulis) tahun 1910 dan diperkuat oleh Beslit Residen Bali dan Lombok tertanggal 11 April 1927 nomor 352. Jl. C.2 yang isinya: kalau ada laki-laki *triwangsa* mengambil perempuan dari warga *sudra* dapat dibenarkan. Perempuan yang menjadi istri tersebut akan diberi julukan "jero" biasanya ditambah dengan nama bunga seperti: cempaka, sandat, kamboja (jepun), dan sebagainya, tetapi kalau perempuan dari warga *triwangsa* diambil oleh laki-laki dari warga *sudra* merupakan suatu pelanggaran. Pelanggaran itu disebut *Asu Pundung* dan *Alangkahi Karang Hulu. Asu Pundung* adalah perkawinan mempelai wanita warga *Brahmana* diambil oleh laki-laki warga *Sudra,* dan *Alangkahi Karang Hulu* adalah perkawinan mempelai wanita dari warga *Ksatria* diambil oleh laki-laki warga *Sudra.* Kalau ada laki-laki yang berani melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi *selong* (dibuang), di antaranya *didebok* yaitu ditenggelamkan di tengah laut sampai mati (Putra Agung, 1974:67; Wisna, 1989:33).

Stratifikasi *catur wangsa* dalam perjalanan sejarahnya memang lebih menampakkan tinggi rendahnya kelompok warga dari masing-masing *wangsa* itu. Hal itu terbukti juga dalam pergaulan sehari-hari, warga *sudra* atau *jaba* secara sukarela berbahasa "halus" dengan warga "*triwangsa*. Warga *sudra* atau *jaba* tidak merasa tersinggung kalau bahasa "halusnya" dijawab dengan bahasa "kasar" oleh warga *triwangsa*.

Dari *SGB* kenyataan itu terungkap pada dialog tokoh-tokoh warga *Sudra*, menyebut "ratu" kepada warga *triwangsa*. Bahkan dalam keadaan duduk pun warga *triwangsa* selalu lebih tinggi dari warga *sudra*. Seperti terungkap dalam pernyataan di bawah.

> I Gusti Made Tusan duduk di atas bangku, opasnya di bawahnya... "Aku hendak pergi ke Tigawasa dan bermalam di situ. Bersediakah engkau menemani aku,Made Asemah?" kata menteri polisi itu kepada orang itu, tatkala ia sudah duduk bersila di bawahnya. *(SGB*, hlm. 20)

> "He, ada di sini maka ramai?" tanya menteri polisi itu setelah ia tiba di kedai itu.
> "Men Negara kedapatan sedang menyembelih babi, ratu," kata Made Asemah.
> Dengan segera Men Negara berkata dengan gemetar suaranya. "Tidak, ratu, sama sekali tidak. Saya tidak memotong babi. Saya menyuruh mengikat babi itu untuk disembelih besok. *(SGB*, hlm. 25).

> "Mengapa?" tanya Ida Gde Suamba kepada I Mujana. I Lenged tidak berani memanjat pohon kelapa itu, ratu," jawab mandur itu sambil menunjuk kelapa yang tinggi. *(SGB*, hlm. 24).

Masuknya pengaruh kebudayaan Barat ke Bali sekitar abad XX membawa dampak pembaharuan terhadap masyarakat Bali. Peran dan fungsi masing-masing kelompok sosial *(wangsa)* yang pada awalnya membedakan hak asasi manusia menjadi semakin kabur atau rancu (untuk tidak menyebutnya kacau) seperti yang tercermin dalam *SGB*. Kehidupan

tokoh Men Negara melalui usaha perekonomian, status sosialnya mengalami perubahan karena dari segi warga Men Negara adalah *sudra*, tetapi dari segi pekerjaan yang ditekuni adalah *waisia*. Demikian juga Ida Gde Suamba. Dari kedudukan warganya, dia adalah warga *brahmana*, tetapi pekerjaan yang ditekuni adalah pekerjaan kelompok *waisia* (dalam catur warna). Bahkan, I Ketut Rai yang berasal dari warga *sudra* menekuni pekerjaan dari kelompok *ksatria* dalampenjabaran *catur warna*.

Adanya pembaharuan dalam struktur kelompok sosial yang tercermin dalam *SGB*, yang identik dengan situasi dan kondisi masyarakatnya, muncul dugaan adanya hubungan yang simetris antara struktur dalam teks (intrinsik) dengan unsur tersebut yang begitu kompleks menunjukkan bahwa *SGB* telah memenuhi persyaratan sebagai karya sastra yang besar (Goldman, 1977:16). Dari pandangan inilah sebuah karya sastra terlihat sebagai suatu bentuk strukturasi yang konkret atas respons pengarangnya terhadap situasi sekelilingnya (Goldman, 1981:53). Kenyataan ini sesuai dengan pandangan Umar Junus (1986:3) yang mengatakan bahwa telaah sosiologi sastra menganggap bahwa karya sastra sebagai dokumen sosio-budaya masyarakatnya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa struktur kelompok sosial masyarakat Bali yang terdiri dari warga *brahmana, ksatria, waisia,* dan *Sudra* sedang dalam transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern akibat pengaruh kebudayaan Barat sekitar tahun 1930-an.

# BAB VI
# SIMPULAN

Berdasarkan teori struktural semiotik dalam analisis warna lokal Bali pada novel *SGB* di atas, penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Kehidupan masyarakat Bali pada umumnya dijiwai dan dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan yang berasaskan ajaran agama Hindu. Kenyataan itu tercermin dalam unsur-unsur *SGB*.

Plot *SGB* yang merupakan rangkaian peristiwa berdasarkan sebab akibat, serta menggerakkan jalannya cerita ke arah pertikaian dan penyelesaian mengungkapkan salah satu aspek kepercayaan masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu tentang adanya hukum *karmaphala,* yaitu hukum sebab akibat dari perbuatan seseorang. Kenyataan tersebut tersurat dalam perbuatan Men Nagara dan I Gusti Made Tusan yang menjerumuskan Luh Sukreni, yang akhirnya menerima ganjaran yang menyedihkan atas perbuatan mereka. I Gusti Made Tusan terbunuh oleh anaknya sendiri, demikian pula harta benda kekayaan Men Negara hangus terbakar. Nasib yang sama juga menimpa I Gustam. Ia mati di tangan ayahnya sendiri akibat perbuatannya sebagai perampok.

Dari dimensi perwatakan atau penokohan, *SGB* mengungkapkan struktur kelompok sosial dalam masyarakat Bali. Hal itu tercermin dari nama-nama tokohnya, seperti Ida Gde Suamba dari warga *brahmana,* I Gusti Made Tusan dari warga *ksatria.* Tokoh *waisia* tidak terwakilkan karena warga itu kurang ditonjolkan dalam *SGB,* dan warga *sudra* atau *jaba* mendominasi penokohan *SGB* di antaranya Men Negara, Luh Sukreni, I Made Aseman, I Gustam, dan Pan Gumirang.

Status sosial untuk kelompok *brahmana, ksatria, waisia,* dan *sudra* dalam ajaran agama Hindu didasarkan pada bakat dan jenis pekerjaan

yang dilakukan dalam masyarakat untuk mencapai kehidupan yang harmonis baik lahir maupun batin. Kelompok *brahmana* adalah orang yang berbakat dalam bidang keagamaan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Kelompok *ksatria* adalah orang yang berkedudukan dalam bidang pembelaan negara dan pemerintahan. Kelompok *waisia* adalah orang yang berbakat dalam bidang perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, dan kekompok *sudra* adalah orang yang berbakat dalam bidang pertanian atau pekerja-pekerja yang mengandalkan kekuatan fisik. Keempat kelompok itu saling bahu-membahu untuk kesejahteraan, ketenteram, keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat. Menurut ajaran *catur warna* tidak ada perbedaan harkat kemanusiaan dari masing-masing kelompok tersebut.

Dalam masyarakat Bali, pengelompokan sosial berdasarkan ajaran *catur warna* itu tidak konsisten dilaksanakan sebagaimana mestinya (dirancukan). Hal itu disebabkan pengelompokan sosial dalam masyarakat Bali didasarkan pada keturunan (patrilinial) yang disebut *wangsa* kemudian lebih populer dengan sebutan *kasta* (versi Bali). Di Bali kelompok *brahmana, ksatria,* dan *waisia* menyebut dirinya warga *triwangsa* dan kelompok *sudra* menyebut dirinya warga *jaba.*

Pada zaman pemerintahan kerajaan di Bali, antara warga *triwangsa* dengan warga *jaba* memiliki perbedaan yang meyangkut masalah harkat kemanusiaan. Laki-laki dari warga *jaba* tidak diperbolehkan mengawani perempuan dari warga *triwangsa.* Oleh karena itu, diberlakukan aturan-aturan mengenai larangan tentang perkawinan tersebut, *Asu Pundung* adalah larangan bagi laki-laki warga *jaba* mengawini perempuan warga *brahmana, Alangkahi Karang Hulu* adalah larangan bagi laki *jaba* mengawini perempuan warga *ksatria* dan *waisia.* Jika terjadi perkawinan seperti tersebut, laki-laki tersebut dikenakan sanksi yang disebut *selong* yaitu ditenggelamkan ke laut. Hanya warga *brahmana* yang berhak menjadi *pedanda* (pendeta) Hindu dan hanya warga *ksatria* yang berhak memegang pemerintahan (menjadi raja).

Hal yang sama juga berlaku dalam upacara keagamaan, khususnya upacara *pitra yadnya* atau *ngaben* yang pada hakikatnya mengembalikan unsur-unsur manusia ke asalnya melalui proses pembakaran mayat. Proses upacara itu pada warga *triwangsa* mengambil tingkatan *sawa*

*pretaka,* sedangkan warga *jaba* pada tingkat *asti wedana (sewa wedana).*

Warga *jaba* menggunakan bahasa halus kepada warga *triwangsa* dalam pergaulan. Warga *jaba* menyebut ratu terhadap warga *triwangsa.* Pernyataan itu terungkap dalam dialog tokoh-tokoh warga *jaba* kepada Ida Gde Suamba dan I Gusti Made Tusan.

Berdasarkan aspek tempat, waktu, dan aspek sosial yang terungkap dalam peristiwa atau kejadian pada SGB mencerminkan situasi dan kondisi masyarakat Bali sekitar tahun 1930-an, yaitu saat-saat masuknya pengaruh kebudayaan Barat dalam kehidupan masyarakat Bali baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi.

Dari aspek gaya bahasa, *SGB* cukup menarik dan bervariasi. Variasi penggunaan gaya bahasa dalam melukiskan nilai-nailai budaya masyarakat Bali cukup tepat. Maksudnya, pengarang di dalam melukiskan istilah-istilah yang mengandung nilai-nilai budaya yang cukup tinggi itu diungkapkan dengan kata-kata yang sangat sederhana tetapi mampu melahirkan nuansa makna yang dalam. Makna budaya yang cukup mendalam seperti itu dikemas melalui gaya bahasa yang tidak berbunga-bunga dan tidak berbelit-belit.

Dalam menerima pengaruh perubahan sosial, masyarakat Bali Utara lebih terbuka bila dibandingkan dengan masyarakat Bali Selatan. Oleh karena itu, mobilitas perubahan tentang faham *wangsa* (atau *kasta)* lebih banyak dalam masyarakat Bali Utara. Hal itu terungkap dalam *SGB* yakni tentang pandangan tokoh Ida Gde Suamba dan Men Nagara bahwa setiap manusia apa pun *wangsanya* tidak lagi mempunyai perbedaan harkat kemanusiaan baik dalam hak maupun kewajiban.

Pandangan seperti itu tercermin juga dalam bidang politik khususnya pemerintahan, yang sebelumnya hanya dipegang oleh warga *ksatria,* sudah mulai digeser yakni diisi oleh warga *jaba* seperti tokoh I Ketut Rai yang menjadi pegawai pemerintahan di Jemberana. Demikian juga, di bidang ekonomi terjadi pembaharuan, yang sebelumnya hanya ditekuni oleh warga *waisia* akhirnya banyak diminati oleh warga *jaba.* Kenyataan itu terungkap pada pekerjaan Men Negara sebagai pedagang. Bahkan Ida Gde Suamba yang berasal dari warga *brahmana* menekuni bidang perekonomian sebagai pedagang kelapa. Ide-ide atau gagasan-gagasan, pikiran-pikiran seperti itulah yang mencerminkan pandangan pengarang

terhadap alam dan masyarakat sekitarnya.

Novel *SGB* dapat dipahami secara lebih lengkap bila dihubungkan dengan struktur sosial budaya yang melatarbelakanginya. Unsur data meliputi data kepengarangan, terutama proses penciptaannya, kondisi ekonomi, politik, agama, dan kelompok sosial masyarakat yang diceritakannya. Dengan demikian, pemahaman yang didasarkan pendekatan struktural semiotik membuktikan struktur *SGB* mempunyai makna yang koheran dengan realitas masyarakat pada zamannya, yaitu keadaan dan situasi masyarakat Bali sekitar tahun 1930-an.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdullah, Imran T. *et al.* 1979/1980. "Cerpen-Cerpen Angkatan 45 dan Masalah-Masalahnya". Yogyakarta: Proyek PPPT Universitas Gadjah Mada.

Abrams, M.H. 1979. *The Mirror and the Lamp.* London, New York: Oxford University Press.

----------. 1981. *A Glossary of Literary Terms.* New York: Holt, Rinehart and Winston.

Abu, Rivai (Ed.). 1981. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali.* Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali. Depdikbud. Propinsi Bali.

Agung, Anak Agung Putra. 1974. "Perubahan Sosial dan Pertentangan Kasta di Bali Utara 1924--1928." Yogyakarta: Skripsi Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.

Artadi, I Ketut. 1987. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Permasalahannya.* Denpasar: Setia Kawan.

Bagus, I Gusti Ngurah, 1972. "Persepsi Arti Karmaphala dalam Kepercayaan Rakyat di Bali." Fakultas Sastra, Universitas Udayana.

Branstetter, Renward. 1957. *Akar Kata dan Kata dalam Bahasa-bahasa Indonesia.* Terjemahan Jakarta: Pustaka Rakyat.

Culler, Jonathan. 1977. *Structuralist Poetics. Structuralism. Linguistics and Study of Literature.* London: Routladge & Kegan Paul Ltd.

Damono, Sapardi Djoko. 1979. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas.* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud.

----------. 1993. *Novel Jawa Tahun 1950-an Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Darmayuda, I Made Suasthawa. "Dinamika Desa Adat Dalam Mengikuti Perkembangan Zaman". Dokumentasi Budaya Bali Lontar, No. 4, Triwulan IV, 1997.

Effendy, Chairil, *et al.* 1996. *Citra Hero Telaah Unsur Tokoh Teks Raja Alam*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud.

Forster, E.M. 1970. *Aspects Of The Novel*. Harmon Englad: Penguin Book Ltd.

Geertz, Clifford. 1973. *Penjaja dan Raja*. Di Indonesiakan oleh S. Supomo. Jakrta: Gramedia.

Goldmann, Lucian. 1977. *Toward A Sosiology of the Novel*. London: Tavistok Publications Limited.

----------. 1981. *Method in the Sociology of the Literature* England: Brasil Blackwell Publisher.

Goris, R. 1986. *Sekte-Sekte di Bali*. Diindonesiakan oleh Ny. P.S. Kusumo Sutojo. Jakarta: Bharata Karya Aksara.

Hawks, Terence. 1978. *Strukturalism and Semiotics*. London: Metheren KCO Ltd.

Hodzon, William Henry. 1960. *An Introduction to the Study of Literature*. London: G.G. Harrap & Co.

Hutagalung, M.S. 1963. *Tanggapan Dunia Asrul Sani*. Jakarta: Gunung Agung.

Junus, Umar. 1986. *Sosiologi Sastra Persoalan Teori dan Metode*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Keraf, Goris. 1984. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat. 1974. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.

----------. 1974. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Kusuma, I Nyoman Weda. 1990. "Novel Sukreni Gadis Bali Sebuah Tinjauan Sosiologi Sastra". Tesis, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kuntowijoyo. 1986. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Lubis, Mochtar. 1960. *Teknik Mengarang*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mantra, Ida Bagus. 1967. *Bagawadgita: Alih Bahasa, dan Penjelasan*. Denpasar: Parisada Hindu Dharma.

Muhammad, Busar. 1978. *Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Parwatha, Made Pasek. 1995. "*Aspek Latar dan Penokohan Novel Mlancaran Ka Sasak Karya Gde Srawana*". Denpasar: Balai Penelitian Bahasa.

Poerwadarminta, W.J.S. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Pradopo, Rachmat Djoko. 1987. *Pengkajian Puisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.

Prajaniti Widya Sasana Hindu Dharma. 1971. Denpasar: Dewan Pimpinan Pusat.

Prent C.M. K. 1969. *Kamus Latin Indonesia*. Semarang: Kanisius.

Rata, Ida Bagus. 1988. "Sistem Organisasi Desa Adat di Bali." Denpasar: *Widya Pustaka* Fakultas Sastra Universitas Udayana.

Retnoningsih, Aning. 1965. *Roman dalam Masa Pertumbuhan Kesusastraan Indonesia Modern*. Jakarta: Erlangga.

Rosidi, Ajip. 1969. *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*. Bandung: Binacipta.

Saat, M. Salaeh. 1967. "Catatan Kecil Sekitar Penelitian Kesusastraan." Dalam *Bahasa dan Kesusastraan sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*. Lukman Ali (Editor). Jakarta: Gunung Agung.

Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali. "Produk DPRD Propinsi Daerah Tingakt I Bali", dalam Tahun Sidang 1986/1987.

Sirikan Gora. 1957. *Kidung Paman Cangah*. Terjemahan. Denpasar: Pustaka Balimas.

Soepomo, R. 1978. *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Stanton, Robert. 1965. *And Introduction to Fiction*. New York: Wolt Rinehart & Winston.

Sudjiman, Panuti. 1992. *Memahami Cerita Rekaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Sukada, Made. 1987. *Pembinaan Kritik Sastra Indonesia*. Bandung: Angkasa.

Sumardjo, Jakob. 1980. "Terbit Pertama Kali Tahun 1936, Sukreni Gadis Bali." *Pikiran Rakyat*, 17 Desember, hlm. VII.

Surpha, I Wayan. 1997. "Pelaksanaan Adat Bali dalam Pembangunan". *Majalah Dokumentasi Budaya Bali Lontar*. No. 5. Triwulan I/1987.

Tarigan, Henry Guntur. 1984. *Prinsip-Prinsip Dasar Sastra*. Bandung: Angkasa.

Teeuw, A. 1957. *Pokok dan Tokoh Dalam Kesusastraan Indonesia Baru I*. Jakarta: Pembangunan.

----------. 1982. *Khazanah Sastra Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

----------. 1983. *Membaca dan Menilai Sastra*. Jakarta: Gramedia.

----------. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Tisna, A.A. Panji. 1936. *Sukreni Gadis Bali*. Jakarta: Balai Pustaka.

Webster's *New International Dictionary of the English Language*. 1951. Spring field: G & C. Mariam Company Publisher.

Wellek, Renne dan Austin Waren. 1962. *Theory of Literature*. New York: Hartcoart, Brace & World, Inc.

Wiana, I Ketut. 1986. "Arti Filosofis Upacara Ngaben." Denpasar: Kanwil. Depag. Propinsi Bali.

----------. 1989. "Catur Warna dan Permasalahannya dalam Masyarakat Indonesia." Denpasar: Institut Hindu Dharma.

Widana, I Gusti Ketut. 1989. "Kasta, Warna, dan Wangsa". *Bali Post*. 10 Mei, hlm. V.

Yus. M. 1975. "Anak Agung Panji Tisna Empat Tahun di Lereng Gunung Batur untuk Menulis Buku." *Kompas*, 2 September, hlm. V, kolom 1–3.

Zaimar, Okke KS. 1991. *Menelusuri Makna Ziarah Karya Iwan Simatupang*. Jakarta: Intermasa.



PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL